

Yth.

Direksi Lembaga Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049), yang selanjutnya disebut POJK PPID SLIK, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan guna mendukung kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas Debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor melakukan penyampaian:

- a. Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
- b. koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas temuan Pelapor atau atas temuan OJK.

II. PELAPOR

1. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) POJK PPID SLIK, pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
 - a. Bank Umum yang meliputi:
 - 1) Bank Umum konvensional;
 - 2) Bank Umum Syariah; dan
 - 3) Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional induknya;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
 - d. Lembaga Pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Pembiayaan induknya; dan
 - e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi:
 - 1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menjadi induknya.
2. Pihak yang dapat menjadi Pelapor adalah:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro; dan
 - b. lembaga lain bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain koperasi simpan pinjam,yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam POJK PPID SLIK.

III. TATA CARA MENJADI PELAPOR

1. Pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 1 ditetapkan menjadi Pelapor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, yang pada saat POJK PPID SLIK berlaku telah menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur (SID), ditetapkan sebagai Pelapor sejak POJK PPID SLIK mulai berlaku.
 - b. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang pada saat POJK PPID SLIK mulai berlaku belum menjadi Pelapor SID, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
 - c. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang pada saat POJK PPID SLIK berlaku belum menjadi Pelapor SID, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
 - d. BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang mengajukan untuk menjadi Pelapor sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal surat persetujuan OJK. Permohonan untuk menjadi Pelapor ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi dan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.
 - e. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha setelah POJK PPID SLIK mulai berlaku, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
 - f. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2018, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
 - g. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2022, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
2. Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis yang telah ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - 1) salinan anggaran dasar;
 - 2) struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memuat paling sedikit bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan sumber daya manusia;
 - 3) bukti kesiapan data yang diperlukan dalam pelaporan SLIK sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini; dan
 - 4) bukti kesiapan perangkat komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- b. Pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 2 ditetapkan menjadi Pelapor sejak tanggal persetujuan dari OJK.
3. OJK memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan menjadi Pelapor diterima secara lengkap oleh OJK dan seluruh persyaratan untuk menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam POJK PPID SLIK terpenuhi.
4. Setelah ditetapkan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf b, Pelapor:
 - a. menyampaikan permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini; dan
 - b. menyampaikan laporan seluruh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK menggunakan format sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam POJK PPID SLIK.

Permohonan *user ID* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan laporan seluruh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi dan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktorat Pengelolaan Informasi Kredit.

IV. LAPORAN DEBITUR

1. Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor kepada OJK disusun sesuai dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan Debitur mencakup informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. Fasilitas Penyediaan Dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk:
 - 1) kredit atau pembiayaan
penyediaan uang, barang dan/atau jasa, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 - 2) surat berharga
surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
 - 3) transaksi rekening administratif
kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi jaminan, *Letter of Credit (L/C)*, *Standby Letter of Credit (SBLC)*, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain; dan
 - 4) fasilitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan Fasilitas Penyediaan Dana;

- c. agunan;
 - d. penjamin;
 - e. pengurus dan pemilik; dan
 - f. keuangan Debitur.
3. Laporan Debitur meliputi data seluruh Debitur yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana termasuk pula Debitur yang telah dihapus buku, telah dihapus tagih, sedang dalam proses penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Pelapor karena Pelapor telah dicabut izin usaha atau dilikuidasi, serta Debitur yang menerima penerusan kredit atau pembiayaan.
 4. Laporan Debitur yang disampaikan meliputi data Debitur dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana dan disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.
 5. Laporan Debitur disajikan dalam mata uang rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan dalam valuta asing maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai rupiah dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 6. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur:
 - a. Penyampaian Laporan Secara Daring (*Online*)
 - 1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh kantor pusat Pelapor secara daring (*online*) kepada OJK.
 - 2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi SLIK adalah Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - 3) Sandi Pelapor yang digunakan dalam SLIK ditetapkan oleh OJK.
 - 4) Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, menyampaikan laporan nihil secara daring (*online*) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK.
- b. Penyampaian Laporan Secara Luring (*Offline*)
- 1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.
 - 2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan dalam bentuk *file* kirim yang dihasilkan dari aplikasi SLIK yang disimpan dalam bentuk antara lain *compact disc* atau *USB flashdisk* dan disertai pemberitahuan tertulis kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 - 3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang dilakukan secara luring (*offline*) adalah Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - 4) Bagi Pelapor yang mengalami gangguan teknis melampirkan dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis, antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan jaringan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik, atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring (*online*) sehingga menyebabkan Pelapor mengalami kesulitan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*).
 - 5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur beserta dokumen pendukung disampaikan kepada:

- a) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b) Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- 6) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK.
7. Pengkinian data Laporan Debitur oleh OJK:
- a. Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi.

Pelapor yang telah dicabut izin usaha sehingga tidak dapat lagi melakukan pengkinian Laporan Debitur di dalam aplikasi SLIK maka OJK dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur berdasarkan permohonan tertulis antara lain dari:

 - 1) pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi; atau
 - 2) Debitur dari Pelapor yang telah dicabut izin usaha dengan menyertakan dokumen pendukung antara lain:
 - a) identitas diri
 - (1) bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA); atau
 - (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.

(2) bagi Debitur badan usaha

- (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau
- (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan; dan
- b) fotokopi Surat Keterangan Lunas (SKL), berita acara penyelesaian kewajiban, atau salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan dengan menunjukkan dokumen asli.
- b. Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian laporan debitur karena sebab lain.
 - 1) OJK dapat melakukan pengkinian data dalam hal:
 - a) Pelapor tidak memenuhi ketentuan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor; atau
 - b) ditemukan kesalahan Laporan Debitur dengan periode laporan di atas 12 (dua belas) bulan sehingga Pelapor tidak dapat melakukan koreksi.
 - 2) Pengkinian data dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor.

- c. Permohonan pengkinian data disampaikan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

V. INFORMASI DEBITUR

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lain.

1. Cakupan Informasi Debitur

Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh Pelapor dan Debitur diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, sedangkan cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh LPIP dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur oleh Pelapor

a. Tata Cara Permintaan

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK. Permintaan dimaksud dilakukan secara daring (*online*) melalui jaringan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Penggunaan Informasi Debitur

Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- 1) mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana sesuai prinsip kehati-hatian dalam pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- 2) menerapkan manajemen risiko dalam menunjang kegiatan operasional Pelapor, misalnya penggunaan Informasi Debitur untuk pemantauan Debitur *existing*, proses seleksi pegawai Pelapor, seleksi rekanan Pelapor, pelaksanaan audit, serta program anti *fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling*; dan/atau
- 3) mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, misalnya

untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

- a. Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
- b. Tata cara permintaan
 - 1) Permintaan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur dapat mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Kantor OJK setempat.
 - b) Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.
 - c) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - (1) Bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA; atau
 - (b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - (2) Bagi Debitur badan usaha
 - (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha

yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa NPWP, akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

- (b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan.
 - d) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini maka Informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.
- 2) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
 - b) Pengajuan permintaan Informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - c) Pelapor melakukan upaya untuk dapat meyakini bahwa permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan POJK PPID SLIK.
 - d) Pelapor menatausahakan semua pemberian Informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling sedikit meliputi tanggal

pemberian Informasi Debitur, nama Debitur, peruntukan Informasi Debitur serta pegawai Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

4. Permintaan Informasi Debitur oleh LPIP

- a. LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.
- b. OJK dapat memberikan Informasi Debitur kepada LPIP secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- c. Untuk dapat memperoleh Informasi Debitur secara daring (*online*), LPIP menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan disertai dengan daftar pegawai penanggung jawab LPIP yang akan diberikan hak akses.
- d. Mekanisme pemberian Informasi Debitur dari OJK kepada LPIP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.

5. Permintaan Informasi Debitur oleh Pihak Lain

- a. Pihak lain dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.
- b. Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara rutin mengadakan perjanjian dan/atau nota kesepahaman dengan OJK.
 - 2) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara insidental menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Permohonan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan menyampaikan alasan dan tujuan penggunaan Informasi Debitur serta identitas Debitur yang dimintakan informasi.
 - 3) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

OJK ini, Informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan SLIK dilakukan oleh OJK terhadap Pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

- a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada Pelapor.
- b. Pemeriksaan kepada Pelapor dilakukan secara insidental.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap POJK PPID SLIK dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain:
 - 1) sistem dan prosedur yang ada pada Pelapor dalam melaksanakan kegiatan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK;
 - 2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor; dan/atau
 - 3) penggunaan Informasi Debitur.
- d. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor memberikan:
 - 1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - 2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain perangkat keras, aplikasi SLIK, pangkalan data, rekam cadang data, koneksitas ke jaringan OJK, dan antarmuka ke sistem intern Pelapor; dan
 - 3) hal-hal lain yang diperlukan, yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen

Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

2. Pengawasan Tidak Langsung

- a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lain.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh OJK, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda mengacu pada Peraturan OJK mengenai tata cara penagihan sanksi berupa denda di sektor jasa keuangan dan ketentuan pelaksanaannya.

VIII. PENYAMPAIAN PERMASALAHAN

1. Permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan Debitur dan Informasi Debitur disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi SLIK disampaikan kepada *helpdesk* OJK melalui *email*: helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran OJK ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Informasi Debitur;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/6/DPBPR tanggal 20 Februari 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 Perihal Sistem Informasi Debitur; dan

- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal Sistem Informasi Debitur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>			<Tempat>,<Tanggal>		
Kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit <Alamat>*)					
Hal: <u>Permohonan Hak Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</u>					
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami memohon untuk dapat diberikan hak akses pada SLIK. Adapun daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami adalah sebagai berikut:					
No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail/ Login ID
1					
2					
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:					
1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.					
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.					
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.					
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.					
Demikian disampaikan, agar maklum.					
Nama Pelapor Kode Pelapor					
<Tanda Tangan>					
<u>Nama Pejabat**)</u> Jabatan					
*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.					
**) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi.					

Nomor <Nomor Surat>	<Tempat>,<Tanggal>
Kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit <Alamat>*)	
<u>Hal: Pelaporan Daftar Pegawai Pelaksana dan/atau Pejabat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</u>	
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan khususnya terkait dengan kewajiban untuk melaporkan pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, bersama ini kami sampaikan daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana terlampir.	
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:	
1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan. 2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur. 3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data yang dilaporkan. 4. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada surat pelaporan ini. 5. Bertanggung jawab terhadap seluruh permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang bersangkutan. 6. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab SLIK sebagaimana dimaksud pada surat pelaporan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.	
Demikian disampaikan, agar maklum.	
Nama Pelapor Kode Pelapor	
<Tanda Tangan>	
<u>Nama Pejabat**)</u> Jabatan	

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.
**) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi.

Lampiran
Surat Nomor <diisi sama dengan Nomor Surat>

PELAPORAN DAFTAR PEGAWAI PELAKSANA DAN/ATAU PEJABAT SLIK

Berikut adalah daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sesuai dengan hak aksesnya, yaitu:

A. Administrator

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

B. Supervisor

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

C. Petugas Pelaporan

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

D. Petugas Permintaan Informasi

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

E. Petugas Pengaduan Debitur (Tanpa Hak Akses ke Aplikasi SLIK)

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

F. Petugas Pengamanan Data Informasi Debitur (Tanpa Hak Akses ke Aplikasi SLIK)						
No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif
Keterangan: Status "Aktif": bagi petugas yang masih aktif atau petugas baru di SLIK. Status "Tidak Aktif": bagi petugas yang sudah dihapus dari SLIK.						

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

A. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh LPIP

I. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

1. Kode jenis Pelapor	17. Kecamatan
2. Kode Pelapor	18. Kode Kabupaten atau Kota
3. Tahun bulan data	19. Kode pos
4. Nomor <i>Credit Information File</i> (CIF) Debitur	20. Nomor telepon
5. Jenis identitas	21. Nomor telepon seluler
6. Nomor identitas	22. Alamat <i>e-mail</i>
7. Nama sesuai identitas	23. Kode negara domisili
8. Nama lengkap	24. Kode pekerjaan
9. Kode status pendidikan/Gelar Debitur	25. Tempat bekerja
10. Jenis kelamin	26. Kode bidang usaha tempat bekerja
11. Tempat lahir	27. Alamat tempat bekerja
12. Tanggal lahir	28. Kode golongan Debitur
13. Nama gadis ibu kandung	29. Status perkawinan Debitur
14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	30. Kode kantor cabang
15. Alamat	31. Operasi data
16. Kelurahan	32. Status <i>delete</i>
	33. <i>Create date</i>
	34. <i>Update date</i>

II. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	17. Kelurahan
2. Kode Pelapor	18. Kecamatan
3. Tahun bulan data	19. Kode Kabupaten atau Kota
4. Nomor CIF Debitur	20. Kode pos
5. Nomor identitas badan usaha	21. Kode negara domisili
6. Nama badan usaha	22. Kode bidang usaha
7. Kode bentuk badan usaha	23. <i>Go public</i>
8. Tempat pendirian	24. Kode golongan Debitur
9. Nomor akta pendirian	25. Peringkat atau <i>rating</i> Debitur
10. Tanggal akta pendirian	26. Lembaga pemeringkat atau <i>rating</i>
11. Nomor akta perubahan terakhir	27. Tanggal pemeringkatan
12. Tanggal akta perubahan terakhir	28. Kode kantor cabang
13. Nomor telepon	29. Operasi data
14. Nomor telepon seluler	30. Status <i>delete</i>
15. Alamat <i>e-mail</i>	31. <i>Create date</i>
16. Alamat	32. <i>Update date</i>

III. Segmen F01 – Kredit atau Pembiayaan

1. Kode jenis Pelapor	26. Jenis suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Kredit atau pembiayaan program pemerintah
3. Tahun bulan data	28. Plafon awal
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon
5. Nomor rekening fasilitas	30. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
6. Nomor CIF Debitur	31. Denda
7. Kode sifat kredit atau pembiayaan	32. Baki debet
8. Kode jenis kredit atau pembiayaan	33. Nilai dalam mata uang asal
9. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	34. Kode kualitas kredit atau pembiayaan
10. Nomor akad awal	35. Tanggal macet
11. Tanggal akad awal	36. Kode sebab macet
12. Nomor akad akhir	37. Tunggakan pokok
13. Tanggal akad akhir	38. Tunggakan bunga atau imbalan
14. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	39. Jumlah hari tunggakan
15. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	40. Frekuensi tunggakan
16. Tanggal mulai	41. Frekuensi restrukturisasi
17. Tanggal jatuh tempo	42. Tanggal restrukturisasi awal
18. Kode kategori Debitur	43. Tanggal restrukturisasi akhir
19. Kode jenis penggunaan	44. Kode cara restrukturisasi
20. Kode orientasi penggunaan	45. Kode kondisi
21. Kode sektor ekonomi	46. Tanggal kondisi
22. Kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan	47. Keterangan
23. Nilai proyek	48. Kode kantor cabang
24. Kode valuta	49. Operasi data
25. Suku bunga atau imbalan	50. Status <i>delete</i>
	51. <i>Create date</i>
	52. <i>Update date</i>

IV. Segmen F02 – Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

1. Kode jenis Pelapor	26. Suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Jenis suku bunga atau imbalan
3. Tahun bulan data	28. Kredit atau pembiayaan program Pemerintah
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon awal
5. Nomor rekening fasilitas	30. Plafon
6. Nomor CIF Debitur	31. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
7. <i>Sequence</i> Debitur anggota <i>Joint Account</i>	32. Denda
8. Kode sifat kredit atau pembiayaan	33. Baki debet
9. Kode jenis kredit atau pembiayaan	34. Nilai dalam mata uang asal
10. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	35. Kode kualitas kredit atau pembiayaan
11. Nomor akad awal	36. Tanggal macet
12. Tanggal akad awal	37. Kode sebab macet
13. Nomor akad akhir	38. Tunggakan pokok
14. Tanggal akad akhir	39. Tunggakan bunga atau imbalan
15. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	40. Jumlah hari tunggakan
16. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	41. Frekuensi tunggakan
17. Tanggal mulai	42. Frekuensi restrukturisasi
18. Tanggal jatuh tempo	43. Tanggal restrukturisasi awal
19. Kode kategori Debitur	44. Tanggal restrukturisasi akhir
20. Kode jenis penggunaan	45. Kode cara restrukturisasi
21. Kode orientasi penggunaan	46. Kode kondisi
22. Kode sektor ekonomi	47. Tanggal kondisi
23. Kode Kabupaten atau Kota lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan	48. Keterangan
24. Nilai proyek	49. Kode kantor cabang
25. Kode valuta	50. Operasi data
	51. Status <i>delete</i>
	52. <i>Create date</i>
	53. <i>Update date</i>

V. Segmen F03 – Surat Berharga

1. Kode jenis Pelapor	18. Nilai pasar
2. Kode Pelapor	19. Nilai perolehan
3. Tahun bulan data	20. Suku bunga atau imbalan
4. Kode jenis fasilitas	21. Tunggakan
5. Nomor rekening fasilitas	22. Jumlah hari tunggakan
6. Nomor CIF Debitur	23. Kode kualitas
7. Kode jenis surat berharga	24. Tanggal macet
8. <i>Sovereign Rate</i>	25. Kode sebab macet
9. <i>Listing</i>	26. Kode kondisi
10. Peringkat surat berharga	27. Tanggal kondisi
11. Kode tujuan kepemilikan	28. Keterangan
12. Tanggal penerbitan	29. Kode kantor cabang
13. Tanggal pembelian	30. Operasi data
14. Tanggal jatuh tempo	31. Status <i>delete</i>
15. Kode valuta	32. <i>Create date</i>
16. Nominal	33. <i>Update date</i>
17. Nilai dalam mata uang asal	

VI. Segmen F04 – *Irrevocable L/C*

1. Kode jenis Pelapor	16. Kode valuta
2. Kode Pelapor	17. Plafon
3. Tahun bulan data	18. Nominal
4. Kode jenis fasilitas	19. Setoran jaminan
5. Nomor rekening fasilitas	20. Kode kualitas
6. Nomor CIF Debitur	21. Tanggal wanprestasi
7. Kode jenis L/C	22. Kode kondisi
8. Kode tujuan L/C	23. Tanggal kondisi
9. Tanggal keluar	24. Keterangan
10. Tanggal jatuh tempo	25. Kode kantor cabang
11. Nomor akad awal	26. Operasi data
12. Tanggal akad awal	27. Status <i>delete</i>
13. Nomor akad akhir	28. <i>Create date</i>
14. Tanggal akad akhir	29. <i>Update date</i>
15. Bank <i>beneficiary</i>	

VII. Segmen F05 – Garansi yang Diberikan

1. Kode Jenis Pelapor	16. Kode valuta
2. Kode Pelapor	17. Plafon
3. Tahun bulan data	18. Nominal
4. Kode jenis fasilitas	19. Setoran jaminan
5. Nomor rekening fasilitas	20. Kode kualitas
6. Nomor CIF Debitur	21. Tanggal wanprestasi
7. Kode jenis garansi	22. Kode kondisi
8. Kode tujuan garansi	23. Tanggal kondisi
9. Tanggal penerbitan	24. Keterangan
10. Tanggal jatuh tempo	25. Kode kantor cabang
11. Nomor akad awal	26. Operasi data
12. Tanggal akad awal	27. Status <i>delete</i>
13. Nomor akad akhir	28. <i>Create date</i>
14. Tanggal akad akhir	29. <i>Update date</i>
15. Nama yang dijamin	

VIII. Segmen F06 – Fasilitas Lain

1. Kode jenis Pelapor	14. Kode kualitas
2. Kode Pelapor	15. Tanggal macet
3. Tahun bulan data	16. Kode sebab macet
4. Kode jenis fasilitas	17. Tunggakan
5. Nomor rekening fasilitas	18. Jumlah hari tunggakan
6. Nomor CIF Debitur	19. Kode kondisi
7. Kode jenis fasilitas lainnya	20. Tanggal kondisi
8. Tanggal mulai	21. Keterangan
9. Tanggal jatuh tempo	22. Kode kantor cabang
10. Suku bunga atau imbalan	23. Operasi data
11. Kode valuta	24. Status <i>delete</i>
12. Nominal	25. <i>Create date</i>
13. Nilai dalam mata uang asal	26. <i>Update date</i>

IX. Segmen A01 – Agunan

1. Kode jenis Pelapor	18. Nilai agunan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Kode Pelapor	19. Nilai agunan menurut Pelapor
3. Tahun bulan data	20. Tanggal penilaian agunan menurut Pelapor
4. Kode register atau nomor agunan	21. Nilai agunan menurut penilai independen
5. Nomor rekening fasilitas	22. Nama penilai independen
6. Nomor CIF Debitur	23. Tanggal penilaian agunan menurut penilai independen
7. Kode jenis segmen fasilitas	24. Status paripasu
8. Kode status agunan	25. Persentase paripasu
9. Kode jenis agunan	26. Status kredit <i>joint account</i>
10. Peringkat agunan	27. Diasuransikan
11. Kode lembaga pemeringkat	28. Keterangan
12. Kode jenis pengikatan	29. Kode kantor cabang
13. Tanggal pengikatan	30. Operasi data
14. Nama pemilik agunan	31. Status <i>delete</i>
15. Bukti kepemilikan	32. <i>Create date</i>
16. Alamat agunan	33. <i>Update date</i>
17. Kode Kabupaten atau Kota lokasi agunan	

X. Segmen P01 – Penjamin

1. Kode jenis Pelapor	11. Kode golongan penjamin
2. Kode Pelapor	12. Alamat penjamin
3. Tahun bulan data	13. Persentase fasilitas yang dijamin
4. Nomor identitas penjamin	14. Keterangan
5. Nomor rekening fasilitas	15. Kode kantor cabang
6. Nomor CIF Debitur	16. Operasi data
7. Kode jenis segmen fasilitas	17. Status <i>delete</i>
8. Kode jenis identitas penjamin	18. <i>Create date</i>
9. Nama penjamin sesuai identitas	19. <i>Update date</i>
10. Nama lengkap penjamin	

XI. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	11. Kecamatan
2. Kode Pelapor	12. Kode Kabupaten atau Kota
3. Tahun bulan data	13. Kode jabatan
4. Nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	14. Pangsa kepemilikan
5. Nomor CIF Debitur	15. Status pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha
6. Kode jenis identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	16. Kode kantor cabang
7. Nama pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	17. Operasi data
8. Jenis kelamin	18. Status <i>delete</i>
9. Alamat	19. <i>Create date</i>
10. Kelurahan	20. <i>Update date</i>

B. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh Pihak Lain

Cakupan informasi yang dapat diminta oleh pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan nota kesepahaman antara pihak lain dengan OJK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

<No Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada^{*)}

Hal: Pelaporan Luring (Offline) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur^{**)} seharusnya kami kirimkan secara daring (*online*) sampai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan. Namun demikian dikarenakan adanya suatu hal, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur^{**)} tersebut kami sampaikan secara luring (*offline*). Adapun rincian laporan luring (*offline*) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bulan Data (bulan-tahun)	Penyebab Luring (<i>Offline</i>)	Contact Person
1	06-2017	Pemadaman Listrik karena bencana alam	Andi andi@abcd.com 021-9999999
2			
Dst.			

Adapun cara untuk mengatasi gangguan dan penjelasan mengenai kronologis penyampaian Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur^{**)}, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

Ttd

Nama Pejabat^{***)}
Jabatan

^{*)} Alamat surat ditujukan kepada:

- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
- Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

^{***)} Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi/Pimpinan Instansi atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi/pimpinan instansi.

<Diisi sama dengan nomor surat>

LAMPIRAN PENYAMPAIAN LAPORAN LURING (*OFFLINE*)

Penyebab Luring (*Offline*) <kode Pelapor>:

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Kronologis penyampaian laporan (disertai dengan bukti gangguan yang terjadi):

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I - PENJELASAN UMUM - 1 -

 A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)..... - 1 -

 B. Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK - 7 -

 C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan.. - 13 -

BAB II - PENJELASAN SEGMENT - 15 -

 A. Header Laporan - 15 -

 B. Segment D01–Debitur Perseorangan..... - 18 -

 C. Segment D02–Debitur Badan Usaha..... - 38 -

 D. Segment F01–Fasilitas Kredit atau Pembiayaan - 53 -

 E. Segment F02–Fasilitas Kredit Atau Pembiayaan *Joint Account*..... - 84 -

 F. Segment F03–Fasilitas Surat Berharga - 116 -

 G. Segment F04–Fasilitas *Irrevocable L/C* - 131 -

 H. Segment F05–Fasilitas Garansi yang Diberikan - 141 -

 I. Segment F06–Fasilitas Lain - 151 -

 J. Segment A01–Agunan - 160 -

 K. Segment P01–Penjamin - 177 -

 L. Segment M01–Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha - 184 -

 M. Segment K01–Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha - 192 -

 N. Segment S01–*Summary* Fasilitas - 203 -

BAB III - PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR..... - 221 -

 A. Informasi Debitur - 221 -

 B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur..... - 222 -

 C. Cakupan Informasi Debitur..... - 225 -

 D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur..... - 248 -

BAB IV - CONTOH PENGISIAN DATA - 249 -

 A. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Akad Kredit atau Pembiayaan..... - 249 -

 B. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Jenis Kredit atau Pembiayaan - 250 -

 C. Fasilitas *Irrevocable L/C*..... - 259 -

 D. Fasilitas Surat Berharga - 263 -

 E. Agunan Paripasu - 264 -

BAB V - DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI..... - 266 -

BAB VI - DAFTAR KODE NEGARA..... - 282 -

BAB VII - DAFTAR KODE VALUTA..... - 289 -

BAB VIII - DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA - 295 -

BAB IX - DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA - 301 -

BAB X - STRUKTUR DATA - 313 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK *Reporting*..... - 1 -

Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK Web - 2 -

Gambar 3. Tampilan Aplikasi iDeb Viewer - 2 -

Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk
Pelaporan - 3 -

Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk
Permintaan Informasi Debitur - 3 -

Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK - 4 -

Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch* - 225 -

Gambar 8. Skema *Joint Financing* - 249 -

Gambar 9. Skema *Channeling* - 250 -

Gambar 10. Skema *Executing*..... - 250 -

Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas - 251 -

Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit - 252 -

BAB I

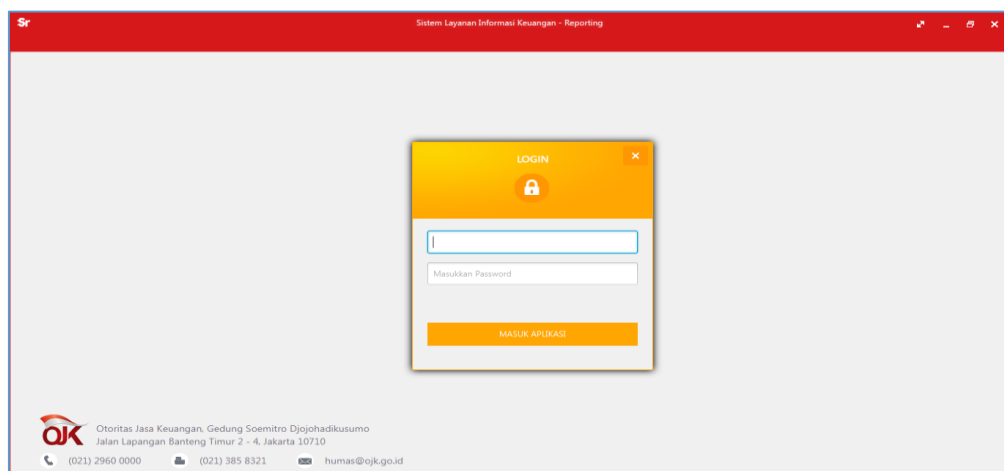
PENJELASAN UMUM

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan Informasi Debitur. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

1. Aplikasi SLIK

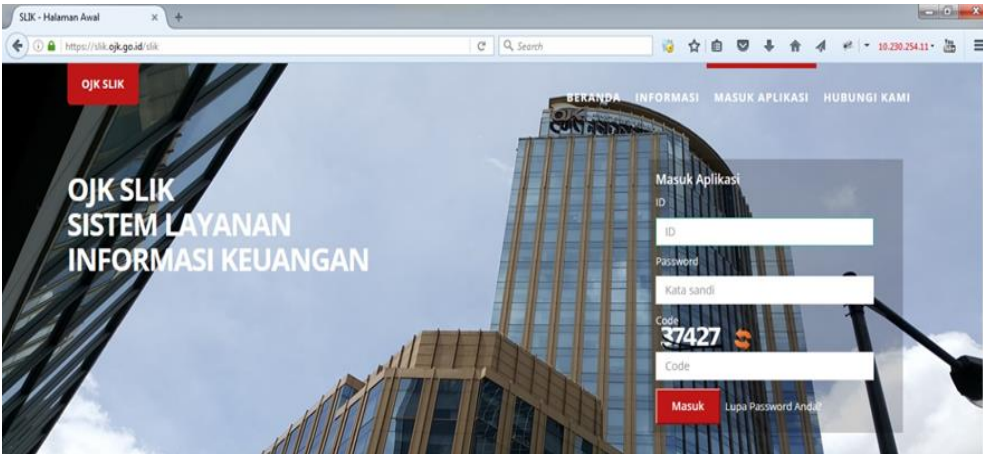
SLIK terdiri dari 3 (tiga) aplikasi yaitu aplikasi *SLIK Reporting*, aplikasi *SLIK Web*, dan aplikasi *iDeb Viewer*. Aplikasi *SLIK Reporting* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer Pelapor. Fungsi aplikasi *SLIK Reporting* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke peladen (*server*) OJK. Selain itu, pada aplikasi *SLIK Reporting* juga terdapat fungsi untuk pengiriman Laporan Debitur langsung ke peladen (*server*) OJK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi *SLIK Reporting*

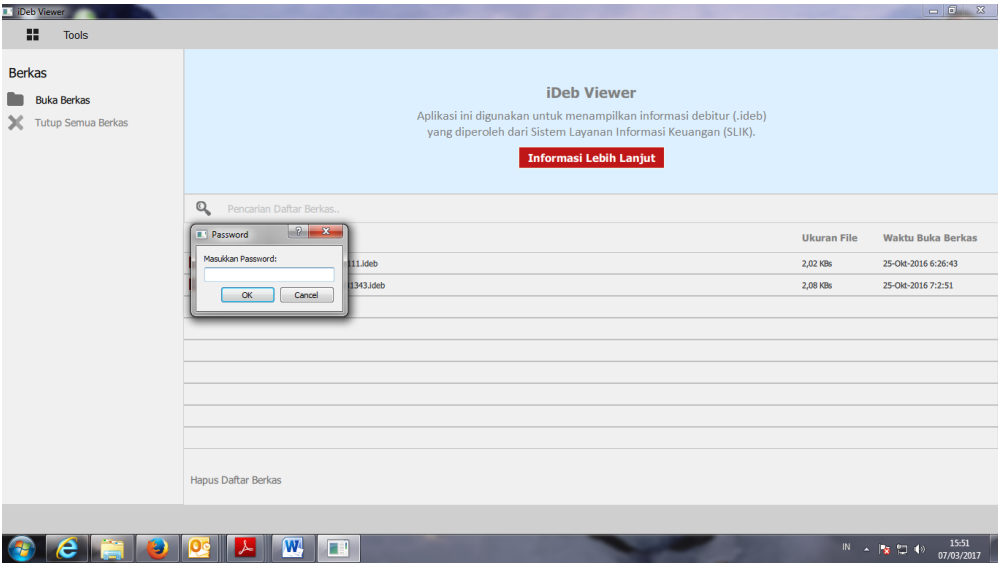
Aplikasi *SLIK Web* adalah aplikasi yang dipasang di OJK dan diakses oleh Pelapor menggunakan Web *browser* melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh OJK. Aplikasi *SLIK Web* memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) *file* Laporan

Debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan Informasi Debitur, pemantauan permintaan Informasi Debitur, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK Web

Aplikasi iDeb Viewer adalah aplikasi yang dipasang di komputer Pelapor untuk menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dari aplikasi SLIK Web.

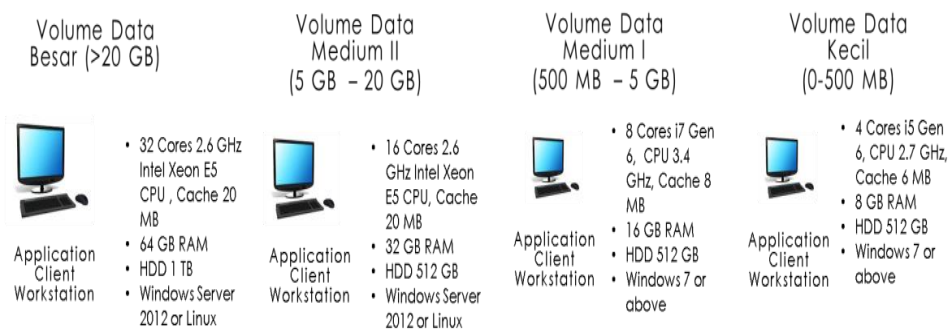


Gambar 3. Tampilan Aplikasi iDeb Viewer

2. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disediakan oleh Pelapor sesuai dengan spesifikasi paling sedikit sebagai berikut:

- a. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaporan data Debitur dibedakan berdasarkan volume data Laporan Debitur masing-masing Pelapor dengan rincian sebagai berikut:

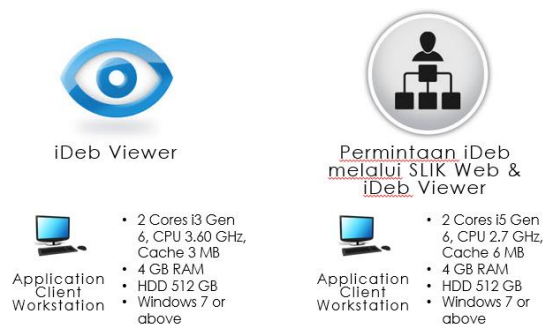


Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan

Keterangan:

- i. Seluruh sistem operasi pada perangkat keras yang digunakan oleh Pelapor adalah versi 64 bit.
- ii. Volume data dihitung berdasarkan ukuran *file text* sebelum dikompresi.

- b. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk permintaan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:



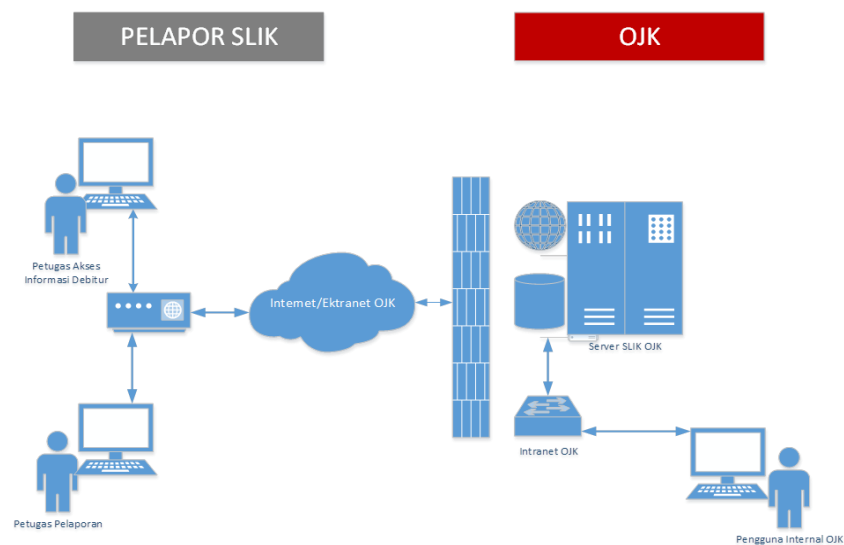
Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur

Keterangan:

Sistem operasi yang digunakan untuk permintaan Informasi Debitur dan menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dapat menggunakan versi 32 bit dan 64 bit.

3. Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK, diperlukan jaringan komunikasi data yang menghubungkan komputer atau peladen (*server*) Pelapor dengan peladen (*server*) OJK.



Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK

Spesifikasi jaringan komunikasi data yang harus disediakan oleh Pelapor adalah sebagai berikut:

Kategori Volume Data	Volume Data (<i>Raw Data</i>)	Volume Data <i>File</i> Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan <i>Upload - Uplink</i> (kbps)
Volume Data Kecil	0-50 MB	0-5 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	128
	50 MB-500 MB	5 MB-50 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	256
Volume Data Medium I	500 MB-1GB	50 MB-100 MB	Internet <i>Non-VPN,</i> <i>Leased Line</i>	512
	1 GB-5 GB	100 MB-500 MB	Internet <i>Non-VPN,</i> <i>Leased Line</i>	1.024
Volume Data Medium II	5 GB-10 GB	500 MB-1 GB	Internet <i>Non-VPN,</i> <i>Leased Line</i>	2.048

Kategori Volume Data	Volume Data (<i>Raw Data</i>)	Volume Data <i>File</i> Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan <i>Upload - Uplink</i> (kbps)
	10 GB-20 GB	1 GB-2 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	2.048
Volume Data Besar	20 GB-40 GB	2 GB-4 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	4.096
	40 GB-80 GB	4 GB-8 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	8.192
	> 80 GB	> 8 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	10.240

4. Jenis Hak Akses dan Pendaftaran Pengguna

a. Jenis Hak Akses Pengguna SLIK

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, Pelapor memerlukan *user ID* dan *password* sebagai akses pengguna ke dalam sistem. Jenis-jenis peran pengguna pada SLIK adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hak Akses	Fungsi Utama	Pengelolaan Pengguna
1	Administrator	Pengelolaan dan pemantauan aktivitas pengguna pada masing-masing Pelapor	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK Web OJK
2	Petugas Pelaporan	Validasi data dan pengiriman laporan	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK Web masing-masing Pelapor
3	Petugas Permintaan Informasi	Permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK

No	Jenis Hak Akses	Fungsi Utama	Pengelolaan Pengguna
			Web masing-masing Pelapor
4	<i>Supervisor</i>	Pemantauan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK Web masing-masing Pelapor

Jumlah setiap jenis hak akses pengguna dibatasi secara sistem oleh OJK dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

b. Pendaftaran Administrator SLIK Web

Untuk memperoleh *user ID* dan *password* Administrator SLIK Web, Pelapor menyampaikan permintaan secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK Web di Pelapor sesuai dengan tata cara dan format yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang menjadi Administrator SLIK Web adalah pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK pada internal Pelapor.

Dalam hal terjadi pergantian pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK Web, Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan melakukan pendaftaran pegawai pelaksana dan/atau pejabat Administrator SLIK Web baru sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini.

c. Pendaftaran Pengguna Selain Administrator SLIK Web

Setelah menerima *user ID* dan *password* Administrator SLIK Web, Administrator SLIK Web masing-masing Pelapor dapat membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertugas untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur, serta melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur. *User ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat

yang didaftarkan harus merupakan alamat *e-mail* aktif dari masing-masing pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan diutamakan merupakan alamat *e-mail* korporat yang diberikan oleh Pelapor kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK.

Hak akses yang diberikan kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK hanya boleh digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan pada aplikasi SLIK *Reporting* secara bersamaan pada lebih dari 1 (satu) perangkat yang terhubung secara daring (*online*) ke SLIK. Dalam hal terjadi pergantian pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, Administrator SLIK Web masing-masing Pelapor membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang baru dan menonaktifkan *user ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang lama.

B. Pelaporan Data Debitur Melalui SLIK

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara, bentuk laporan, dan media yang ditetapkan oleh OJK. Laporan Debitur dapat digunakan dalam rangka:

- i. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- ii. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
- iii. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

a. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau Koreksi Laporan Debitur

Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*), secara bulanan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan

Laporan, Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh OJK. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*), Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) sesuai dengan tata cara dan format yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini.

b. Penjelasan Umum Pelaporan

Pelapor SLIK menyusun data untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon per Debitur Rp1,00 (satu rupiah) ke atas, dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pelaporan data Debitur dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Pelapor.
- 2) Pelapor menyiapkan data pelaporan rutin dalam bentuk *text file* sebagaimana tertulis pada Referensi Struktur Data. Pelapor memproses data menggunakan aplikasi SLIK *Reporting*, dan menyampaikan hasil proses tersebut kepada OJK.
- 3) Pelapor menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung proses pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.
- 4) Pelapor menyiapkan nomor unik atau identitas tunggal untuk:
 - a) Debitur
 - i. *Credit Information File* (CIF) untuk Debitur perseorangan dan Debitur badan usaha. Penggunaan CIF harus unik dan berbeda antara satu Debitur dengan Debitur lain; dan
 - ii. nomor identitas antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Debitur perseorangan WNI, nomor paspor untuk Debitur perseorangan WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang

dapat dipersamakan dengan itu untuk Debitur badan usaha.

b) Fasilitas

- i. Nomor rekening, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kepada Debitur; dan
- ii. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

c) Agunan

Kode register agunan yaitu nomor unik yang dibentuk oleh Pelapor yang digunakan untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas Debitur.

d) Penjamin

Nomor identitas antara lain NIK untuk penjamin WNI, nomor paspor untuk penjamin WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjamin badan usaha.

e) Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nomor identitas antara lain NIK untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, nomor paspor untuk pengurus atau pemilik WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pengurus atau pemilik badan usaha.

2. Jenis Segmen dan Operasi Data

Segmen data yang disampaikan oleh Pelapor adalah Debitur Perseorangan (D01), Debitur Badan Usaha (D02), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan (F01), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account* (F02), Fasilitas Surat Berharga (F03), Fasilitas *Irrevocable Letter of Credit* (F04), Fasilitas Garansi yang Diberikan (F05), Fasilitas Lain (F06), Agunan (A01), Penjamin (P01), Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha (M01), Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha (K01), dan *Summary* Fasilitas (S01). Segmen-segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis Pelapor dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01	S01
1	Bank Umum Konvensional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Bank Umum Syariah/UUS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	BPR Konvensional	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
4	BPR Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
5	Perusahaan Pembiayaan	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
6	Perusahaan Modal Ventura	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
7	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
8	Perusahaan Pembiayaan Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
9	Perusahaan Modal Ventura Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√
10	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√

Keterangan:

- a. Setiap segmen dapat dilaporkan ke dalam lebih dari 1 (satu) *text file*.
- b. Apabila terdapat segmen yang tidak memiliki data maka segmen tersebut tetap disampaikan dengan berisi *header* laporan segmennya saja.
- c. Pelaporan per-segmen menggunakan operasi data dengan rincian sebagai berikut:

- 1) *Create* (C) adalah operasi data yang digunakan untuk data baru pada saat pertama kali dilaporkan.
- 2) *Update* (U) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.
- 3) *Delete* (D) adalah operasi data yang digunakan untuk menghapus data yang pernah dilaporkan sebelumnya.
- 4) *Not Change* (N) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang tidak mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

No	Segmen	C (<i>Create</i>)	U (<i>Update</i>)	D (<i>Delete</i>)	N (<i>Not Change</i>)
1	D01	√	√	×	√
2	D02	√	√	×	√
3	F01	√	√	×	×
4	F02	√	√	×	×
5	F03	√	√	×	×
6	F04	√	√	×	×
7	F05	√	√	×	×
8	F06	√	√	×	×
9	A01	√	√	√	√
10	P01	√	√	√	√
11	M01	√	√	×	×
12	K01	√	√	×	×
13	S01	<i>*Tidak terdapat operasi data</i>			

3. Struktur Nama *Text File*

Masing-masing *text file* hanya diperbolehkan berisi data untuk 1 (satu) segmen. Adapun struktur penamaan *text file* adalah <Kode Jenis Pelapor>.<Kode Pelapor>.<Tahun>.<Bulan>.<Kode Segmen>.<Urutan>.txt.

- a. Penamaan untuk segmen dengan 1 (satu) *text file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data April 2017 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2017.04.D01.1.txt, dan disesuaikan untuk segmen lainnya.

- b. Penamaan untuk segmen dengan lebih dari 1 (satu) *text file*.
1 (satu) segmen dapat terdiri dari beberapa *file* dengan memperhatikan urutan *file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data April 2017 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2017.04.D01.1.txt, 0101.001.2017.04.D01.2.txt, dan seterusnya sampai urutan terakhir, serta disesuaikan untuk segmen lainnya.

4. Jenis Pelaporan

- a. Pelaporan Inisial

Pelaporan inisial adalah laporan yang disampaikan sekali pada saat awal implementasi SLIK. Pelaporan inisial meliputi:

- 1) Data rutin posisi data bulan Maret 2017 untuk Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* fasilitas sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, yang terdiri dari segmen Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha, dan Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha.
- 2) Segmen *Summary* Fasilitas periode bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 untuk Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* fasilitas pada posisi tanggal 31 Maret 2017.
- 3) Untuk Debitur yang lunas di antara periode tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 maka segmen yang harus dilaporkan adalah segmen Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, dan termasuk segmen *Summary* Fasilitas periode bulan April 2016 sampai dengan posisi 1 (satu) bulan sebelum bulan pelunasan.

- b. Pelaporan Rutin

Pelaporan rutin adalah laporan yang disampaikan secara rutin setiap bulan. Segmen yang dilaporkan adalah segmen Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha, dan Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha.

C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan

Tata cara pelaporan bagi Pelapor yang melakukan penggabungan atau peleburan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor hasil penggabungan atau peleburan menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi antara lain:
 - a. nama Pelapor hasil penggabungan atau peleburan;
 - b. tanggal efektif operasional penggabungan atau peleburan;
 - c. kantor Pelapor peserta penggabungan atau peleburan yang ditutup dan yang tetap beroperasi; dan
 - d. nama pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK dari Pelapor peserta penggabungan atau peleburan yang mencakup fungsi sebagaimana tertuang dalam POJK PPID SLIK.
2. Pelapor hasil penggabungan atau peleburan mengajukan permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Surat Edaran OJK ini.
3. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan sampai dengan tanggal efektif operasional penggabungan atau peleburan dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode masing-masing Pelapor peserta penggabungan atau peleburan. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan setelah tanggal efektif operasional penggabungan atau peleburan dilakukan oleh Pelapor hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan atau peleburan tersebut.

Contoh:

Apabila operasional penggabungan atau peleburan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2018 maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk data bulan April 2018 yang disampaikan paling lambat tanggal 14 Mei 2018 dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor masing-masing peserta penggabungan

atau peleburan. Setelah tanggal tersebut penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan oleh Pelapor hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan atau peleburan tersebut. Setelah tanggal efektif operasional penggabungan atau peleburan, Pelapor hasil penggabungan atau peleburan bertanggung jawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta penggabungan atau peleburan.

BAB II
PENJELASAN SEGMENT

Berikut adalah penjelasan masing-masing segment yang terdapat dalam aplikasi SLIK yang terdiri atas:

- 1. *Header* Laporan
- 2. Segment D01 : Debitur Perseorangan
- 3. *Segment* D02 : Debitur Badan Usaha
- 4. *Segment* F01 : Kredit atau Pembiayaan
- 5. *Segment* F02 : Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*
- 6. *Segment* F03 : Surat Berharga
- 7. *Segment* F04 : *Irrevocable L/C*
- 8. *Segment* F05 : Garansi yang Diberikan
- 9. *Segment* F06 : Fasilitas Lain
- 10. *Segment* A01 : Agunan
- 11. *Segment* P01 : Penjamin
- 12. *Segment* M01 : Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
- 13. *Segment* K01 : Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha
- 14. *Segment* S01 : *Summary* Fasilitas

A. *Header* Laporan

Header adalah deskripsi tentang data yang disampaikan dalam setiap *text file* yang berisi antara lain kode jenis Pelapor, periode laporan, jenis segment, dan jumlah data. Segment yang tidak memiliki data tetap disampaikan dengan *text file* segment yang berisi *header* dengan jumlah data diisi angka 0 (nol).

- 1. *Flag Header*
Kolom ini diisi dengan huruf H.
- 2. Kode Jenis Pelapor
 - a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode jenis Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Pelapor	Kode
1	Bank Umum Konvensional	0101
2	Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah	0102
3	BPR Konvensional	0103
4	BPR Syariah	0104
5	Perusahaan Pembiayaan	0201

No	Jenis Pelapor	Kode
6	Perusahaan Modal Ventura	0202
7	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0203
8	Perusahaan Pembiayaan Syariah	0204
9	Perusahaan Modal Ventura Syariah	0205
10	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0301
11	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	0302
12	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	0909

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Jenis Pelapor	Pengisian
1	Jenis lembaga Pelapor adalah Bank Umum Konvensional	0101
2	Jenis lembaga Pelapor adalah BPR Syariah	0104
3	Pelapor adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	0301

- 3. Kode Pelapor
 - a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor sesuai dengan kode Pelapor yang terdaftar di OJK.
 - b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pelapor	Pengisian
1	Pelapor adalah Bank Umum dengan kode bank 123	123
2	Pelapor adalah BPR dengan kode bank 600123	600123
3	Pelapor adalah Perusahaan Pembiayaan dengan kode perusahaan 256123	256123

- 4. Tahun
 - a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit tahun bulan data laporan.
 - b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - c. Contoh pengisian data:

No	Bulan Data Laporan	Pengisian
1	Januari 2017	2017
2	September 2016	2016

5. Bulan

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit bulan data laporan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Bulan Data Laporan	Pengisian
1	Januari 2017	01
2	September 2016	09
3	November 2014	11

6. Kode Jenis atau Segmen Data

- Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis atau segmen data sesuai referensi sebagai berikut:

No	Jenis atau Segmen Data	Kode
1	Debitur Perseorangan	D01
2	Debitur Badan Usaha	D02
3	Kredit atau Pembiayaan	F01
4	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
5	Surat Berharga	F03
6	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
7	Garansi yang Diberikan	F01
8	Fasilitas Lain	F06
9	Agunan	A01
10	Penjamin	P01
11	Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	M01
12	Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha	K01
13	<i>Summary</i> Fasilitas	S01

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Segmen Data	Pengisian
1	Debitur Perorangan	D01

No	Segmen Data	Pengisian
2	Fasilitas Kredit	F01

7. Jumlah Data *File*

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah data yang dilaporkan dalam 1 (satu) *file* yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Data	Pengisian
1	1.000 <i>record</i>	1000
2	1 <i>record</i>	1
3	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	500000

8. Jumlah Data Segmen

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh data dalam 1 (satu) segmen yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Data	Pengisian
1	1.000.000 <i>record</i> per-segmen	1000000
2	0 <i>record</i> per segmen	0
3	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	1000000

B. Segmen D01–Debitur Perseorangan

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur perseorangan. Debitur yang dilaporkan di segmen ini adalah seluruh Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* atau baki debet. Segmen D01 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

- 1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
- 2. Nomor CIF Debitur
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
 - b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.

- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Jenis Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Debitur adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Debitur adalah WNA (menggunakan paspor)	2

4. Nomor Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Dokumen identitas bagi Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No	Debitur	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

- c. Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A123456789”	A123456789
3	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A-1234.56”	A123456
4	Debitur adalah WNI, memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”, dan memiliki Paspor dengan nomor “123456789”	1234567891234567

5. Nama Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama Debitur sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama “R. Agung Wiyono” (“R” bukan merupakan gelar kebangsawanan)	R. Agung Wiyono

No	Nama Debitur	Pengisian
4	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar)	Arif M.N. Anshori

6. Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)
- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap Debitur.
 - b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan, maka Pelapor meminta informasi kepada Debitur mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
 - c. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
 - d. Kolom ini bersifat opsional.
 - e. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah “Noor”)	Arif Muhammad Noor Anshori

7. Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur
- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
1	Tanpa Gelar	00
2	Diploma 1	01
3	Diploma 2	02
4	Diploma 3	03
5	S-1	04
6	S-2	05

No	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
7	S-3	06
8	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Pendidikan	Pengisian
1	Pendidikan Debitur S-1	04
2	Pendidikan Debitur SMP/setingkat	00
3	Pendidikan Debitur SMA/setingkat	00

8. Jenis Kelamin

- a. Kolom ini diisi “L” untuk Debitur laki-laki, dan diisi “P” untuk Debitur perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Kelamin	Pengisian
1	Pria/Laki-laki	L
2	Wanita/Perempuan	P

9. Tempat Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tempat kelahiran Debitur sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tempat Lahir	Pengisian
1	Debitur lahir di kota “Magelang”	Magelang
2	Debitur lahir di kabupaten “Demak”	Demak
3	Debitur lahir di kota “New York”	New York

10. Tanggal Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal kelahiran Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.

- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Kolom ini diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Jika NPWP mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami jika tidak terdapat pemisahan harta. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri.
- d. Kewajiban pelaporan NPWP Debitur perseorangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemilikan NPWP bagi wajib pajak.
- e. Kolom ini bersifat opsional.
- f. Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3	Debitur belum wajib memiliki NPWP	kolom dikosongkan

12. Alamat

- a. Untuk Debitur WNI yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b. Untuk Debitur WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah

Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

- c. Untuk Debitur WNI dan WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili Debitur di negara yang bersangkutan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Alamat Debitur	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

13. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

14. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Prambanan	Prambanan

15. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) *digit* kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Kode Pos

- a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	10120
2	Lemah Abang	41383
3	Gambir	10110

17. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1	(021) 12345678	02112345678
2	(62-751) 4257712	07514257712
3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

18. Nomor Telepon Seluler

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- d. Kolom ini bersifat opsional.
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1	+6181324324434	6181324324434
2	08123456789	08123456789
3	066176544	066176544

19. Alamat *E-mail*

- a. Kolom ini diisi dengan alamat *e-mail* Debitur.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Alamat Email	Pengisian
1	arif.ansori.27@gmail.com	arif.ansori.27@gmail.com
2	Debitur tidak memiliki alamat <i>e-mail</i>	kolom dikosongkan

20. Kode Negara Domisili

- a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

21. Kode Pekerjaan

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode pekerjaan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Kode
1	<i>Accounting/finance officer</i>	001
2	<i>Customer service</i>	002
3	<i>Engineering</i>	003
4	Eksekutif	004
5	Administrasi umum	005
6	Teknologi informasi	006
7	Konsultan/Analisis	007
8	<i>Marketing</i>	008
9	Pengajar (Guru, Dosen)	009
10	Militer	010
11	Pensiunan	011
12	Pelajar/Mahasiswa	012
13	Wiraswasta	013
14	Polisi	014
15	Petani	015
16	Nelayan	016
17	Peternak	017
18	Dokter	018
19	Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya)	019
20	Hukum (Pengacara, Notaris)	020
21	Perhotelan & restoran (Koki, <i>Bartender</i> , dan sebagainya)	021
22	Peneliti	022
23	Desainer	023
24	Arsitek	024
25	Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya)	025
26	Pengamanan	026
27	Pialang/ <i>Broker</i>	027
28	Distributor	028
29	Transportasi udara (pilot, pramugari)	029
30	Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal)	030
31	Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur)	031
32	Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani)	032

No	Pekerjaan	Kode
33	Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain)	033
34	Ibu rumah tangga	034
35	Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll)	035
36	Pejabat negara/penyelenggara negara	036
37	Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/penyelenggara negara)	037
38	Lain-lain	099

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan Debitur	Pengisian
1	Wiraswasta	013
2	Dokter	018
3	Ibu Rumah Tangga	034

22. Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan nama perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
- b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini diisi “NA”.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No	Nama Tempat Bekerja	Pengisian
1	Debitur bekerja di “PT ABCD”	PT ABCD
2	Debitur bekerja di “Kementerian Keuangan”	Kementerian Keuangan
3	Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu	NA

23. Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) *digit* kode sektor ekonomi bidang usaha dari perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bidang Usaha Tempat Bekerja	Pengisian
1	Sektor perkebunan tembakau	011140
2	Sektor pertanian padi	011110
3	Sektor jasa perikanan	055000

24. Alamat Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan alamat perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
- b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini dikosongkan.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Alamat Tempat Bekerja	Pengisian
1	PT ABCD Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat	Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat
2	PT DEFG Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya	Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya
3	Debitur tidak bekerja pada perusahaan/lembaga tertentu	kolom dikosongkan

25. Penghasilan Kotor Per-Tahun

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan kotor Debitur per-tahun dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- c. Contoh pengisian data:

No	Penghasilan	Pengisian
1	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp250.000.000,00	250000000

No	Penghasilan	Pengisian
2	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp120.000.000,00	120000000
3	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

26. Kode Sumber Penghasilan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode sumber penghasilan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No	Sumber Penghasilan	Kode
1	Gaji	1
2	Usaha	2
3	Lainnya	3

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- c. Jika Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan maka kolom ini diisi dengan sumber penghasilan yang paling dominan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Penghasilan	Pengisian
1	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari gaji	1
2	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari usaha	2
3	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

27. Jumlah Tanggungan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah orang yang menjadi tanggungan Debitur.
- b. Kriteria tanggungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.

- d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- e. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Tanggungan	Pengisian
1	Debitur memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak	4
2	Debitur tidak memiliki tanggungan	0
3	Debitur lama yang jumlah tanggungannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

28. Kode Hubungan dengan Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Pelapor	0110
2	Perusahaan atau badan dimana Pelapor bertindak sebagai pengendali (<i>subsidiary</i>)	0120
3	Pengendali lain dari anak perusahaan (<i>subsidiary</i>) Pelapor	0130
4	Perusahaan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (kode 0110) bertindak sebagai pengendali	0140
5	Perusahaan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (kode 0130) bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Pelapor dan/atau keluarga pengurus Pelapor	0210
7	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, dan 0150)	0220
8	Perusahaan dengan pengurus yang merupakan pengurus Pelapor	0230

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
9	Perusahaan dengan pengurus yang merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, dan 0150)	0240
10	Perusahaan dengan pengurus Pelapor yang bertindak sebagai pengendali	0250
11	Perusahaan dengan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, dan 0150) yang bertindak sebagai pengendali	0260
12	Ketergantungan keuangan (<i>financial dependence</i>)	0310
13	Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 11 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0210, 0220, 0230, 0240, 0250, dan 0260) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kolektif	0320
14	Penjaminan	0330
15	Tidak terkait dengan Pelapor	9900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1	Debitur adalah pengendali dan/atau keluarga pengendali Pelapor	0110
2	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	9900
3	Debitur adalah keluarga pengurus Pelapor	0210

29. Kode Golongan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) *digit* kode golongan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Golongan Debitur	Kode
1	Perseorangan (Penduduk)	9000
2	Perseorangan (Bukan Penduduk)	9700

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Golongan Debitur	Pengisian
1	Debitur adalah penduduk	9000
2	Debitur bukan penduduk	9700

30. Status Perkawinan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) *digit* kode status perkawinan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Perkawinan	Kode
1	Kawin	1
2	Belum Kawin	2
3	Cerai	3

- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Perkawinan Debitur	Pengisian
1	Status perkawinan Debitur “Kawin”	1
2	Status perkawinan Debitur “Belum Kawin”	2
3	Status perkawinan Debitur “Cerai”	3

31. Nomor Identitas Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas suami/istri Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- b. Dokumen identitas bagi suami/istri Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No	Kewarganegaraan	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	WNI	KTP	NIK
2	WNA	Paspor	Nomor paspor

- c. Jika nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- e. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas Pasangan	Pengisian
1	Pasangan Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Pasangan Debitur adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor “A123456789”	A123456789
3	Debitur lama yang nomor identitas pasangan tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

32. Nama Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Pasangan Debitur	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama pasangan Debitur “Siti Aminah, SE” (“SE” adalah gelar pendidikan)	Siti Aminah

No	Nama Pasangan Debitur	Pengisian
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Debitur lama yang nama pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

33. Tanggal Lahir Pasangan

- Kolom ini diisi dengan tanggal lahir suami/istri Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas suami/istri Debitur.
- Format penulisan adalah 4 (empat) *digit* tahun, 2 (dua) *digit* bulan, dan 2 (dua) *digit* tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan, kredit atau pembiayaan tanpa agunan dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425
4	Debitur lama yang tanggal lahir pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

34. Perjanjian Pisah Harta

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode perjanjian pisah harta sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Perjanjian Pisah Harta	Kode
1	Terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri.	Y

No	Perjanjian Pisah Harta	Kode
2	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri.	T

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan, kredit atau pembiayaan tanpa agunan dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No	Perjanjian Pisah Harta	Pengisian
1	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri Debitur	T
2	Debitur lama yang perjanjian pisah harta dengan pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

35. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)/Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

36. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

37. Nama Gadis Ibu Kandung

- a. Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung Debitur.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Nama Gadis Ibu Kandung	Pengisian
1	Nama ibu kandung Debitur adalah “Dewi Sri”	Dewi Sri
2	Nama ibu kandung Debitur adalah “Hj. Maimunah”	Maimunah
3	Nama ibu kandung Debitur adalah “Clara A.R.”	Clara A.R.

38. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

39. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data Debitur baru	C
2	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

C. Segmen D02–Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur badan usaha. Pelaporan segmen D02 menyertakan segmen M01 yang merupakan informasi pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dari segmen D02. Dalam menyusun segmen D02, Pelapor memelihara nomor CIF yang berada pada masing-masing Pelapor dan nomor identitas yang valid dari Debitur tersebut. Segmen D02 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor CIF Debitur
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
 - b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.

- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Nomor Identitas Badan Usaha

- a. Untuk Debitur Badan Usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Untuk Debitur badan usaha asing yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan *Tax ID* yang berlaku di negara kedudukan Debitur badan usaha asing tersebut.
- c. Jika NPWP atau *Tax ID* mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Pengisian nomor identitas badan publik adalah sebagai berikut:

No	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Badan publik memiliki NPWP	• Diisi dengan NPWP.
2	Badan publik tidak memiliki NPWP	• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. • Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut.

No	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
		• Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah.

f. Contoh pengisian data:

No	NPWP/ Tax ID/ sejenisnya	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3	AB.435.185.4125	AB4351854125

4. Nama Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nama badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.
- b. Kolom ini diisi tanpa mencantumkan bentuk badan usaha.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Nama Debitur adalah “PT Makmur”	Makmur
2	Nama Debitur adalah “CV Makmur”	Makmur
3	Nama Debitur adalah “Koperasi Makmur”	Makmur

5. Kode Bentuk Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode bentuk badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Bentuk Badan Usaha	Kode
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	01
2	<i>Commanditer Venotschap</i> (CV)	02
3	Debitur Kelompok	03
4	Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	04
5	Firma	05
6	Gabungan Koperasi	06
7	Induk Koperasi	07
8	Koperasi	08

No	Bentuk Badan Usaha	Kode
9	Koperasi Unit Desa	09
10	<i>Limited</i>	10
11	Maskapai Andil Indonesia	11
12	<i>Naamloze Vennootschaap</i>	12
13	Perusahaan Daerah	13
14	Persero	14
15	Persekutuan Perdata	15
16	Perusahaan Umum	16
17	Primer Koperasi	17
18	Perseroan Terbatas	18
19	Pusat Koperasi	19
20	Pusat Koperasi Unit Desa	20
21	Usaha Dagang	21
22	Unit Dagang Kredit Pedesaan	22
23	Yayasan	23
24	Perusahaan Perseroan Daerah	24
25	Perusahaan Umum Daerah	25
26	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Debitur	Pengisian
1	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Perseroan Terbatas”	18
2	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Perusahaan Daerah”	13
3	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Yayasan”	23

6. Tempat Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tempat pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tempat Pendirian	Pengisian
1	Tempat pendirian di kota “Jakarta Barat”	Jakarta Barat
2	Tempat pendirian di kabupaten “Tapanuli Selatan”	Tapanuli Selatan
3	Tempat pendirian di kota “Semarang”	Semarang

7. Nomor Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1	Nomor akta pendirian adalah “1234”	1234
2	Nomor akta pendirian adalah “7A”	7A
3	Nomor akta pendirian adalah “09”	09

8. Tanggal Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

9. Nomor Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan usaha (akta perubahan).
- b. Jika tidak ada akta perubahan badan usaha maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	Nomor akta perubahan terakhir adalah “1235”	1235
2	Nomor akta pendirian adalah “1234” dan belum ada akta perubahan	1234
3	Nomor akta perubahan terakhir adalah “007”	007

10. Tanggal Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta terakhir badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

11. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon	Pengisian
1	(021) 12345678	02112345678
2	(72-751) 4257712	727514257712
3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

12. Nomor Telepon Seluler

- Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur (Nomor HP).
- Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1	+6181324324434	6181324324434
2	08123456789	08123456789

13. Alamat *E-mail*

- Kolom ini diisi dengan alamat *e-mail* Debitur.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Alamat <i>E-mail</i>	Pengisian
1	corp.secretary@jaya.co.id	corp.secretary@jaya.co.id
2	Debitur tidak memiliki alamat <i>e-mail</i>	kolom dikosongkan

14. Alamat

- Kolom ini diisi dengan alamat Debitur badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Alamat	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

15. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

16. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Mustika Jaya	Mustika Jaya

17. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota alamat Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Kab. Kuningan	0117

18. Kode Pos

- a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	10120
2	Lemah Abang	41383
3	Gambir	10110

19. Kode Negara Domisili

- a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada Referensi Kode Negara.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

20. Kode Bidang Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Bidang Usaha Tempat Bekerja Debitur	Pengisian
1	Sektor Perkebunan Tembakau	011140
2	Sektor Pertanian Padi	011110
3	Sektor Jasa Perikanan	055000

21. Kode Hubungan dengan Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Pelapor	0110
2	Perusahaan atau badan dimana Pelapor bertindak sebagai pengendali (<i>subsidiary</i>)	0120
3	Pengendali lain dari anak perusahaan (<i>subsidiary</i>) Pelapor	0130
4	Perusahaan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (kode 0110) bertindak sebagai pengendali	0140
5	Perusahaan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (kode 0130) bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Pelapor dan/atau keluarga pengurus Pelapor	0210
7	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, dan 0150)	0220
8	Perusahaan dengan pengurus yang merupakan pengurus Pelapor	0230
9	Perusahaan dengan pengurus yang merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, dan 0150)	0240
10	Perusahaan dengan pengurus Pelapor yang bertindak sebagai pengendali	0250
11	Perusahaan dengan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 (kode 0110, 0120,	0260

No	Hubungan dengan Pelapor	Kode
	0130, 0140, dan 0150) yang bertindak sebagai pengendali	
12	Ketergantungan keuangan (<i>financial dependence</i>)	0310
13	Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 11 (kode 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0210, 0220, 0230, 0240, 0250, dan 0260) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kolektif.	0320
14	Penjaminan	0330
15	Tidak terkait dengan Pelapor	9900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1	Debitur adalah anak usaha yang dikendalikan oleh Pelapor	0120
2	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	9900
3	Debitur adalah perusahaan dengan pengurus dari Pelapor yang bertindak sebagai pengendali	0250

22. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

23. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Pada saat awal pemberian kredit kepada Debitur tidak terdapat pelanggaran BMPK, namun dalam perjalanan waktu terjadi penurunan permodalan bank/BPR sehingga pemberian kredit tersebut melampaui BMPK	Y
2	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

24. *Go Public*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *Go Public* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status <i>Go Public</i>	Kode
1	<i>Go Public</i>	Y
2	Tidak <i>Go Public</i>	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1	Debitur adalah perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	Y
2	Debitur bukan merupakan perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	T

25. Kode Golongan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode golongan debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode golongan pihak ketiga kecuali kode 9000 dan 9700.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Golongan Debitur	Pengisian
1	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	8111
2	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	7173
3	Debitur adalah perusahaan tekstil asing	8613

26. Peringkat atau *Rating* Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat atau *rating* terakhir Debitur yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Rating</i> Debitur	Pengisian
1	Rating Debitur “AAA”	AAA
2	Rating Debitur “B1”	B1
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

27. Lembaga Pemeringkat atau *Rating*

- a. Kolom ini diisi dengan dengan 2 (dua) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeringkat	Kode
1	Moody's	10
2	Standard And Poor's	11
3	Fitch Rating	12
4	Pefindo	13
5	Icra Indonesia	14
6	Fitch Indonesia	15
7	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1	Standard and Poor's	11
2	Moody's	10
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

28. Tanggal Pemeringkatan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pemeringkat terakhir Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pemeringkatan	Pengisian
1	Pemeringkatan tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Pemeringkatan tanggal 3 April 2016	20160403
3	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

29. Nama Grup Usaha Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nama grup usaha Debitur.

- b. Jika Debitur tergabung dalam lebih dari 1 (satu) grup usaha maka seluruh grup tersebut diisi dan dipisahkan dengan karakter “/”.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Grup Debitur	Pengisian
1	Debitur tergabung dalam grup usaha “AAA”	AAA
2	Debitur tergabung dalam 2 (dua) grup usaha yaitu “AAA” dan “BBB”	AAA/BBB
3	Debitur tidak masuk dalam grup usaha tertentu	kolom dikosongkan

30. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang dimana Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

31. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data Debitur baru	C
2	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

D. Segmen F01–Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Segmen ini berisi informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Debitur. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.	1
2	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (<i>factoring</i>).	2
3	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat yunior).	3

4	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas.	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1, 2, atau 3.	9

5. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
Dengan Akad atau Perjanjian		
1	Kredit atau Pembiayaan yang Diberikan	05
2	Kredit atau Pembiayaan untuk Pembiayaan Bersama (Sindikasi) Kredit atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lain dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing anggota sindikasi.	10
3	Kredit atau Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Melalui Lembaga Lain Secara <i>Channeling</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang dananya disalurkan melalui pihak lain. Atas penyaluran kredit atau	20

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	
4	Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM melalui Lembaga Lain secara <i>Executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko jika Debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.	26
5	Kredit atau Pembiayaan kepada Non-UMKM melalui Lembaga Lain secara <i>Executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko jika Debitur wanprestasi.	27
6	Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	30
Tanpa Akad atau Perjanjian		
7	Surat Berharga dengan <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA) Pemberian kredit atau pembiayaan yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	45
8	Giro Bersaldo Debet	80
9	Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	85
10	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan	30
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan	05

6. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	00
2	<i>Murabahah</i> Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.	01
3	<i>Istishna'</i> Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	02
4	<i>Salam</i> Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.	03
5	<i>Qardh</i> Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.	04
6	<i>Mudharabah</i> Penanaman dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (<i>profit and loss sharing</i>) atau metode bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) antara kedua	05

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.	
7	<i>Musyarakah</i> Penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.	06
8	<i>Ijarah</i> Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.	07
9	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad <i>mudharabah</i> yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>).	08
10	<i>Ijarah Muntahiya Bitamlik</i> Akad <i>ijarah</i> dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	09
11	<i>Rahn</i>	10
12	Skema atau Akad Syariah Lain	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit konvensional	00
2	Piutang <i>Murabahah</i>	01

- 7. Nomor Akad Awal
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2014”	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

8. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit	kolom dikosongkan

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
	atau pembiayaan tanpa perjanjian	

9. Nomor Akad Akhir

- Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2014”	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

10. Tanggal Akad Akhir

- Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.

- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- f. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

11. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan “0”.
- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

12. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.

- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

13. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

15. Kode Kategori Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kategori Debitur	Kode
1	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	10
2	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	20
3	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha menengah dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang	30

No	Kategori Debitur	Kode
	diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	
4	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	40
5	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	50
6	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya- Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha menengah dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	60
7	Debitur UMKM- UMKM Lainnya-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	70
8	Debitur UMKM-UMKM Lainnya-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	80

No	Kategori Debitur	Kode
9	Debitur UMKM-UMKM Lainnya–Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	90
10	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	99

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan mikro kepada UMK dengan jaminan bersyarat dan penjamin tertentu (contoh skema Kredit Usaha Rakyat/KUR).	10
2	Kredit atau pembiayaan mikro kepada UMK tanpa jaminan bersyarat maupun penjamin tertentu.	70

16. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Kode
1	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur.	1
2	Investasi Kredit atau pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain	2

No	Jenis Penggunaan	Kode
	guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.	
3	Konsumsi Kredit atau pembiayaan untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Penggunaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2	Kredit atau pembiayaan untuk pembelian sepeda motor	3

17. Kode Orientasi Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Orientasi Penggunaan	Kode
1	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

No	Orientasi Penggunaan	Kode
3	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

18. Kode Sektor Ekonomi

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sektor Ekonomi	Pengisian
1	Sektor Perkebunan Tembakau	011140
2	Sektor Pertanian Padi	011110
3	Sektor Jasa Perikanan	055000

19. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan dan giro bersaldo debit.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Kota Sabang	3292

20. Nilai Proyek

- Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
- Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Proyek	Pengisian
1	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

21. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

22. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	10
3	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

23. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3	Margin	3
4	Bagi Hasil	4
5	<i>Ujroh</i>	5
6	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	3

24. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

a. Kolom ini diisi dengan referensi sebagai berikut:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan Bukan Program Pemerintah	001
2	Kredit Usaha Rakyat atau KUR Syariah	002
3	Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi	003
4	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	900

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	002
2	Kredit atau Pembiayaan bukan program pemerintah	001

25. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
- c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.

- d. Contoh pengisian data:

No	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan

26. Sumber Dana

- Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau Kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

27. Plafon Awal

- Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

28. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, pada saat awal pembiayaan kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka). Untuk pelaporan bulan-bulan berikutnya, nilai kolom ini menurun sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000

29. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

30. Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Denda	Pengisian
1	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur.	0

31. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan saldo harga pokok Pelapor.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Baki Debet	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debit adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (<i>full payment</i>).	0

32. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- Kolom ini diisi dengan nominal baki debit dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- Tunggakan pokok, tunggakan bunga atau imbalan, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

33. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3

4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

34. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

35. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

36. Tunggakan Pokok

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Pokok	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

37. Tunggakan Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan “0”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

38. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).

d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

39. Frekuensi Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2	Tidak ada tunggakan.	0

40. Frekuensi Restrukturisasi

- Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

41. Tanggal Restrukturisasi Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah .
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

42. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.

e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Kode Cara Restrukturisasi

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Cara Restrukturisasi	Kode
1	Penurunan suku bunga kredit	01
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5	Penambahan fasilitas kredit	05
6	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12	Penjadwalan kembali (Syariah)	12
13	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15

No	Cara Restrukturisasi	Kode
16	Perubahan nisbah dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Syariah)	16
17	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Syariah)	17
18	Pemberian potongan (Syariah)	18
19	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20
21	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1	Fasilitas kredit yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03

No	Kondisi	Kode
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13
15	Berhenti dari Keanggotaan Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	14

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

45. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain “00”. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi “00”.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

46. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

47. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

48. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	Create	C
2	Update	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2	Update data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

E. Segmen F02–Fasilitas Kredit Atau Pembiayaan *Joint Account*

Segmen ini berisi tentang informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Debitur menggunakan nomor rekening yang sama. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account* harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. *Sequence* Debitur Anggota *Joint Account*

- a. Kolom ini diisi dengan *sequence* (nomor urut) Debitur anggota *joint account*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Sequence</i> Debitur	Pengisian
1	Debitur pertama anggota <i>joint account</i>	1
2	Debitur kedua anggota <i>joint account</i>	2

5. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.	1
2	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (<i>factoring</i>).	2
3	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat yunior).	3
4	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas.	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1,2, atau 3.	9

6. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan
- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
Dengan Akad atau Perjanjian		
1	Kredit atau Pembiayaan yang Diberikan	05
2	Kredit atau Pembiayaan untuk Pembiayaan Bersama (Sindikasi) Kredit atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lain dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing anggota sindikasi.	10
3	Kredit atau Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Melalui Lembaga Lain Secara <i>Channeling</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang dananya disalurkan melalui pihak lain. Atas penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	20
4	Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM melalui Lembaga Lain secara <i>Executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko jika Debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.	26
5	Kredit atau Pembiayaan kepada Non-UMKM melalui Lembaga Lain secara <i>Executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko jika	27

No	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	Debitur wanprestasi.	
6	Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	30
Tanpa Akad atau Perjanjian		
7	Surat Berharga dengan <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA) Pemberian kredit atau pembiayaan yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	45
8	Giro Bersaldo Debet	80
9	Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	85
10	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan	30
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan	05

7. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	00
2	<i>Murabahah</i> Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.	01

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
3	<i>Istishna'</i> Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	02
4	<i>Salam</i> Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.	03
5	<i>Qardh</i> Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.	04
6	<i>Mudharabah</i> Penanaman dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (<i>profit and loss sharing</i>) atau metode bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.	05
7	<i>Musyarakah</i> Penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.	06
8	<i>Ijarah</i> Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa	07

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.	
9	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad <i>mudharabah</i> yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>).	08
10	<i>Ijarah Muntahiya Bitamlik</i> Akad <i>ijarah</i> dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	09
11	<i>Rahn</i>	10
12	Skema atau Akad Syariah Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit konvensional	00
2	Piutang <i>Murabahah</i>	01

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2014”	10/AB/01.2014

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

9. Tanggal Akad Awal

- Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

10. Nomor Akad Akhir

- Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.

e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2014”	10/AB/01.2014
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

11. Tanggal Akad Akhir

- Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan dapat dikosongkan.
- Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218
3	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian	kolom dikosongkan

12. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan “0”.
- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

13. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

15. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

16. Kode Kategori Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kategori Debitur	Kode
1	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	10
2	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	20
3	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Tertentu-Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha menengah dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN.	30
4	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	40

No	Kategori Debitur	Kode
5	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	50
6	Debitur UMKM-Dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit atau Pembiayaan-Penjamin Lainnya- Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha menengah dengan penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus bukan BUMN.	60
7	Debitur UMKM- UMKM Lainnya-Mikro Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	70
8	Debitur UMKM-UMKM Lainnya-Kecil Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	80
9	Debitur UMKM-UMKM Lainnya-Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro tanpa penjaminan atau asuransi kredit atau pembiayaan.	90
10	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	99

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan mikro kepada UMK dengan jaminan bersyarat dan penjamin tertentu (contoh skema Kredit Usaha Rakyat/KUR).	10
2	Kredit atau pembiayaan mikro kepada UMK tanpa jaminan bersyarat maupun penjamin tertentu.	70

17. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Kode
1	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur.	1
2	Investasi Kredit atau pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.	2
3	Konsumsi Kredit atau pembiayaan untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Kategori Debitur	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2	Kredit atau pembiayaan untuk pembelian sepeda motor	3

18. Kode Orientasi Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Orientasi Penggunaan	Kode
1	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2
3	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

19. Kode Sektor Ekonomi

- Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Sektor Ekonomi	Pengisian
1	Sektor Perkebunan Tembakau	011140
2	Sektor Pertanian Padi	011110
3	Sektor Jasa Perikanan	055000

20. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan dan giro bersaldo debit.

- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Kota Sabang	3292

21. Nilai Proyek

- a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Proyek	Pengisian
1	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

22. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

23. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	10
3	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

24. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3	Margin	3
4	Bagi Hasil	4
5	<i>Ujroh</i>	5
6	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2	Piutang <i>murabahah</i> dengan margin 10%	3

25. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

- a. Kolom ini diisi dengan referensi sebagai berikut:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan Bukan Program Pemerintah	001
2	Kredit Usaha Rakyat atau KUR Syariah	002

3	Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi	003
4	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	002
2	Kredit atau Pembiayaan bukan program pemerintah	001

26. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
- c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan

27. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau Kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

28. Plafon Awal

- Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

29. Plafon

- Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, pada saat awal pembiayaan kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka). Untuk pelaporan bulan-bulan berikutnya, nilai kolom ini menurun sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran.
- Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.

- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000

30. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

31. Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Denda	Pengisian
1	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

32. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan saldo harga pokok Pelapor.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Baki Debet	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (<i>full payment</i>)	0

33. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debet pada	5000

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
	posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	
2	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

34. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

35. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

36. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

37. Tunggalan Pokok

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggalan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggalan pokok maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggalan Pokok	Pengisian
1	Besarnya tunggalan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggalan pokok	0

38. Tunggalan Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggalan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggalan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan “0”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

39. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2	Tidak ada tunggakan	0

41. Frekuensi Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

42. Tanggal Restrukturisasi Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.

- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Cara Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Cara Restrukturisasi	Kode
1	Penurunan suku bunga kredit	01
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5	Penambahan fasilitas kredit	05
6	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08

No	Cara Restrukturisasi	Kode
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16	Perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18	Pemberian potongan (Syariah)	18
19	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20
21	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- c. Contoh pengisian data:

No	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

45. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13
15	Berhenti dari Keanggotaan Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	14

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

46. Tanggal Kondisi

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain “00”. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi “00”.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

47. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

48. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

49. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

F. Segmen F03–Fasilitas Surat Berharga

Segmen ini merupakan pelaporan surat berharga yang dimiliki oleh Pelapor dalam mata uang Rupiah atau valuta asing. Pada prinsipnya, setiap fasilitas surat berharga harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas surat berharga atau nomor surat berharga.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Surat Berharga

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Surat Berharga	Kode
1	Sertifikat Bank Indonesia Surat Berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang.	042
2	Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto atau surat berharga negara syariah yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.	043
3	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	044
4	Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> AntarBank (SIMA) Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.	045
5	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Dalam Valuta Asing	048

No	Jenis Surat Berharga	Kode
6	Promes Surat sanggup atau janji tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan kepada pihak ketiga atau penggantinya	051
7	Wesel Ekspor	055
8	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Wesel dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank Pelapor dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.	057
9	Wesel lainnya Wesel yang dimiliki oleh bank Pelapor selain wesel ekspor dan SKBDN. Dalam pengertian ini, sebagai tertarik atau yang mempunyai kewajiban kepada bank Pelapor adalah golongan pihak ketiga yang bukan bank.	059
10	<i>Commercial Papers (CP)</i>	060
11	<i>Medium Term Notes (MTN)/Medium Term Notes (MTN) Syariah</i> Surat berharga pasar uang yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 sampai dengan 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan atau surat berharga pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 sampai dengan 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan imbalan pada waktu yang telah ditentukan.	061

No	Jenis Surat Berharga	Kode
12	<i>Floating Rate Notes</i> (FRN) Surat Berharga Pasar Uang yang dapat diperdagangkan dan merupakan surat hutang jangka menengah (umumnya 1 sampai dengan 5 tahun) yang berisi janji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Pada <i>notes</i> jenis ini, tingkat bunga atau <i>coupon rate</i> -nya dapat diubah atau dikaji ulang atau ditinjau secara periodik selama masa berlakunya <i>notes</i> berdasarkan <i>benchmark</i> atau formula yang telah ditentukan.	062
13	<i>Credit Linked Notes</i> Salah satu jenis instrumen kredit derivatif dimana bank sebagai penjual proteksi (<i>protection seller</i>) membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli proteksi (<i>protection buyer</i>) dengan aset keuangan referensi tertentu yang mendasari surat berharga tersebut (<i>underlying reference assets</i>).	063
14	Surat Berharga Pasar Uang Lainnya	069
15	Reksadana atau Sertifikat Reksadana Syariah Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang pasar modal atau wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang pasar modal dan berdasarkan prinsip syariah.	081

No	Jenis Surat Berharga	Kode
16	Obligasi Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka program rekapitalisasi bank umum yang dibeli dari pasar sekunder.	082
17	Obligasi Negara (ON) atau Sukuk Negara Surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.	086
18	Obligasi Ritel Indonesia (ORI) atau Sukuk Ritel Obligasi negara yang dijual kepada Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.	087
19	Obligasi Subordinasi atau Sukuk Subordinasi Obligasi yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal atau sukuk yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.	088
20	Obligasi Lainnya atau Sukuk Lainnya	083
21	Efek Beragun Aset Surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian aktivitas sekuritisasi aset.	084
22	Surat Berharga Pasar Modal Lainnya	089
23	Surat Berharga Lainnya	099

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Surat Berharga	Pengisian
1	Obligasi Lainnya	083
2	Surat Berharga Pasar Uang Lainnya	069

5. *Sovereign Rate*

- a. Kolom ini diisi dengan *sovereign rate* negara perusahaan atau lembaga penerbit surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Sovereign Rate</i>	Pengisian
1	Rating “AAA”	AAA
2	Rating “BBB+”	BBB+

6. *Listing*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *listing* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status <i>Listing</i>	Kode
1	Terdaftar di pasar modal	Y
2	Tidak terdaftar di pasar modal	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Status <i>Listing</i>	Pengisian
1	Terdaftar di pasar modal	Y
2	Tidak terdaftar di pasar modal	T

7. Peringkat Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat surat berharga yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No	Peringkat Surat Berharga	Pengisian
1	Rating “AAA”	AAA
2	Rating “BBB+”	BBB+
3	Rating “AAA+” yang diperingkat oleh PT XYZ	AAA+ / PT XYZ

8. Kode Tujuan Kepemilikan

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan kepemilikan surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Tujuan Kepemilikan	Kode
1	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini jika merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.	1
2	Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.	2
3	Tersedia untuk Dijual Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini jika merupakan aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang dan kemampuan untuk	3

No	Tujuan Kepemilikan	Kode
	memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.	

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan kepemilikan	Pengisian
1	Dimiliki hingga jatuh tempo	1
2	Diperdagangkan	2

9. Tanggal Penerbitan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal penerbitan surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penerbitan	Pengisian
1	Surat berharga terbit tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga terbit tanggal 3 April 2016	20160403

10. Tanggal Pembelian

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian surat berharga oleh Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pembelian	Pengisian
1	Surat berharga dibeli tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga dibeli tanggal 3 April 2016	20160403

11. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 April 2016	20160403

12. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta surat berharga sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

13. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nominal surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

14. Nilai dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan mata uang asal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kode valuta bukan IDR (Rupiah) dan dikosongkan jika kode valuta adalah IDR (Rupiah).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Nominal surat berharga dalam mata uang USD adalah USD5.000,00	5000
2	Nominal surat berharga dalam mata uang Rupiah adalah Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

15. Nilai Pasar

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pasar surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pasar	Pengisian
1	Nilai pasar surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai pasar surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

16. Nilai Perolehan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai perolehan surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Perolehan	Pengisian
1	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas surat berharga.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Margin 10%	10

18. Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan (pokok dan/atau bunga atau imbalan) dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Tunggakan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Surat berharga tidak memiliki tunggakan	0

19. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas surat berharga yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari.	115
2	Tidak ada tunggakan	0

20. Kode Kualitas

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas surat berharga mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Surat berharga yang kualitasnya “Macet”	5
2	Surat berharga yang kualitasnya “Lancar”	1

21. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas surat berharga dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

22. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6	Kelemahan Dalam Analisa	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas Surat berharga macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

23. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas surat berharga yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas surat berharga masih aktif	00

24. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat surat berharga dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.

- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Surat berharga kondisi aktif	kolom dikosongkan

25. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait surat berharga yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas surat berharga sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

26. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas surat berharga dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

27. Operasi Data

- Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	Create	C
2	Update	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data surat berharga baru	C
2	Update data surat berharga yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

G. Segmen F04–Fasilitas *Irrevocable* L/C

Segmen ini merupakan pelaporan *Irrevocable* L/C yang diterbitkan Pelapor. *Irrevocable* L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas *Irrevocable* L/C harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor L/C

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening atau nomor L/C.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345

3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
- Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis L/C

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis L/C	Kode
1	<i>Sight</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada bank.	1
2	<i>Usance</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	2
3	<i>Acceptance</i> L/C L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> diaksep oleh <i>accepting bank</i>	3

No	Jenis L/C	Kode
	yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.	
4	<i>Negotiation</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana <i>negotiating bank</i> .	4
5	Rekening Komitmen	5
6	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis L/C	Pengisian
1	<i>Usance</i> L/C	2
2	<i>Sight</i> L/C	1

5. Kode Tujuan L/C

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Nama	Kode
1	L/C Luar Negeri	1
2	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2
3	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan L/C	Pengisian
1	L/C Luar Negeri	1
2	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2

6. Tanggal Keluar

- a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen L/C.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Keluar	Pengisian
1	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”,	ABC-12345678
2	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001. 2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.

- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

12. Bank *Beneficiary*

- a. Kolom ini diisi dengan nama bank *beneficiary* (bank yang disebut dalam warkat L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran)
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Bank <i>Beneficiary</i>	Pengisian
1	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah “PT Bank ABCD”	PT Bank ABCD
2	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah “XYZ Bank”	XYZ Bank

13. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas L/C sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan plafon fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Setoran Jaminan	Pengisian
1	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3

4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	L/C yang kualitasnya “Macet”	5
2	L/C yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas L/C yang dilaporkan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Wanprestasi	Pengisian
1	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04

No	Kondisi	Kode
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas Dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas L/C yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas L/C masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas L/C dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.

- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas L/C dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas L/C kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas L/C yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas L/C sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas L/C dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	Create	C
2	Update	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas L/C baru	C
2	Update data fasilitas L/C yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

H. Segmen F05–Fasilitas Garansi yang Diberikan

Segmen ini merupakan pelaporan posisi fasilitas penerbitan jaminan atau garansi, baik untuk kepentingan bank lain maupun golongan pihak ketiga. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan atau garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim. Pada prinsipnya, setiap fasilitas garansi yang diberikan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

- 1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
- 2. Nomor Rekening
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
 - b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
 - c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 - d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 - e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345

3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
 - b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
 - c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 - d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Garansi
- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jenis garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Garansi	Kode
1	<i>Bid Bonds</i>	12
2	<i>Performance Bonds</i>	14
3	<i>Advanced Payment Bonds</i>	18
4	<i>Shipping Guarantee</i> Jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barang tanpa menunjukkan B/L (<i>Bill of Lading</i>)	20
5	<i>Standby L/C</i> Garansi bank berbentuk <i>Irrevocable L/C</i> yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar	40

No	Jenis Garansi	Kode
	jumlah yang dinyatakan dalam <i>Standby</i> L/C jika pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.	
6	Endosemen atas surat berharga	50
7	Rekening Komitmen	80
8	Lainnya	90

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Garansi	Pengisian
1	<i>Performance Bonds</i>	14
2	<i>Advanced Payment Bonds</i>	18

5. Kode Tujuan Garansi

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Tujuan Garansi	Kode
1	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	1
2	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	2
3	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Luar Negeri	4
4	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
5	Kontra Garansi (<i>Counter Guarantee</i>)	7
6	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tujuan Garansi	Pengisian
1	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
2	Kontra Garansi (<i>Counter Guarantee</i>)	7

6. Tanggal Penerbitan

- Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya garansi yang diberikan sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen garansi yang diberikan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Contoh penulisan:

No	Tanggal Penerbitan	Pengisian
1	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

- Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo ~~Bank~~ garansi yang diberikan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Awal	Pengisian
1	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian atau akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.

d. Contoh pengisian data:

No	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad akhir “ABC-12345678”	ABC-12345678
2	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad akhir “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian atau akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

12. Nama Yang Dijamin

- a. Kolom ini diisi dengan pihak yang dijamin garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Yang Dijamin	Pengisian
1	PT ABC	PT ABC
2	Muhammad Ali	Muhammad Ali

13. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta garansi yang diberikan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan plafon garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Plafon	Pengisian
1	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Setoran Jaminan	Pengisian
1	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Garansi yang diberikan yang kualitasnya “Macet”	5
2	Garansi yang diberikan yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal wanprestasi	Pengisian
1	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas dengan diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas garansi yang diberikan masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat garansi yang diberikan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas garansi yang diberikan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas garansi yang diberikan dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas garansi yang diberikan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas garansi yang diberikan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas garansi yang diberikan baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas garansi yang diberikan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

I. Segmen F06–Fasilitas Lain

Segmen ini merupakan pelaporan untuk jenis fasilitas selain segmen F01, F02, F03, F04, dan F05.

- 1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
- 2. Nomor Rekening Fasilitas
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
 - b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.

- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Fasilitas Lain

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis fasilitas lain sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas Lain	Kode
1	Kredit Kelolaan	001
2	Tagihan Akseptasi	002
3	Kewajiban Kepada Pemerintah	003
4	Tagihan Karena Transaksi Derivatif	004
5	Tagihan Karena Transaksi <i>Reverse Repo</i>	005
6	Lainnya	900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Fasilitas Lain	Pengisian
1	Kredit Kelolaan	001
2	Tagihan Akseptasi	002

5. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode pelapor atau kode golongan pihak ketiga sumber dana fasilitas.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- d. Contoh pengisian data:

No	Sumber Dana	Pengisian
1	Fasilitas lain dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2	Fasilitas lain dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

6. Tanggal Mulai

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai	Pengisian
1	7 Juni 2012	20120607
2	18 Desember 2011	20111218

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu fasilitas.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1	7 Juni 2020	20200607
2	18 Desember 2030	20301218

8. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas dimaksud.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2	Margin 10%	10

9. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas yang tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Valuta	Pengisian
1	Rupiah	IDR
2	US Dollar	USD
3	Singapore Dollar	SGD

10. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Nominal	Pengisian
1	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp3.345.000.123,00.	3345000123

11. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam mata uang asal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk fasilitas dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas dalam mata uang Rupiah.
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1	Fasilitas dalam mata uang USD memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00	5000
2	Fasilitas dalam mata uang Rupiah memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

12. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kualitas	Pengisian
1	Fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kualitasnya “Macet”	5
2	Fasilitas yang kualitasnya “Lancar”	1

13. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Macet	Pengisian
1	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan

14. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Sebab Macet	Kode
1	Kesulitan Pemasaran	01
2	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03

4	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6	Kelemahan Dalam Analisa	06
7	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8	Itikad Tidak Baik	08
9	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10	Pailit	10
11	<i>Uniform Classification</i>	11
12	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No	Sebab Macet	Pengisian
1	Fasilitas macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan

15. Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tunggakan	Pengisian
1	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2	Fasilitas tidak memiliki tunggakan pokok	0

16. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

17. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kondisi	Kode
1	Fasilitas Aktif	00
2	Dibatalkan	01
3	Lunas	02
4	Dihapusbukukan	03
5	Hapus Tagih	04
6	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13	Lunas dengan Diskon	12
14	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kondisi	Pengisian
1	Kondisi fasilitas yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2	Fasilitas masih aktif	00

18. Tanggal Kondisi

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Kondisi	Pengisian
1	Fasilitas dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Fasilitas dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

19. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

20. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

21. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data fasilitas baru	C
2	<i>Update</i> data fasilitas yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

J. Segmen A01-Agunan

Segmen agunan adalah data rincian agunan atau jaminan yang bernilai ekonomis yang dikuasai oleh Pelapor atas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dari Pelapor. Setiap fasilitas yang memiliki kondisi tidak aktif atau tidak lagi memiliki kewajiban, data agunan dilaporkan terakhir kali pada periode laporan terjadinya kondisi tersebut dengan operasi data *Delete*.

1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Kode Register atau Nomor Agunan
 - a. Kolom ini diisi dengan Kode Register atau Nomor Agunan.

- b. Kode Register atau Nomor Agunan harus unik, 1 (satu) Kode Register atau Nomor Agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
- c. Kode Register atau Nomor Agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Kode Register atau Nomor Agunan	Pengisian
1	Agunan memiliki kode register atau nomor = 123456789	123456789
2	Agunan memiliki kode register atau nomor = A-12345	A12345

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data fasilitas yang terkait.
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.

- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis segmen fasilitas yang diperoleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Fasilitas	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan	F01
2	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3	Surat Berharga	F03
4	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5	Garansi yang Diberikan	F05
6	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Fasilitas	Kode
1	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit	F01
2	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit <i>Joint Account</i>	F02

6. Kode Status Agunan

Status agunan diisi dengan informasi mengenai status ketersediaan wujud fisik agunan atau jaminan.

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status agunan dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Agunan	Kode
1	Tersedia Agunan yang telah tersedia wujud fisiknya.	1
2	<i>Indent</i> Agunan berupa properti yang belum tersedia secara utuh atau belum tersedia wujud fisiknya sesuai dengan yang diperjanjikan atau diserahterimakan.	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Status Agunan	Pengisian
1	Agunan untuk fasilitas telah tersedia	1
2	Agunan untuk fasilitas masih dalam status <i>indent</i>	2

7. Kode Jenis Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis agunan dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Agunan	Kode
1	Giro Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.	010
2	Tabungan Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.	020

No	Jenis Agunan	Kode
3	Simpanan Berjangka Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.	041
4	Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang, termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	042
5	Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.	043
6	Sertifikat Deposito Bank Indonesia Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.	042
7	Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (SBBI Valas) Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.	043
8	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	044
9	Setoran Jaminan	045
10	Emas	046
11	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	085
12	Obligasi Negara (ON) Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan	086

No	Jenis Agunan	Kode
	dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.	
13	Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Obligasi Negara yang dijual kepada WNI melalui agen penjual, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.	087
14	Saham Satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.	091
15	Reksadana Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang pasar modal.	081
16	Sukuk Lainnya	080
17	Resi Gudang Resi gudang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	092
18	Surat Berharga Lainnya Surat berharga diluar bentuk agunan yang telah dijabarkan sebelumnya.	099
19	Gedung	161
20	Gudang	162
21	Rumah Toko atau Rumah Kantor atau Kios	163
22	Hotel	164

No	Jenis Agunan	Kode
23	Properti Komersial Lain	175
24	Rumah Tinggal	176
25	Apartemen atau Rumah Susun	177
26	Tanah	187
27	Kendaraan Bermotor	189
28	Mesin	190
29	Pesawat Udara	191
30	Kapal Laut atau Alat Transportasi Air	192
31	Persediaan	193
32	Agunan Lain	250
33	<i>Standby</i> L/C (SBLC)	251
34	Garansi	252
35	Asuransi Pembiayaan	254
36	Jaminan Lainnya	275

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Agunan	Pengisian
1	Agunan berupa gudang	162
2	Agunan berupa kendaraan bermotor	189

8. Peringkat Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat agunan.
- b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah “1-Tersedia”.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Peringkat Agunan	Pengisian
1	Agunan berupa surat berharga dengan peringkat “AAA”	AAA
2	Agunan berupa kendaraan bermotor	kolom dikosongkan

9. Kode Lembaga Pemeringkat

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeringkat	Kode
1	Moody's	10
2	Standard and Poor's	11
3	Fitch Rating	12
4	Pefindo	13
5	Icra Indonesia	14
6	Fitch Indonesia	15
7	Lainnya	99

- b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah “1-Tersedia”
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1	Standard and Poor's	11
2	Moody's	10
3	Agunan bukan surat berharga	kolom dikosongkan

10. Kode Jenis Pengikatan

- a. Kolom ini diisi jenis pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Jenis Pengikatan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Pengikatan	Kode
1	Hak Tanggungan Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.	01

No	Jenis Pengikatan	Kode
2	Gadai Hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Pelapor, yang sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.	02
3	Fidusia Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.	03
4	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Surat kuasa untuk membebaskan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.	04
5	Cessie Cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.	05
6	Belum Diikat atau Tidak Diikat	06

No	Jenis Pengikatan	Kode
7	Lainnya Jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya.	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila status agunan adalah “1-Tersedia”.
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Pengikatan	Pengisian
1	Agunan diikat dengan hak tanggungan	01
2	Agunan belum atau tidak diikat	06

11. Tanggal Pengikatan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal agunan atau jaminan diikat.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Pengikatan	Pengisian
1	Agunan dilakukan pengikatan pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2	Agunan belum diikat	kolom dikosongkan

12. Nama Pemilik Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan nama pemilik agunan atau jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Pemilik Agunan	Pengisian
1	Nama pemilik agunan adalah “H. Mukmin”	H. Mukmin
2	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

13. Bukti Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan informasi mengenai bukti kepemilikan agunan atau jaminan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bukti Kepemilikan	Pengisian
1	Bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 12345	SHM No.12345
2	Bukti kepemilikan agunan berupa BPKB No. 12345	BPKB No.12345

14. Alamat Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan alamat lengkap agunan disertai dengan informasi kelurahan dan kecamatan.
- b. Untuk agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, alamat yang dilaporkan adalah alamat barang agunan yang tertera pada dokumen.
- c. Untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, alamat yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan agunan.
- d. Untuk agunan dalam bentuk surat berharga, alamat yang dilaporkan adalah alamat bank penyimpan dokumen surat berharga.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Alamat Agunan	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati

No	Alamat Agunan	Pengisian
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek

15. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan
- a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat agunan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
 - b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
 - c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar
- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
 - 1) Untuk agunan berupa tanah dan bangunan diisi dengan nilai NJOP atas barang yang dijadikan agunan.
 - 2) Untuk agunan selain tanah dan bangunan, kolom ini diisi dengan nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
 - b. Kolom ini diisi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
 - c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
 - d. Contoh pengisian data:

No	Nilai NJOP Agunan	Pengisian
1	Nilai NJOP agunan adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai Wajar agunan adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Nilai Agunan Menurut Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa barang bergerak, barang tak bergerak, persediaan barang, dan lainnya.
 - 1) Untuk jaminan berupa *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya.
 - 2) Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka kolom nilai agunan ini harus diisi dengan:
 - a) nilai pasar saat dilakukan pengikatan untuk KPR; dan/atau
 - b) hasil penilaian Pelapor saat dilakukan pengikatan untuk KKB.
 - 3) Dalam hal terjadi penilaian ulang terhadap agunan tersebut maka kolom Nilai Agunan ini diisi dengan hasil penilaian terbaru.
- b. Nilai agunan yang dilaporkan pada formulir ini adalah nilai agunan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Agunan Menurut Pelapor	Pengisian
1	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

18. Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor

- a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan oleh Pelapor.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.

d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor	Pengisian
1	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 13 Desember 2017	20171213

19. Nilai Agunan menurut Penilai Independen

- Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian oleh penilai independen dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Jaminan berupa *cash collateral* dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, diisi nilai nominalnya.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1	Nilai agunan menurut penilai independen adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

20. Nama Penilai Independen

- Kolom ini berisi nama lembaga penilai independen.
- Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom Nilai Agunan Penilai Independen diisi.
- Contoh pengisian data:

No	Nama Penilai Independen	Pengisian
1	KJPP AKURAT	KJPP AKURAT
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

21. Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen

- a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan menurut penilai independen.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (YYYYMMDD) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom nilai agunan menurut penilai independen diisi.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen	Pengisian
1	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

22. Status Paripasu

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan paripasu dan diisi “T” jika agunan bukan paripasu.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Paripasu	Pengisian
1	Agunan paripasu	Y
2	Bukan agunan paripasu	T

23. Persentase Paripasu

- a. Kolom ini berisi besar persentase nilai agunan yang diserahkan Debitur kepada Pelapor untuk menjamin fasilitas yang diberikan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom Status Paripasu adalah Y.

- c. Contoh pengisian data:

No	Persentase Paripasu	Pengisian
1	Persentase paripasu 30%	30
2	Persentase paripasu 60%	60
3	Bukan paripasu	kolom dikosongkan

24. Status Agunan Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan merupakan agunan fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account* dan diisi “T” jika agunan bukan merupakan agunan fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Agunan Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	Pengisian
1	Agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	Y
2	Bukan agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	T

25. Diasuransikan

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan diasuransikan dan diisi “T” jika agunan tidak diasuransikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Diasuransikan	Pengisian
1	Agunan diasuransikan	Y
2	Agunan tidak diasuransikan	T

26. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait agunan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Agunan dalam sengketa di pengadilan	agunan dalam sengketa di pengadilan
2	Tidak ada keterangan tambahan	Kolom dikosongkan

27. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat agunan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Agunan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Agunan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

28. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Delete</i>	D
4	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data agunan baru	C
2	<i>Update</i> data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3	Hapus data agunan yang salah	D

4	Tidak ada perubahan terhadap data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5	Data agunan yang fasilitasnya lunas pada laporan bulan berjalan	D

K. Segmen P01–Penjamin

Segmen penjamin adalah data rincian penjamin Fasilitas Penyediaan Dana yang dapat diklaim jika terjadi *default* atau gagal bayar misalnya asuransi kredit, *personal guarantee* atau *bank guarantee*. Tidak termasuk penjamin yang berupa asuransi jiwa, kerugian, atau sejenisnya.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Identitas Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas penjamin.
- b. Dokumen identitas penjamin adalah sebagai berikut:

No	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor
3	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4	Badan Publik	NPWP	NPWP
5	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. • Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan

No	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
			publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut • Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah

- c. Jika nomor identitas penjamin mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Penjamin adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Penjamin adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A.123456789”	A123456789
3	Penjamin adalah badan usaha dengan NPWP “08.435.185.4-125.000”	084351854125000
4	Penjamin adalah Pemerintah RI	111111
5	Penjamin adalah Kementerian Keuangan RI	0020
6	Penjamin adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0100

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen fasilitas yang terkait.
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening Fasilitas	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = C-12345	C12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC-12345	ABC12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit jenis fasilitas yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan	F01
2	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3	Surat Berharga	F03
4	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5	Garansi yang Diberikan	F05
6	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan <i>joint account</i>	F02

6. Kode Jenis Identitas Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2
3	NPWP	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan masyarakat)	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Penjamin adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Penjamin adalah WNA (menggunakan paspor)	2

3	Penjamin adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

7. Nama Penjamin Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama penjamin sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas. Untuk penjamin perseorangan nama diisi tanpa gelar.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Penjamin	Pengisian
1	Nama yang tertera di KTP milik penjamin adalah “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
2	Nama yang tertera di NPWP milik penjamin adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya
3	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah Noor	Arif M.N. Anshori

8. Nama Lengkap Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap penjamin.
- b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan maka Pelapor meminta informasi kepada penjamin mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Penjamin	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin

No	Nama Penjamin	Pengisian
3	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah Noor	Arif Muhammad Noor Anshori

9. Kode Golongan Penjamin

- Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode golongan penjamin sebagaimana tercantum pada referensi kode golongan pihak ketiga.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Golongan Penjamin	Pengisian
1	Penjamin adalah perusahaan otomotif swasta nasional	8111
2	Penjamin adalah koperasi primer swasta nasional	7173
3	Penjamin adalah perusahaan tekstil asing	8613

10. Alamat Penjamin

- Kolom ini berisi alamat lengkap penjamin.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Alamat Penjamin	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan

11. Persentase Fasilitas yang Dijamin

- Kolom ini diisi persentase nilai yang menjadi tanggungan penjamin terhadap nilai tagihan penyediaan dana.
- Kolom ini bersifat opsional.

- c. Contoh pengisian data:

No	Persentase Fasilitas yang Dijamin	Pengisian
1	Fasilitas yang dijamin sebesar 80%	80
2	Tidak ada informasi persentase dari nilai fasilitas yang dijamin	kolom dikosongkan

12. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait penjamin yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Penjamin telah pailit	Penjamin telah pailit
2	Tidak ada keterangan tambahan	kolom dikosongkan

13. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat penjamin dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Penjamin tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Penjamin pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

14. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U
3	<i>Delete</i>	D
4	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data penjamin baru	C
2	<i>Update</i> data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3	Hapus data penjamin yang salah	D
4	Tidak ada perubahan terhadap data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5	Data penjamin pada fasilitas yang lunas pada laporan bulan berjalan	D

L. Segmen M01–Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Segmen pengurus atau pemilik adalah data rincian pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha yang dilaporkan pada segmen Debitur badan usaha. Segmen ini hanya diisi jika terdapat data pada segmen Debitur badan usaha.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha.
- b. Dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha adalah sebagai berikut:

No	Pengurus atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	WNI	KTP	NIK
2	WNA	Paspor	Nomor Paspor
3	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4	Badan Publik	NPWP	NPWP
5	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	• Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia

No	Pengurus atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
			• Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut • Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah
6	Masyarakat	Tidak ada	999999

- c. Jika nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Pengurus atau pemilik adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Pengurus atau pemilik adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor “A.123456789”	A123456789
3	Pemilik adalah badan usaha dengan NPWP “08.435.185.4-125.000”	084351854125000
4	Untuk Debitur berupa perusahaan BUMN (pemilik Pemerintah RI)	111111
5	Pemilik adalah Kementerian Keuangan RI	0020
6	Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0100

No	Nomor Identitas	Pengisian
7	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	999999

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur dari badan usaha yang terkait dengan pengurus atau pemilik yang dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur badan usaha.
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jenis Identitas	Kode
1	KTP	1
2	Paspor	2
3	NPWP	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan Masyarakat)	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Pengurus atau pemilik adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2	Pengurus atau pemilik adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3	Pengurus atau pemilik adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

5. Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nama pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas pengurus atau pemilik.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1	Nama pengurus atau pemilik adalah “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Nama pengurus atau pemilik adalah “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

6. Jenis Kelamin

- a. Kolom ini diisi “L” untuk pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha berjenis kelamin laki-laki, diisi “P” untuk pengurus atau pemilik berjenis kelamin perempuan, diisi “B” jika pemilik adalah badan usaha dan diisi “M” jika pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Kelamin Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1	Pria atau Laki-laki	L
2	Wanita atau Perempuan	P
3	Pemilik adalah Badan Usaha	B
4	Pemilik adalah Masyarakat	M

7. Alamat

- a. Untuk pengurus atau pemilik WNI, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b. Untuk pengurus atau pemilik WNA, kolom ini diisi dengan alamat di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal (IMTA/KITAS).
- c. Untuk pemilik berbentuk badan usaha, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Alamat Debitur	Pengisian
1	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

8. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat pengurus atau pemilik.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kelurahan	Pengisian
1	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2	Lemah Abang	Lemah Abang
3	Gambir	Gambir

9. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kecamatan	Pengisian
1	Gambir	Gambir
2	Johar Baru	Johar Baru
3	Prambanan	Prambanan

10. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

11. Kode Jabatan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jabatan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Jabatan	Kode
1	PEMILIK-Direktur Utama atau Presiden Direktur	01
2	PEMILIK-Direktur	02
3	PEMILIK-Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	03
4	PEMILIK-Komisaris	04
5	PEMILIK-Kuasa Direksi	06

No	Jabatan	Kode
6	PEMILIK-Pemilik Bukan Pengurus	07
7	PEMILIK-Masyarakat	09
8	PEMILIK-Ketua Umum	10
9	PEMILIK-Ketua	11
10	PEMILIK-Sekretaris	12
11	PEMILIK-Bendahara	13
12	PEMILIK-Lainnya	19
13	BUKAN PEMILIK-Direktur Utama atau Presiden Direktur	51
14	BUKAN PEMILIK-Direktur	52
15	BUKAN PEMILIK-Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	53
16	BUKAN PEMILIK-Komisaris	54
17	BUKAN PEMILIK-Kuasa Direksi	55
18	BUKAN PEMILIK-Ketua Umum	57
19	BUKAN PEMILIK-Ketua	58
20	BUKAN PEMILIK-Sekretaris	59
21	BUKAN PEMILIK-Bendahara	60
22	BUKAN PEMILIK-Lainnya	69

- b. Pengisian untuk pemilik adalah pemilik langsung Debitur badan usaha (pemilik *layer 1*).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Jabatan	Pengisian
1	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama namun pengurus tersebut bukan merupakan salah satu pemilik badan usaha	51
2	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemilik langsung badan usaha	01

12. Pangsa Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase kepemilikan terhadap Debitur badan usaha.

- b. Untuk pengurus yang bukan pemilik, kolom ini diisi “0”.
- c. Total pangsa kepemilikan seluruh pemilik Debitur harus 100%.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Pangsa Kepemilikan	Pengisian
1	Seorang pemilik memiliki pangsa kepemilikan “79,99%”	79,99
2	Seorang pengurus bukan merupakan pemilik	0

13. Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pengurus dan/atau pemilik pada badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Kode
1	Aktif	1
2	Telah Berakhir	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Pengisian
1	Pengurus masih aktif sebagai pengurus atau pemilik.	1
2	Pengurus atau pemilik yang pernah dilaporkan tidak lagi aktif sebagai pengurus atau pemilik.	2

14. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang tempat Debitur badan usaha dan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur dan pengurus atau pemilik tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur dan pengurus atau pemilik pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

15. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data pengurus atau pemilik baru	C
2	<i>Update</i> data pengurus atau pemilik yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

M. Segmen K01–Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan pelaporan rincian data keuangan Debitur terkini yang paling sedikit dilakukan pengkinian setahun sekali. Laporan keuangan ini ditujukan bagi Debitur badan usaha yang mendapat 1 (satu) atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari satu Pelapor. Pengisian laporan keuangan dapat dikosongkan bagi Debitur yang merupakan pemerintah atau lembaga negara.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur badan usaha yang laporan keuangannya dilaporkan.

- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur badan usaha.
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

3. Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan posisi laporan keuangan tahunan untuk Debitur badan usaha dengan format YYYYMM.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	Pengisian
1	31 Desember 2016	201612
2	31 Desember 2017	201712

4. Aset

- a. Kolom ini diisi dengan pos total aset dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset	Pengisian
1	Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

5. Aset Lancar

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Lancar	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

6. Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan kas (*cash on hand*), rekening giro, dan tabungan yang tidak dibatasi penggunaannya.
- c. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas adalah:
 - 1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
 - 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas dan setara kas, akan tetapi diklasifikasikan ke dalam aset lancar lainnya.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nilai Kas dan Setara Kas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

7. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Piutang Usaha	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

8. Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Investasi	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp500.000.000,00.	500000000

9. Aset Lancar Lain (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan aset lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Lancar Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

10. Aset Tidak Lancar

- Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Aset tidak lancar adalah aset yang direalisasikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Tidak Lancar	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

11. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)

- Kolom ini diisi dengan pos piutang usaha atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Piutang Usaha atau Pembiayaan	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

12. Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)

- Kolom ini diisi dengan pos investasi atau aset keuangan lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan lain yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Investasi atau Aset Keuangan Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

13. Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan aset tidak lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Aset Tidak Lancar Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

14. Liabilitas

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

15. Liabilitas Jangka Pendek

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.

- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

16. Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan saldo pinjaman perusahaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk cerukan. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai akrual.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pinjaman Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

17. Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Utang Usaha Jangka Pendek	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

18. Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka pendek yang tidak termasuk kategori sebelumnya.

- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

19. Liabilitas Jangka Panjang

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

20. Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk dalam pos ini antara lain pinjaman, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, dan utang sewa pembiayaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pinjaman Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

21. Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Utang Usaha Jangka Panjang	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

22. Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nilai Liabilitas Jangka Panjang Lain	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

23. Ekuitas

- a. Kolom ini diisi dengan pos ekuitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Ekuitas	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

24. Pendapatan Usaha atau Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan usaha atau operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pendapatan Usaha atau Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

25. Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos beban pokok pendapatan atau beban operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

26. Laba atau Rugi Bruto

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi bruto dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Bruto	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

27. Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

28. Beban Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos beban lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Beban Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rp0	0

29. Laba atau Rugi Sebelum Pajak

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi sebelum pajak dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Sebelum Pajak	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

30. Laba atau Rugi Tahun Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi tahun berjalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Laba atau Rugi Tahun Berjalan	Pengisian
1	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

31. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

32. Operasi Data

a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Operasi Data	Kode
1	<i>Create</i>	C
2	<i>Update</i>	U

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Operasi Data	Pengisian
1	Data laporan keuangan baru	C
2	<i>Update</i> data laporan keuangan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

N. Segmen S01–*Summary* Fasilitas

Segmen *Summary* Fasilitas adalah data kualitas dan hari tunggakan atas fasilitas yang masih aktif atau memiliki *outstanding* pada posisi tanggal 31 Maret 2017 dan/atau fasilitas yang lunas pada periode tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Segmen ini disampaikan dalam pelaporan inisial pada masa awal implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan. Periode pelaporan *summary* adalah posisi tanggal 31 Maret 2017 untuk data selama 12 (dua belas) bulan sebelumnya. *Summary* Fasilitas terdiri atas informasi CIF Debitur, nomor rekening fasilitas, jenis fasilitas, kode kualitas, dan jumlah hari tunggakan fasilitas. Ketentuan pelaporan inisial terdiri atas:

a. Nomor CIF Debitur harus terlebih dahulu terdaftar pada segmen D01/D02.

- b. Nomor rekening fasilitas harus terlebih dahulu terdaftar pada segmen F01/F02/F03/F04/F05/F06.
- c. Pengisian kode kualitas dan hari tunggakan untuk jenis fasilitas kredit atau pembiayaan dan kredit atau pembiayaan *joint account* mengacu pada tanggal awal kredit atau pembiayaan pada segmen F01 dan F02.
- d. Pengisian kode kualitas dan hari tunggakan untuk jenis fasilitas surat berharga mengacu pada tanggal pembelian.
- e. Pengisian kode kualitas untuk jenis fasilitas *Irrevocable L/C* mengacu pada tanggal keluar.
- f. Pengisian kode kualitas untuk jenis fasilitas garansi yang diberikan mengacu pada tanggal penerbitan.
- g. Pengisian kode kualitas untuk jenis fasilitas lain mengacu pada tanggal mulai.
- h. Setiap Pelapor menyampaikan segmen *summary* fasilitas sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.
- i. Kode kualitas pada segmen *summary* yang dilaporkan adalah kode kualitas Debitur pada bulan data tersebut (bukan bulan data sebelumnya).
- j. Pelaporan inisial dilakukan hanya 1 (satu) kali sesuai dengan jadwal pelaporan inisial yang ditetapkan.
- k. Pelaporan inisial dilakukan melalui menu pelaporan inisial pada aplikasi SLIK *Reporting*.

Pengisian segmen *summary* fasilitas terdiri atas:

1. *Flag Detail*
Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor Rekening Fasilitas
 - a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
 - b. Nomor rekening harus unik (1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas).
 - c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 - d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 - e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - f. Contoh pengisian data:

No	Nomor Rekening	Pengisian
1	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
- b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur (1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur).
- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No	Nomor CIF	Pengisian
1	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis segmen fasilitas yang diperoleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	Kredit atau Pembiayaan	F01
2	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3	Surat Berharga	F03
4	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5	Garansi yang Diberikan	F05
6	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1	<i>Summary</i> untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2	<i>Summary</i> untuk fasilitas kredit atau pembiayaan <i>joint account</i>	F02

5. Kode Kualitas 1

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan April 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 1	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.

- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 1	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan yang kualitasnya “Lancar”	1

6. Jumlah Hari Tunggakan 1

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan April 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.

- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 1	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

7. Kode Kualitas 2

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Mei 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 2	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 2	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

8. Jumlah Hari Tunggakan 2

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Mei 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 2	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

9. Kode Kualitas 3

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Juni 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 3	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 3	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

10. Jumlah Hari Tunggakan 3

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Juni 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 3	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

11. Kode Kualitas 4

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Juli 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 4	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 4	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

12. Jumlah Hari Tunggakan 4

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Juli 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 4	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

13. Kode Kualitas 5

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Agustus 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 5	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 5	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

14. Jumlah Hari Tunggakan 5

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Agustus 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 5	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

15. Kode Kualitas 6

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan September 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 6	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 6	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

16. Jumlah Hari Tunggakan 6

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan September 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 6	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

17. Kode Kualitas 7

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Oktober 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 7	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 7	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

18. Jumlah Hari Tunggakan 7

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Oktober 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 7	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

19. Kode Kualitas 8

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan November 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 8	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 8	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

20. Jumlah Hari Tunggakan 8

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan November 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 8	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

21. Kode Kualitas 9

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Desember 2016 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 9	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 9	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

22. Jumlah Hari Tunggakan 9

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Desember 2016 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 9	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

23. Kode Kualitas 10

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Januari 2017 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 10	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 10	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

24. Jumlah Hari Tunggakan 10

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Januari 2017 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 10	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

25. Kode Kualitas 11

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Februari 2017 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 11	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3

4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 11	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

26. Jumlah Hari Tunggakan 11

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Februari 2017 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 11	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

27. Kode Kualitas 12

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas bulan Maret 2017 sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No	Kualitas 12	Kode
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas 12	Pengisian
1	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kualitasnya “Macet”	5
2	Kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	1

28. Jumlah Hari Tunggakan 12

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan bulan Maret 2017 dari fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini tidak tersedia untuk fasilitas yang berjenis *Irrevocable* L/C dan Garansi yang Diberikan.
- d. Contoh pengisian data:

No	Jumlah Hari Tunggakan 12	Pengisian
1	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2	Tidak ada tunggakan	0

Contoh 1:

- 1. Debitur perseorangan dengan CIF CIF001IND mempunyai fasilitas F01 dengan rekening REK001F01 serta tanggal awal kredit 1 Januari 2016.
- 2. Fasilitas tersebut memiliki tanggal jatuh tempo 1 Januari 2018.
- 3. Selanjutnya, pelaporan inisial terdiri atas:

Segmen D01
H 0101 1234 2017 03 D01 1 1 D CIF001IND 1 NIK001 kolom lainnya....

Catatan: Jumlah Data *File* dan Jumlah Data Segmen tergantung pada banyaknya Debitur yang berada pada setiap Pelapor.

Segmen F01
H 0101 1234 2017 03 F01 1 1 D REK001F01 CIF001IND ... 20160101 ... 20180101 .. 1 0 ...

Catatan:

- 1) 20160101 adalah tanggal awal kredit fasilitas F01
- 2) 20180101 adalah tanggal jatuh tempo fasilitas F01
- 3) 1 adalah kualitas fasilitas Debitur pada bulan Maret 2017
- 4) 0 adalah jumlah hari tunggakan Debitur pada bulan Maret 2017

[illegible]

Catatan:

- 1) Kode kualitas dan hari tunggakan yang diisi adalah kode kualitas dan hari tunggakan pada bulan April 2016 hingga Februari 2017 sesuai dengan tanggal mulai fasilitas tersebut pada segmen F01. Kode kualitas dan hari tunggakan pada bulan Maret 2017 tidak boleh dicantumkan pada segmen S01 dikarenakan telah dicantumkan pada segmen F01.
- 2) Contoh yang sama berlaku juga untuk Debitur badan usaha (D02).

Contoh 2:

1. 2 (dua) Orang Debitur perseorangan dengan informasi CIF001DEB1 untuk nomor CIF Debitur pertama dan CIF001DEB2 untuk nomor CIF Debitur kedua memperoleh fasilitas kredit *joint account* dengan nomor rekening REKF02JOIN.
2. Fasilitas tersebut memiliki tanggal awal kredit 1 Januari 2016 dan jatuh tempo 1 Januari 2018.
3. Selanjutnya, pelaporan inisial terdiri atas:

Segmen D01
H 0101 1234 2017 03 D01 2 2
D CIF001DEB1 1 NIK001 kolom lainnya....
D CIF001DEB2 1 NIK002 kolom lainnya....

Segmen F02
H 0101 1234 2017 03 F02 2 2
D REKF02JOIN CIF001IND 1 ... 20160101 ... 20180101 .. 1 0 ...
D REKF02JOIN CIF002IND 2 ... 20160101 ... 20180101 .. 1 0 ...

Segmen S01
H 0101 1234 2017 03 S01 2 2
D REKF02JOIN CIF001IND F02 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
D REKF02JOIN CIF002IND F02 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Catatan:

- 1) Kode kualitas dan hari tunggakan yang diisi adalah kode kualitas dan hari tunggakan pada bulan April 2016 sampai dengan Februari 2017 sesuai dengan tanggal awal kredit fasilitas tersebut pada segmen F01. Kode kualitas dan hari tunggakan pada bulan Maret 2017 tidak boleh dicantumkan pada segmen S01 dikarenakan telah dicantumkan pada segmen F01.
- 2) Prinsip pelaporan inisial untuk fasilitas kredit *joint account* adalah setiap Debitur harus dilaporkan pada segmen S01 untuk nomor rekening yang sama dan CIF yang berbeda.
- 3) Contoh yang sama berlaku juga untuk Debitur badan usaha (D02).

Contoh 3:

1. Debitur perseorangan dengan nomor CIF CIF002IND mempunyai fasilitas F01 dengan nomor rekening REK002F01 dan tanggal awal kredit 1 Januari 2016 dan telah lunas dengan kondisi “02” pada tanggal 1 Desember 2016.
2. Segmen agunan dan segmen penjamin tidak perlu disampaikan.
3. Selanjutnya, pelaporan inisial terdiri atas:

Segmen D01
H 0101 1234 2017 03 D01 1 1
D CIF002IND 1 NIK001 kolom lainnya....

Segmen F01
H 0101 1234 2017 03 F01 1 1
D REK002F01 CIF002IND 1 ... 20160101 ... 20161201 .. 1 0 ...

Segmen S01
H 0101 1234 2017 03 S01 1 1
D REK002F01 CIF002IND F01 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

BAB III

PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

A. Informasi Debitur

Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, beserta informasi terkait lain yang dikompilasi berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor SLIK di seluruh Indonesia.

Informasi Debitur adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga Pelapor harus menjaga keamanan Informasi Debitur. Pelapor hanya dapat menggunakan Informasi Debitur untuk:

1. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
2. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
3. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau permintaan dari pihak lain yang berwenang.

Penggunaan Informasi Debitur untuk kepentingan selain hal-hal tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan POJK PPID SLIK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:

1. Informasi Debitur hanyalah salah satu sumber informasi dalam melakukan analisis kelayakan calon Debitur dalam memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dan bukan satu-satunya sumber informasi. Keputusan untuk memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi maka Informasi Debitur hanya akan diperbaharui ketika terdapat permintaan dari pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor atau atas permintaan Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.
3. Dalam hal Fasilitas Penyediaan Dana Debitur dialihkan kepada pihak lain yang tidak menjadi Pelapor SLIK maka *performance* Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur baru tersebut tidak tercermin dalam Informasi Debitur.

B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur kepada OJK hanya dapat dilakukan secara daring (*online*) oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang telah diberikan akses oleh administrator SLIK Web masing-masing Pelapor untuk melakukan permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK Web. Permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK Web dapat dilakukan secara interaktif atau secara *batch*.

1. Permintaan Informasi Debitur Secara Interaktif

Permintaan Informasi Debitur secara interaktif dilakukan dengan mengisi formulir permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK Web. Informasi yang tidak dapat dikosongkan pada formulir permintaan Informasi Debitur secara interaktif adalah:

a. Kode Referensi Pengguna

Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
Penilaian calon Debitur	01
Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
Melayani permintaan Debitur	04
Dalam rangka pelaksanaan audit	05
Penanganan pengaduan Debitur	06
Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
Penilaian calon rekanan	08

c. Kata Kunci Pencarian

Terdapat 2 (dua) pilihan pencarian Informasi Debitur, yaitu pencarian berdasarkan nomor identitas atau pencarian menggunakan kombinasi data. Kata kunci yang dapat digunakan dalam pencarian Informasi Debitur adalah:

Jenis Debitur	Pilihan Pencarian	Kata Kunci	Keterangan
Debitur Perseorangan	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NIK atau Nomor Paspor)	Tidak dapat dikosongkan
		Nama Debitur	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Tanggal Lahir	Tidak dapat dikosongkan
		Jenis Kelamin	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Lahir	Opsional
		NPWP	Opsional
Debitur Badan Usaha	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NPWP, <i>TaxID</i> /nomor sejenis)	Tidak dapat dikosongkan
		Nama Badan Usaha	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Tanggal Pendirian	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Pendirian	Opsional

d. Seluruh Fasilitas atau Fasilitas *Outstanding*

Menu ini menampilkan pilihan untuk menampilkan seluruh fasilitas yang telah lunas dan tidak memiliki *outstanding* atau hanya menampilkan fasilitas yang masih memiliki *outstanding*.

e. Kode *CAPTCHA*

Kode yang harus diisi untuk tujuan keamanan sistem.

Setelah mengisi formulir permintaan Informasi Debitur secara lengkap, petugas Pelapor dapat memulai pencarian. Selanjutnya, petugas Pelapor harus meneliti kembali identitas Debitur yang

diminta dan memilih Debitur yang akan diproses lebih lanjut berdasarkan daftar Debitur hasil pencarian oleh sistem. Perlu dipahami bahwa tidak semua hasil pencarian merujuk pada 1 (satu) Debitur tertentu. Hal ini sangat tergantung pada kondisi data Debitur yang diperoleh oleh OJK dari seluruh Pelapor SLIK di Indonesia.

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh OJK.

2. Permintaan Informasi Debitur Secara *Batch*

Untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara Batch, petugas Pelapor menyiapkan daftar permintaan Informasi Debitur dalam bentuk *text file* yang berisi data sebagai berikut:

- a. Kode Referensi Pengguna
Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.
- b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur
Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

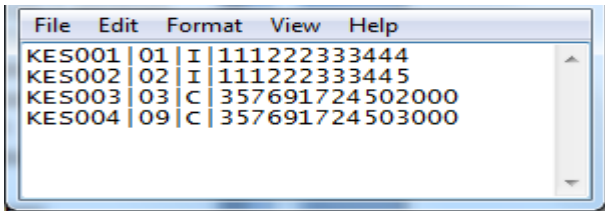
Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
Penilaian calon Debitur	01
Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
Melayani permintaan Debitur	04
Dalam rangka pelaksanaan audit	05
Penanganan pengaduan Debitur	06
Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
Penilaian calon rekanan	08

- c. Jenis Debitur
Untuk Debitur perseorangan diisi dengan “I” atau Debitur badan usaha diisi dengan “C”.

d. Nomor Identitas Debitur

Masukkan nomor identitas Debitur sebagai identifikasi Debitur yang akan diminta. Untuk Debitur perseorangan diisi dengan NIK atau Paspor. Untuk Debitur badan usaha diisi dengan NPWP.

Setiap kolom dipisahkan dengan pipe (|) dan format *file* yang digunakan harus dalam bentuk *text file* (*.txt) dan nama *file* tidak boleh mengandung spasi. File yang telah disiapkan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK Pelapor kemudian diunggah dalam SLIK Web untuk selanjutnya diproses oleh sistem.



Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch*

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh OJK.

C. Cakupan Informasi Debitur

Informasi Debitur terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Header*

Header Informasi Debitur berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Kode Referensi Pengguna	Kode referensi yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.
2	Nomor Laporan	Nomor unik yang dihasilkan oleh aplikasi SLIK Web sebagai identitas laporan Informasi Debitur.

No	Informasi	Keterangan
3	Posisi Data Terakhir	Posisi data yang menjadi dasar penyajian informasi Informasi Debitur. Dalam kondisi normal, posisi data yang ditampilkan adalah posisi data yang tersedia di OJK 1 (satu) hari sebelum tanggal permintaan Informasi Debitur (posisi H-1). Misalnya permintaan Informasi Debitur dilakukan pada tanggal 10 April 2018 maka Informasi Debitur yang ditampilkan adalah posisi 9 April 2018.
4	Tanggal Permintaan	Tanggal permintaan Informasi Debitur dilakukan.
5	Kata Kunci Pencarian	Kata kunci yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.

2. Data Pokok Debitur

- a. Untuk Debitur perseorangan, bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Sesuai Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
2	Jenis Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
3	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
4	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.

No	Informasi	Keterangan
5	Tempat Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
6	Tanggal Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
7	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
8	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
9	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
10	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
11	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
12	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
13	Pekerjaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
14	Tempat Bekerja	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
15	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.

No	Informasi	Keterangan
16	Status Gelar Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
17	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
18	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

- b. Untuk Debitur badan usaha, bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
3	Bentuk Badan Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
4	<i>Go Public</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
5	Tempat Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
6	Nomor Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
7	Tanggal Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.

No	Informasi	Keterangan
8	Nomor Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
9	Tanggal Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
10	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
11	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
12	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
13	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
14	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
15	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
16	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
17	Peringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
18	Tanggal Pemeringkatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.

No	Informasi	Keterangan
19	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
20	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
21	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

3. Ringkasan Fasilitas

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Total Plafon Efektif	Total Plafon Efektif untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.
2	Total Baki Debet	Total Baki Debet untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.
3	Kualitas Terburuk	Kualitas terburuk dari Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur dalam 12 periode pelaporan terakhir beserta informasi posisi (bulan dan tahun) dari kualitas terburuk tersebut.
4	Jumlah Kreditur	Jumlah kreditur yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur.

4. Kredit atau Pembiayaan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
3	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
4	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
5	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
6	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
7	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
8	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
9	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No	Informasi	Keterangan
10	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
11	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
12	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
13	Kategori Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
14	Jenis Penggunaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
15	Sektor Ekonomi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
16	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
17	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
18	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
19	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
20	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No	Informasi	Keterangan
21	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
22	Nilai Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
23	Plafon Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
24	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
25	Baki Debet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
26	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
27	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
28	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
29	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
30	Tunggakan Pokok	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
31	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No	Informasi	Keterangan
32	Frekuensi Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
33	Denda	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
34	Frekuensi Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
35	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
36	Cara Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
37	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
38	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
39	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
40	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
41	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 12 bulan terakhir.

No	Informasi	Keterangan
42	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 12 bulan terakhir.
43	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
44	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
45	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

5. Surat Berharga

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
3	<i>Sovereign Rate</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
4	<i>Listing</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
5	Peringkat Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.

No	Informasi	Keterangan
6	Tujuan Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
7	Tanggal Terbit	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
8	Tanggal jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
9	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
10	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
11	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
12	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
13	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
14	Nilai Pasar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
15	Nilai Perolehan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
16	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.

No	Informasi	Keterangan
17	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
18	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
19	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
20	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
21	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
22	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
23	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 12 bulan terakhir.
24	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 12 bulan terakhir.
25	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
26	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
27	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

6. *Irrevocable L/C*

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
3	Tanggal Keluar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
5	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
6	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
7	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
8	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
9	Bank <i>Beneficiary</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.

No	Informasi	Keterangan
10	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
11	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
12	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
13	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
14	Tujuan L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
15	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
16	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
17	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
18	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
20	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04 selama 12 bulan terakhir.

No	Informasi	Keterangan
21	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

7. Garansi yang Diberikan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
3	Tanggal Diterbitkan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
5	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
6	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No	Informasi	Keterangan
7	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
8	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
9	Nama yang Dijamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
10	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
11	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
12	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
13	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
14	Tujuan Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
15	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
16	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
17	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No	Informasi	Keterangan
18	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
20	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05 selama 12 bulan terakhir.
21	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
23	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

8. Fasilitas Lain

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2	Jenis Fasilitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
3	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.

No	Informasi	Keterangan
4	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
5	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
6	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
7	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
8	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
9	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
10	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
11	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
12	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
13	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
14	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.

No	Informasi	Keterangan
15	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
16	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
17	Kualitas selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 12 bulan terakhir.
18	Jumlah hari tunggakan selama 12 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 12 bulan terakhir.
19	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
20	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana .
21	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

9. Agunan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Jenis Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
2	Nomor Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
3	Jenis Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.

No	Informasi	Keterangan
4	Tanggal Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
5	Nama Pemilik Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
6	Alamat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
7	Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
8	Nilai Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
9	Tanggal Penilaian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
10	Peringkat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
11	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
12	Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
13	Paripasu	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
14	Nilai Agunan (NJOP atau Nilai Wajar)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.

No	Informasi	Keterangan
15	Nilai Agunan Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
16	Nama Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
17	Tanggal Penilaian Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
18	Asuransi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
19	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
20	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

10. Penjamin

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
2	Nomor Identitas Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
3	Golongan Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
4	Alamat Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.

No	Informasi	Keterangan
5	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
6	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

11. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No	Informasi	Keterangan
1	Nama	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
2	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
3	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
4	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
5	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
6	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
7	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
8	Jabatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.

No	Informasi	Keterangan
9	Status	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
10	Pangsa kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
11	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
12	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen (<i>server</i>) OJK.

D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelapor dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan akses. Pemantauan dapat dilakukan melalui aplikasi SLIK Web oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai supervisor.

BAB IV

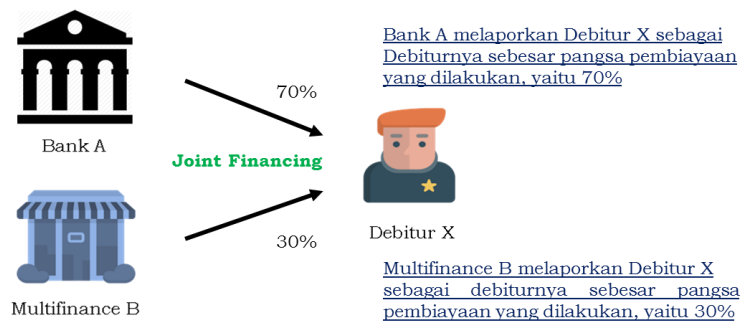
CONTOH PENGISIAN DATA

Bab ini berisi tata cara pelaporan bagi segmen fasilitas yang mempunyai perlakuan khusus terhadap konten data.

A. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Akad Kredit atau Pembiayaan

1. Sindikasi (*Joint Financing*)

Bank melaporkan Debitur yang diberikan fasilitas secara sindikasi berdasarkan besar fasilitas yang langsung dari Bank tersebut. Misalnya Bank A bekerjasama dengan Multifinance B untuk menyediakan kredit kendaraan bermotor kepada Debitur X dengan besar porsi pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari Bank A dan 30% (tiga puluh persen) dari Multifinance B. Berdasarkan contoh tersebut, Bank A dan Multifinance B melaporkan Debitur X sebesar pangsa pembiayaan yang dilakukan. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



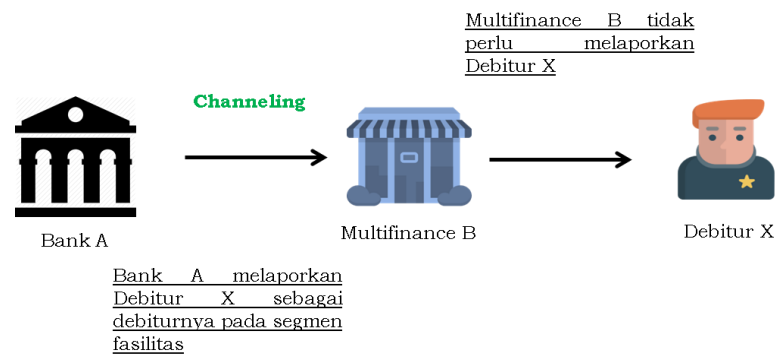
Gambar 8. Skema *Joint Financing*

2. *Joint Account*

Dalam skema *Joint Account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka pada segmen fasilitas, jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debiturnya.

3. *Channeling*

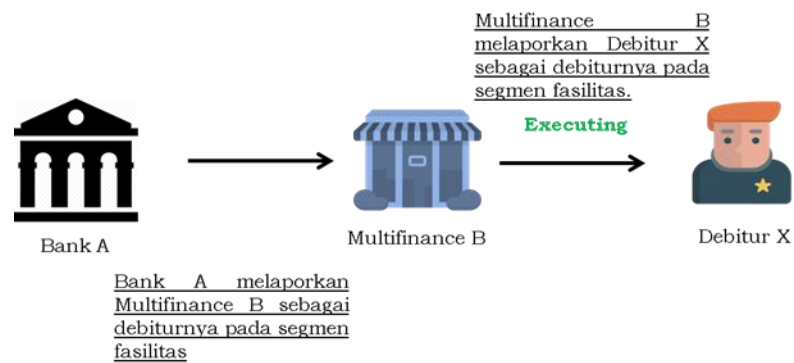
Dalam skema *channeling*, Pelapor yang menanggung risiko akan melaporkan Debitur akhir penerima fasilitas pada segmen Debitur dan fasilitas. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 9. Skema *Channeling*

4. *Executing*

Dalam skema *executing*, setiap pihak yang menerima dana secara langsung maupun tidak langsung, melaporkan masing-masing pihak yang menerima dana pada segmen Debitor dan Fasilitas Penyediaan Dana. Dalam hal ini, Multifinance B menanggung risiko sepenuhnya terhadap kredit yang diberikan kepada Debitor X, dan Bank A tidak memiliki kaitan langsung dengan Debitor X. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Skema *Executing*

B. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Jenis Kredit atau Pembiayaan

1. Kredit atau Pembiayaan Multi Fasilitas

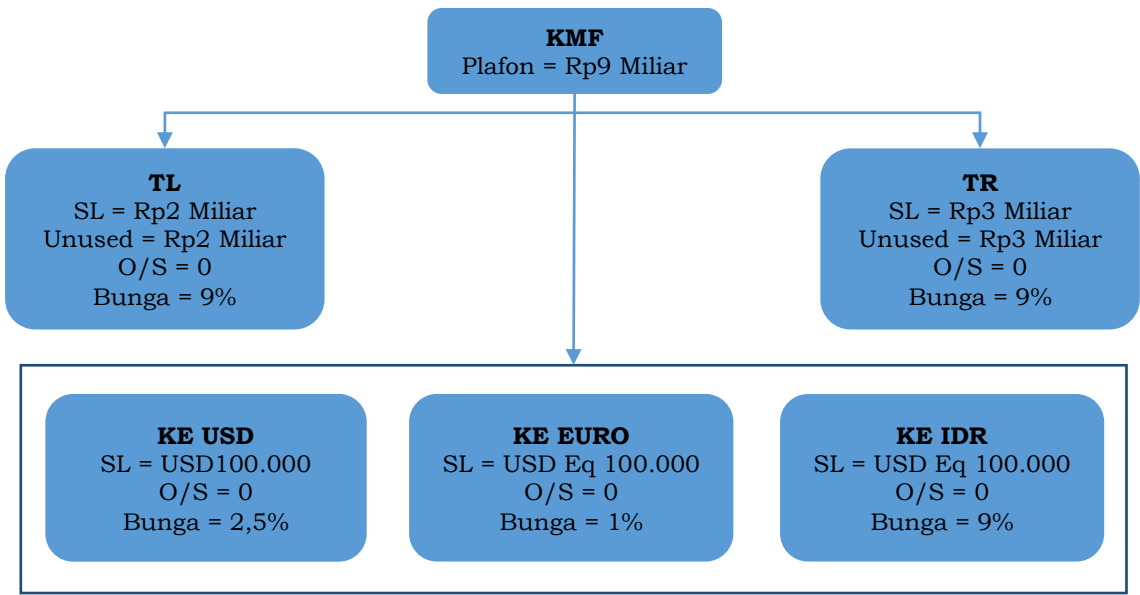
Kredit atau pembiayaan multi fasilitas adalah satu perjanjian kredit atau pembiayaan yang terdiri dari beberapa fasilitas. Pelaporan kredit atau pembiayaan dengan jenis ini dilakukan terhadap masing-masing fasilitas.

Dalam hal pada sistem internal Pelapor 1 (satu) nomor rekening menampung beberapa fasilitas, pada pelaporan SLIK penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut harus tetap unik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan

imbuhan yang digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

Contoh:

Debitur memiliki Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar Rp9 Miliar untuk produk dan sublimit (SL) yang terdiri dari *Time Loan* (TL) sublimit sebesar Rp2 Miliar, Kredit Ekspor (KE) dengan sublimit USD 1 Juta yang bisa digunakan dalam mata uang USD, EUR, dan IDR, serta *Trust Receive* (TR) dengan sublimit Rp3 Miliar. Fasilitas tersebut dicatat ke dalam 1 (satu) nomor rekening, yaitu REK01. Ilustrasi digambarkan sebagai berikut:



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

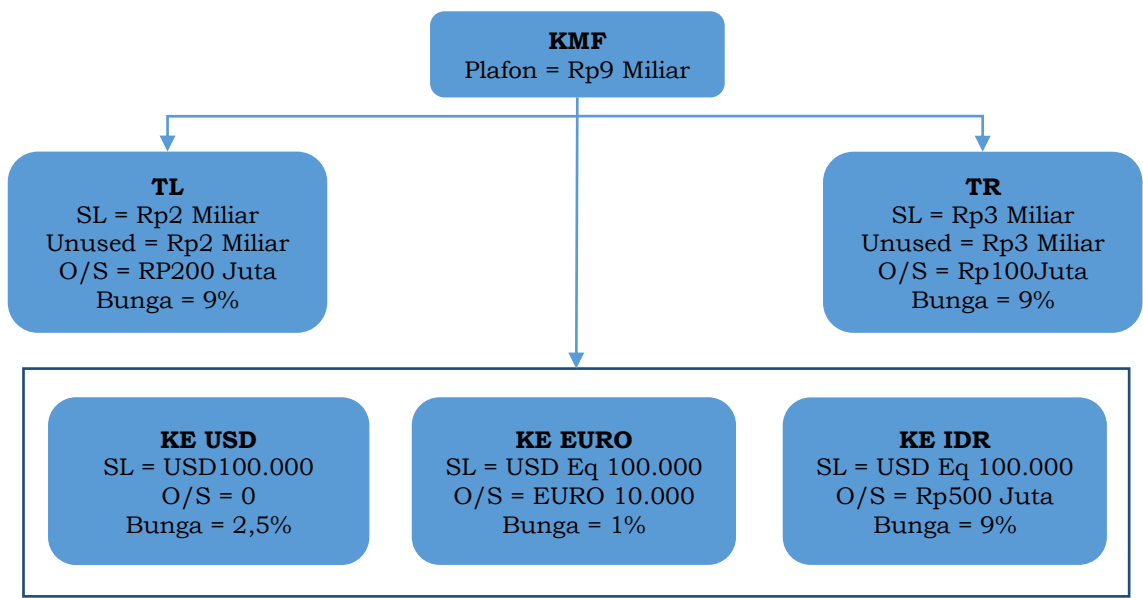
Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas

Pelaporan saat belum ada penarikan (*outstanding*):

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	0
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	0
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	0

Dilakukan penarikan kredit (*outstanding*) sebagai berikut:

- Rek01TL = Rp200 Juta
- Rek01KE02 = EURO10.000
- Rek01KE03 = Rp500 Juta
- Rek01TR = Rp100 Juta



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit

Pelaporan saat dilakukan penarikan kredit:

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	200000000
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	140000000
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	500000000
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	100000000

2. Kredit Rekening Koran

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank A memberikan kredit modal usaha kepada Debitur X sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Penarikan I pada bulan Januari 2017 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2017 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2017 : Rp2.000.000,00

Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah REK001. Pelaporan atas fasilitas tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2017	Rek001	10000000	10000000	5000000
Februari 2017	Rek001	10000000	10000000	8000000
Maret 2017	Rek001	10000000	10000000	10000000

3. Kredit atau Pembiayaan dengan Penarikan Secara Bertahap

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan secara bertahap dan hanya boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur X sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Penarikan I pada bulan Januari 2017 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2017 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2017 : Rp2.000.000,00

Nilai Plafon Awal, Plafon, dan Baki Debet dilaporkan sebagai berikut:

Bulan Data	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2017	10000000	5000000	5000000
Februari 2017	10000000	8000000	8000000
Maret 2017	10000000	10000000	10000000

4. Kredit atau Pembiayaan dengan Plafon Menurun

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (1 Januari 2017 – 31 Mei 2017), dengan besar setiap angsuran adalah Rp2.000.000,- per bulan.

- a. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan dilakukan sekaligus, pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Desember 2016	Penarikan Rp10.000.000,00	10000000	10000000	10000000
Januari 2017	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	8000000	8000000
Februari 2017	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Maret 2017	Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
April 2017	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Mei 2017	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

- b. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

- 1) Penarikan tahap I (1 Desember 2016) : Rp6.000.000,00
2) Penarikan tahap II (1 Maret 2017) : Rp4.000.000,00

Pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Desember 2016	Penarikan I Rp6.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Januari 2017	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Februari 2017	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Maret 2017	Penarikan II Rp4.000.000,00 Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
April 2017	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Mei 2017	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

5. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan

Khusus untuk jenis kredit atau pembiayaan berupa kartu kredit atau kartu pembiayaan, jika dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit atau pembiayaan maka dalam pelaporannya dilakukan dengan melaporkan nilai baki debet dengan 0 (nol) dan kondisi diisi dengan '00' (fasilitas aktif).

Contoh:

Terdapat transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp3.000.000,00. Pada tanggal 12 Februari 2017 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar Rp3.000.000,00. Pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Kondisi
Januari 2017	3000000	00 (Fasilitas Aktif)
Februari 2017	0	00 (Fasilitas Aktif)

Kolom kondisi diisi dengan '02' (Lunas), jika telah dilakukan penutupan pada fasilitas kartu kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan.

6. Kredit atau pembiayaan dengan tunggakan

- a. Dalam hal suatu fasilitas mengalami tunggakan maka besarnya nilai tunggakan pokok dilaporkan pada kolom “tunggakan pokok” dan nilai tunggakan bunga atau imbalan dilaporkan pada kolom “tunggakan bunga atau imbalan”.

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan dengan tunggakan sebesar Rp1.200.000,00. Debitur melakukan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan besar setiap angsuran adalah Rp100.000,00 dan bunga sebesar Rp10.000,00 setiap bulan maka ilustrasi pelaporan sebagai berikut:

- 1) Awal pencairan.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
0	0	1200000	0	0	0

- 2) Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan ke-1, 2, dan 3.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
1	110000	1100000	0	0	0
2	110000	1000000	0	0	0
3	110000	900000	0	0	0

- 3) Pada bulan ke-4, 5, dan 6, Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
4	0	900000	100000	10000	1
5	0	900000	200000	20000	2
6	0	900000	300000	30000	3

- 4) Angsuran bulan ke-7 dibayarkan beserta dengan jumlah tunggakan bulan ke-4, 5 dan 6. Angsuran bulan ke-8 sampai dengan 10 memiliki kualitas “Lancar”, kemudian bulan ke-11 Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran, dan pada bulan ke-12 dibayarkan bersama dengan bulan ke-11.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Frekuensi Tunggakan
7	440000 (<i>angsuran + tunggakan pokok + tunggakan bunga</i>)	500000	0	0	0
8	110000	400000	0	0	0
9	110000	300000	0	0	0
10	110000	200000	0	0	0
11	0	200000	100000	10000	1
12	220000	0	0	0	0

Sesuai dengan ilustrasi di atas, Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan pada bulan ke-11 adalah “1”, yaitu tunggakan pada bulan tersebut. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan ke-4, 5, dan 6 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-7.

- b. Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian maka pelaporan frekuensi tunggakan sesuai dengan angsuran yang menunggak pada bulan tersebut.

Contoh:

Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.600.000,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran Rp10.000,00 per hari.

Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Bulan ke-1

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	10000	3590000	Lancar	0	0
2	10000	3580000	Lancar	0	0
3	0	3580000	Menunggak	10000	1
4	20000	3560000	Angsuran ke-4 + Tunggakan Pokok	0	0
5	10000	3550000	Lancar	0	0
6	0	3550000	Menunggak	10000	1
7	0	3550000	Menunggak	20000	2

...	0	3550000	Menunggak	...	...
30	0	3550000	Menunggak	250000	25

2) Bulan ke-2

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	0	3550000	Menunggak	260000	26
2	0	3550000	Menunggak	270000	27
...	0	3550000	Menunggak	...	...
31	0	3550000	Menunggak	560000	56

Berdasarkan kondisi pada Bulan ke-1 dan 2 maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	3550000	250000	25
2	3550000	560000	56

7. Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Dalam hal terdapat kredit atau pembiayaan *joint account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debitur.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur kelompok tani dalam rangka membantu swasembada pangan. Kelompok tani tersebut terdiri dari 5 (lima) orang maka pelaporan fasilitas dilakukan sebanyak 5 (lima) baris sebagai berikut:

Nomor Rekening	CIF Debitur	Sequence Debitur
RekTani001	CIFTANI001	1
RekTani001	CIFTANI002	2
RekTani001	CIFTANI003	3
RekTani001	CIFTANI004	4
RekTani001	CIFTANI005	5

8. Giro Bersaldo Debet

Giro Bersaldo Debet merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit atau pembiayaan.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening giro dengan saldo sebesar Rp1.000.000,00. Pada bulan April 2017 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp2.200.000,00. Nilai transaksi tersebut melebihi saldo giro yang dimiliki, akibatnya terjadi cerukan (*overdraft*) terhadap saldo rekening giro. *Overdraft* sebesar Rp1.200.000,00 tersebut harus dilaporkan sebagai giro bersaldo debet. Pada tanggal 15 Mei 2017 dilakukan pembayaran terhadap *overdraft* tersebut maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
April 2017	RekGiro01	1200000	00 (Aktif)	
Mei 2017	RekGiro01	0	02 (Lunas)	20170515

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2017, dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp3.000.000,- yang kemudian dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2017. Untuk pelaporannya, ditambahkan imbuhan pada nomor rekening jika status rekening giro sebelumnya telah dilaporkan lunas, sehingga pelaporannya dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
Juni 2017	RekGiro01B	2000000	00 (Aktif)	
Juli 2017	RekGiro01B	0	02 (Lunas)	20170718

C. Fasilitas *Irrevocable L/C*

Untuk fasilitas L/C yang diberikan dalam bentuk rekening komitmen dan dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) fasilitas L/C maka pada saat fasilitas belum direalisasikan yang dilaporkan adalah rekening komitmen, kemudian pada saat fasilitas direalisasikan

pelaporan dilakukan terhadap masing-masing fasilitas dengan menggunakan nomor rekening yang unik.

1. Rekening Komitmen dengan Plafon *Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *revolving* adalah rekening komitmen yang dapat digunakan berulang-ulang sesuai kebutuhan nasabah selama plafon masih tersedia dan rekening komitmen belum jatuh tempo.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Atas fasilitas tersebut, Debitur dapat menggunakannya secara *revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	500000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 5) Pelaporan bulan ke-5, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp250 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	250000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC04	250000000	250000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 6) Pelaporan bulan ke-6, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC02, LC03, LC04, dan rekening komitmen jatuh tempo.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	02 (Lunas)
REK001LC02	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC03	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC04	0	0	1	02 (Lunas)

2. Rekening Komitmen dengan Plafon *Non-Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *non-revolving* adalah rekening komitmen yang hanya dapat digunakan 1 (satu) kali.

Contoh:

Bank A memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Debitur menggunakan fasilitas tersebut secara *non-revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur).

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	08 (Dialihkan ke Fasilitas Lain)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

D. Fasilitas Surat Berharga

Bank A membeli 100 unit surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000.000,00 dan membayar dengan harga *at discount* sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 1 Januari 2017. Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2017 turun sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga perolehan.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = $\text{Rp}10.000.000,00 \times 100 = \text{Rp}1.000.000.000,00$
- Nilai Perolehan = $\text{Rp}9.000.000,00 \times 100 = \text{Rp}900.000.000,00$
- Nilai Pasar = $\text{Rp}8.100.000,00 \times 100 = \text{Rp}810.000.000,00$

Pelaporan bulan Januari 2017

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	1000000000	810000000	900000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada tanggal 25 Februari 2017, Bank A menjual 50 unit surat berharga SB01. Nilai pasar di akhir bulan Februari naik sebesar 5% (lima persen) dari nilai akhir bulan lalu.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = $\text{Rp}10.000.000,00 \times 50 = \text{Rp}1.000.000.000,00$
- Nilai Perolehan = $\text{Rp}9.000.000,00 \times 50 = \text{Rp}900.000.000,00$
- Nilai Pasar = $\text{Rp}8.505.000,00 \times 50 = \text{Rp}425.250.000,00$

Pelaporan bulan Februari 2017

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	500000000	425250000	450000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada bulan Maret 2017, Bank A menjual kembali 50 unit surat berharga SB01.

Pelaporan bulan Maret 2017

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	0	0	0	02 (Lunas)

E. Agunan Paripasu

Agunan paripasu adalah agunan yang digunakan untuk menjamin lebih dari 1 (satu) fasilitas. Pelaporan agunan dilakukan dengan menyertakan nilai persentase paripasu untuk masing-masing fasilitas. Pelaporan agunan dengan paripasu adalah pemakaian agunan untuk 1 (satu) kode Pelapor dengan lebih dari 1 (satu) nomor rekening yang berbeda.

Contoh:

Debitur A memperoleh 3 (tiga) jenis fasilitas kredit dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN001. Nilai persentase paripasu sesuai dengan akad kredit adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk REK001A, 25% (dua puluh lima persen) untuk REK001B, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk REK001C. Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	C
AGN001	REK001B	Y	25	C
AGN001	REK001C	Y	45	C

Dalam hal persentase paripasu tidak ditetapkan dalam akad kredit atau akad pembiayaan maka persentase paripasu dilaporkan secara proporsional atau sesuai dengan kebijakan masing-masing Pelapor.

Pada saat Debitur A melakukan pelunasan terhadap fasilitas REK001A dan REK001C maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	D
AGN001	REK001B	T		U
AGN001	REK001C	Y	45	D

BAB V
DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI

No	Sektor Ekonomi	Kode
1	Pertanian Padi	011110
2	Pertanian Palawija Jagung	011121
3	Pertanian Palawija Ketela Pohon	011122
4	Pertanian Palawija Ubi Jalar	011123
5	Pertanian Palawija Umbi-umbian Lain	011124
6	Pertanian Palawija Kacang Tanah	011125
7	Pertanian Palawija Kedelai	011126
8	Pertanian Palawija Kacang-kacangan Lain	011129
9	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lain	011130
10	Perkebunan Tembakau	011140
11	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lain	011150
12	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	011160
13	Perkebunan Tanaman Obat atau Bahan Farmasi	011170
14	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	011180
15	Perkebunan Tanaman Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011190
16	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Bawang Merah	011211
17	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Lain	011219
18	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali	011220
19	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Anggrek	011231
20	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Lain	011239
21	Pertanian Tanaman Hias Lain	011240
22	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	011250
23	Pertanian Buah-buahan Musiman Jeruk	011311
24	Pertanian Buah-buahan Musiman Lain	011319
25	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Pisang	011321
26	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lain	011329
27	Perkebunan Kelapa	011330
28	Perkebunan Kelapa Sawit	011340
29	Perkebunan Tanaman Kopi	011351
30	Perkebunan Tanaman Teh	011352
31	Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)	011353
32	Perkebunan Jambu Mete	011360
33	Perkebunan Lada	011370
34	Perkebunan Cengkeh	011380

No	Sektor Ekonomi	Kode
35	Perkebunan Tanaman Rempah Vanili	011391
36	Perkebunan Tanaman Rempah Pala	011392
37	Perkebunan Tanaman Rempah yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011399
38	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	012110
39	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	012191
40	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	012192
41	Pembibitan dan Budidaya Babi	012210
42	Pembibitan dan Budidaya Unggas	012291
43	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (<i>Mixed Farming</i>)	013000
44	Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	014000
45	Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	015000
46	Pengusahaan Hutan Tanaman	020100
47	Pengusahaan Hutan Alam	020200
48	Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	020300
49	Jasa Kehutanan	020400
50	Usaha Kehutanan Lain	020500
51	Penangkapan Ikan Tuna	050111
52	Penangkapan Ikan Lain	050119
53	Penangkapan Udang Laut	050121
54	Penangkapan <i>Crustacea</i> Lain di Laut	050122
55	Perikanan Lain	050190
56	Budidaya Biota Laut Udang	050211
57	Budidaya Biota Laut Tuna	050212
58	Budidaya Biota Laut Rumput Laut	050213
59	Budidaya Biota Laut Lain	050219
60	Pembenihan Biota Laut	050220
61	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	050310
62	Penangkapan <i>Crustacea</i> , <i>Mollusca</i> , dan Biota Lain di Perairan Umum	050320
63	Budidaya Biota Air Tawar Udang	050411
64	Budidaya Biota Air Tawar Lain	050419
65	Budidaya Biota Air Payau Udang	050421
66	Budidaya Biota Air Payau Lain	050429
67	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	050490
68	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	050510
69	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	050580
70	Jasa Perikanan Lain	050590
71	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi	101000

No	Sektor Ekonomi	Kode
	Batubara	
72	Pembuatan Briket Batubara	102000
73	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	111010
74	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	111020
75	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	112000
76	Pertambangan Bijih Uranium dan <i>Thorium</i>	120000
77	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	131000
78	Pertambangan Bijih Timah	132010
79	Pertambangan Bijih Bauksit	132020
80	Pertambangan Bijih Tembaga	132030
81	Pertambangan Bijih Nikel	132040
82	Pertambangan Emas	132061
83	Pertambangan Perak	132062
84	Bahan Galian Lain yang Tidak Mengandung Bijih Besi	132090
85	Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir	141000
86	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk	142100
87	Ekstraksi Garam	142200
88	Pertambangan dan Penggalian Lain	142900
89	Industri Pemotongan Hewan	151110
90	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	151120
91	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lain	151200
92	Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-buahan, dan Sayuran	151300
93	Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	151410
94	Industri Minyak Goreng dari Kelapa	151430
95	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	151440
96	Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit	151450
97	Industri Susu dan Makanan dari Susu	152000
98	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	153110
99	Industri Kopra	153180
100	Industri Penggilingan Lain	153190
101	Industri Tepung dan Pati	153200
102	Industri Pakan Ternak	153300
103	Industri Makanan Lain	154000
104	Industri Roti dan Sejenisnya	154100
105	Industri Gula dan Pengolahan Gula	154200
106	Industri Coklat dan Kernbang Gula	154300
107	Industri Makaroni, Mi, Spageti, Bihun, Sohun, dan Sejenisnya	154400
108	Industri Pengolahan Teh	154911

No	Sektor Ekonomi	Kode
109	Industri Pengolahan Kopi	154912
110	Industri Kecap	154930
111	Industri Tempe dan Tahu	154940
112	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	154990
113	Industri Minuman	155000
114	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	160010
115	Industri Rokok	160050
116	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lain	160090
117	Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	171000
118	Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	172000
119	Industri Perajutan	173000
120	Industri Kapuk	174000
121	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	181000
122	Industri Pakaian Jadi atau Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	182000
123	Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	191000
124	Industri Alas Kaki	192000
125	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	201000
126	Industri Kayu Lapis, <i>Veneer</i> , dan Sejenisnya	202100
127	Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu	202900
128	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton atau <i>Paper Board</i>	210100
129	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	210200
130	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	210900
131	Industri Penerbitan	221000
132	Industri Percetakan dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Pencetakan Termasuk Reproduksi atau Cetak Ulang)	222000
133	Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	223000
134	Industri Barang-barang dari Batubara	231000
135	Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	232000
136	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (<i>Nuclear Fuel</i>)	233000
137	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	241100
138	Industri Pupuk	241200
139	Industri Plastik dan Karet Buatan	241300
140	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama dan Pemberantas	242100

No	Sektor Ekonomi	Kode
	Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh	
141	Industri Cat, Pernis, dan Lak	242200
142	Industri Farmasi dan Jamu	242300
143	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik, dan Sejenisnya	242400
144	Industri Minyak Atsiri	242940
145	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lain	242990
146	Industri Serat Buatan	243000
147	Industri Pengasapan Karet	251210
148	Industri <i>Remilling</i> Karet	251220
149	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	251230
150	Industri Barang-barang lain dari Karet	251900
151	Industri Barang dari Plastik	252000
152	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	261000
153	Industri Barang-barang dari Porselin	262000
154	Industri Pengolahan Tanah Liat atau Keramik	263000
155	Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	264000
156	Industri Barang-barang dari Batu	265000
157	Industri Barang-barang dari Asbes	266000
158	Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Lain	269000
159	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	271000
160	Industri Logam Dasar Bukan Besi	272000
161	Industri Pengecoran Besi dan Baja	273100
162	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	273200
163	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap	281000
164	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan lain dari Logam	289300
165	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	289900
166	Industri Mesin-mesin Umum	291000
167	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikan	292100
168	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi	292400
169	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	292500
170	Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-barang dari Kulit	292600

No	Sektor Ekonomi	Kode
171	Industri Mesin-mesin Khusus Lain	292900
172	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	293000
173	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	300000
174	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	311000
175	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	312000
176	Industri Kabel Listrik dan Telepon	313000
177	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	314000
178	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	315000
179	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	319000
180	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya	321000
181	Industri Alat Transmisi Komunikasi	322000
182	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	323000
183	Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-alat Optik	331000
184	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	332000
185	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya	333000
186	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	341000
187	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	342000
188	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	343000
189	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	351000
190	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api	352000
191	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya serta Perbaikan Pesawat Terbang	353000
192	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan Perlengkapannya	359100
193	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	359900
194	Industri Furnitur	361000
195	Industri Pengolahan Lain	369000
196	Daur Ulang Barang-barang Logam	371000
197	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	372000
198	Ketenagalistrikan Pedesaan	401001

No	Sektor Ekonomi	Kode
199	Ketenagalistrikan Lain	401002
200	Gas	402000
201	Uap dan Air Panas	403000
202	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	410000
203	Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)	451001
204	Pencetakan Lahan Sawah	451002
205	Penyiapan Lahan Lain	451009
206	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	452000
207	Konstruksi Perumahan Sederhana-Bank Tabungan Negara	452111
208	Konstruksi Perumahan Sederhana-Perumnas	452112
209	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe s.d. 21	452113
210	Konstruksi Perumahan Sederhana-Lainnya Tipe 22 s.d. 70	452114
211	Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe Diatas 70)	452115
212	Konstruksi Gedung Perkantoran	452120
213	Konstruksi Gedung Industri	452130
214	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres	452141
215	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lain	452149
216	Konstruksi Gedung Lain	452190
217	Bangunan Jalan Raya	452211
218	Bangunan Jalan Tol	452212
219	Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan	452213
220	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api	452220
221	Bangunan Pengairan (Irigasi)	452240
222	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)	452270
223	Bangunan Sipil Lain	452290
224	Konstruksi Bangunan Listrik Pedesaan	452301
225	Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lain	452309
226	Konstruksi Khusus	452400
227	Instalasi Gedung	453100
228	Instalasi Bangunan Sipil	453200
229	Penyelesaian Konstruksi Gedung	454000
230	Penghancur Bangunan dengan Operator	455000
231	Penjualan Mobil	501000
232	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	502000
233	Penjualan Sepeda Motor	503001
234	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor	503002
235	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	504000
236	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	511000
237	Perdagangan Jagung	512111

No	Sektor Ekonomi	Kode
238	Perdagangan Tembakau	512112
239	Perdagangan Karet	512113
240	Perdagangan Cengkeh	512114
241	Perdagangan Lada	512115
242	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit	512116
243	Perdagangan Kapas	512117
244	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lain	512119
245	Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup	512120
246	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan	512130
247	Perdagangan Kayu	512141
248	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lain	512149
249	Perdagangan Dalam Negeri Beras	512201
250	Perdagangan Dalam Negeri Gula	512202
251	Perdagangan Dalam Negeri Kopi	512203
252	Perdagangan Dalam Negeri Teh	512204
253	Perdagangan Dalam Negeri Garam	512205
254	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit	512206
255	Perdagangan Dalam Negeri Kopra	512207
256	Perdagangan Dalam Negeri Rokok	512208
257	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lain	512209
258	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	513100
259	Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	513900
260	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis	514100
261	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	514200
262	Perdagangan Dalam Negeri Semen	514301
263	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton	514302
264	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-bahan Konstruksi Lain	514309
265	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama	514901
266	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lain	514909
267	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	515000
268	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran	519001
269	Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	519009
270	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau	521100

No	Sektor Ekonomi	Kode
271	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman, dan Tembakau	521900
272	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	522100
273	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	522200
274	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	523100
275	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	523200
276	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	523300
277	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi	523400
278	Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	523500
279	Perdagangan Eceran Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	523600
280	Perdagangan Eceran Mesin-mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang, termasuk Alat-alat Transportasi	523700
281	Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	523800
282	Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	523900
283	Perdagangan Eceran Barang Bekas	524000
284	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian	525100
285	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan	525200
286	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	525300
287	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	525400
288	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	525500
289	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas	525600
290	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	525700
291	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	525800
292	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-barang Bekas	525900
293	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lain	526000

No	Sektor Ekonomi	Kode
294	Perdagangan Eceran Melalui Media	527100
295	Perdagangan Eceran Keliling	527200
296	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	531000
297	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit	532111
298	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	532112
299	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lain	532119
300	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	532120
301	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	532130
302	Perdagangan Ekspor Kayu	532141
303	Perdagangan Ekspor Rotan	532142
304	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan	532149
305	Perdagangan Ekspor Udang Olahan	532201
306	Perdagangan Ekspor Teh	532202
307	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk	532203
308	Perdagangan Ekspor Tembakau	532204
309	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lain	532209
310	Perdagangan Ekspor Tekstil	533101
311	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi	533102
312	Perdagangan Ekspor Kulit	533103
313	Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	533900
314	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	534100
315	Perdagangan Ekspor Bijih Timah	534201
316	Perdagangan Ekspor Bijih Logam Selain Timah	534202
317	Perdagangan Ekspor Batu Bara	534203
318	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lain	534209
319	Perdagangan Ekspor Kayu Lapis	534301
320	Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalian) Lain	534309
321	Perdagangan Ekspor Produk Antara (<i>Intermediate Products</i>), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	534900
322	Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	535000
323	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian	539011
324	Perdagangan Ekspor Kopi Biji	539012
325	Perdagangan Ekspor Tembakau	539013
326	Perdagangan Ekspor Karet	539014

No	Sektor Ekonomi	Kode
327	Perdagangan Ekspor Lada	539015
328	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah	539016
329	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit	539017
330	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra	539018
331	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lain	539019
332	Perdagangan Ekspor Hewan yang Sudah Diolah	539021
333	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lain	539022
334	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi	539023
335	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lain	539029
336	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan	539031
337	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan selain dari Kayu dan Rotan	539032
338	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi	539034
339	Perdagangan Ekspor yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	539039
340	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	541000
341	Perdagangan Impor Cengkeh	542101
342	Perdagangan Impor Biji Gandum	542102
343	Perdagangan Impor Jagung	542103
344	Perdagangan Impor Kacang Kedelai	542104
345	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian dan Binatang Hidup Lain	542109
346	Perdagangan Impor Beras	542201
347	Perdagangan Impor Gula	542202
348	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lain	542209
349	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	543100
350	Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	543900
351	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis	544100
352	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam	544200
353	Perdagangan Impor Besi Beton	544301
354	Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi Lain	544309
355	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama	544901
356	Perdagangan Impor Farmasi	544902
357	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya	544909
358	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri	545001
359	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan Lain	545009

No	Sektor Ekonomi	Kode
360	Perdagangan Impor Lain	549000
361	Hotel Bintang	551100
362	Hotel Melati	551200
363	Jasa Akomodasi Lain	551900
364	Restoran atau Rumah Makan	552100
365	Penyediaan Makan Minum Lain	552009
366	Angkutan Jalan Rel	601000
367	Angkutan Jalan Dalam Trayek untuk Penumpang	602100
368	Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek untuk Penumpang	602200
369	Angkutan Jalan untuk Barang	602300
370	Angkutan Dengan Saluran Pipa	603000
371	Angkutan Laut Domestik	611100
372	Angkutan Laut Internasional	611200
373	Angkutan Sungai dan Danau	612100
374	Angkutan Penyeberangan Domestik	612200
375	Angkutan Udara Berjadwal	621000
376	Angkutan Udara Tidak Berjadwal	622000
377	Angkutan Udara Khusus	623000
378	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	631000
379	Pergudangan, Jasa <i>Cold Storage</i> , dan Jasa Wilayah Berikat	632000
380	Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	633000
381	Jasa Perjalanan Wisata	634000
382	Jasa Pengiriman dan Pengepakan	635000
383	Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir	641000
384	Jaringan Telekomunikasi	642000
385	Jasa Telekomunikasi	643000
386	Telekomunikasi Khusus	644000
387	Perantara Moneter (Bank)	651000
388	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) <i>Leasing</i>	659001
389	Perantara Keuangan Lainnya (Non-Bank) Selain <i>Leasing</i>	659009
390	Asuransi dan Dana Pensiun	660000
391	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	671000
392	Jasa Penukaran Mata Uang atau Pedagang Valuta Asing (<i>Money Changer</i>)	671001
393	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Lain	671002
394	Jasa Penunjang Asuransi dan dana Pensiun	672000
395	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Perumnas	701001

No	Sektor Ekonomi	Kode
396	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Selain Perumnas sampai dengan Tipe 21	701002
397	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana-Selain Perumnas Tipe 22 sampai dengan 70	701003
398	<i>Real Estate</i> Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)	701004
399	<i>Real Estate</i> Perumahan Flat atau Apartemen	701005
400	<i>Real Estate</i> Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	701006
401	<i>Real Estate</i> Gedung Perkantoran	701007
402	<i>Real Estate</i> Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	701008
403	<i>Real Estate</i> Lain	701009
404	<i>Real Estate</i> atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	702000
405	Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	703000
406	Persewaan Alat Transportasi Darat	711100
407	Persewaan Alat Transportasi Air	711200
408	Persewaan Alat Transportasi Udara	711300
409	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	712100
410	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil, dan Peralatannya	712200
411	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk Komputer)	712300
412	Persewaan Mesin Lain dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	712900
413	Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	713000
414	Jasa Konsultasi Piranti Keras (<i>Hardware Consulting</i>)	721000
415	Jasa Konsultasi Piranti Lunak (<i>Software Consulting</i>)	722000
416	Pengolahan Data	723000
417	Jasa Kegiatan Pangkalan Data (<i>Database</i>)	724000
418	Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	725000
419	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer	729000
420	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	731000
421	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	732000
422	Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	741000

No	Sektor Ekonomi	Kode
423	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan <i>Testing</i>	742000
424	Jasa Periklanan	743000
425	Jasa Perusahaan Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	749000
426	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijaksanaan Ekonomi dan Sosial	751000
427	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan	752000
428	Jaminan Sosial Wajib	753000
429	Jasa Pendidikan Dasar	801000
430	Jasa Pendidikan Menengah	802000
431	Jasa Pendidikan Tinggi	803000
432	Jasa Pendidikan Lain	804000
433	Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit	851001
434	Jasa Kesehatan Manusia-Poliklinik atau Rumah Bersalin	851002
435	Jasa Kesehatan Manusia-Tempat Perawatan atau Pengobatan	851003
436	Jasa Kesehatan Manusia-Profesi Dokter	851004
437	Jasa Kesehatan Hewan	852000
438	Jasa Kegiatan Sosial	853000
439	Jasa Kebersihan	900000
440	Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional	910000
441	Organisasi Buruh	912000
442	Organisasi Lain	919000
443	Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lain	921000
444	Kegiatan Kantor Berita	922000
445	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lain	923000
446	Jasa Kegiatan Lain	930000
447	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	950000
448	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lain	990000
449	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Perorangan	000001
450	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya-Badan Usaha	000002
451	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal	001100
452	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	001110
453	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	001120
454	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	001130
455	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen sampai dengan Tipe 21	001210

No	Sektor Ekonomi	Kode
456	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	001220
457	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	001230
458	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	001300
459	Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat	002100
460	Rumah Tangga untuk Pemilikan Sepeda Bermotor	002200
461	Rumah Tangga untuk Pemilikan Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam atau Lebih	002300
462	Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor Lain	002900
463	Rumah Tangga untuk Pemilikan Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga	003100
464	Rumah Tangga untuk Pemilikan Televisi, Radio, dan Alat Elektronik	003200
465	Rumah Tangga untuk Pemilikan Komputer dan Alat Komunikasi	003300
466	Rumah Tangga untuk Pemilikan Peralatan Lain	003900
467	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal sampai dengan Tipe 21	004120
468	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe 22 sampai dengan 70	004130
469	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Rumah Tinggal Tipe diatas 70	004140
470	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen sampai dengan Tipe 21	004150
471	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Apartemen Tipe 22 sampai dengan 70	004160
472	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Tipe diatas 70	004170
473	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain-Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Beragunan Ruko atau Rukan	004180
474	Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna Lain	004190

No	Sektor Ekonomi	Kode
475	Rumah Tangga untuk Keperluan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	004900
476	Bukan Lapangan Usaha Lain	009000

BAB VI
DAFTAR KODE NEGARA

No	Nama Negara	Kode Negara
1	Afghanistan	AF
2	Albania	AL
3	Algeria/Aljazair	DZ
4	America Samoa	AS
5	Andorra	AD
6	Angola	AO
7	Anguilla	AI
8	Antartica	AQ
9	Antigua and Barbuda	AG
10	Argentina	AR
11	Armenia	AM
12	Aruba	AW
13	Australia	AU
14	Austria	AT
15	Azerbaijan	AZ
16	Bahamas	BS
17	Bahrain	BH
18	Bangladesh	BD
19	Barbados	BB
20	Belarus	BY
21	Belgium	BE
22	Benin	BJ
23	Belize	BZ
24	Bermuda	BM
25	Bhutan	BT
26	Bolivia	BO
27	Bosnia-Herzegovina	BA
28	Botswana	BW
29	Bouvet Island	BV
30	Brazil	BR
31	British Indian Ocean Territory	IO
32	Brunei Darussalam	BN
33	Bulgaria	BG
34	Burkina Faso	BF
35	Burundi	BI
36	Cambodia	KH
37	Cameroon	CM

No	Nama Negara	Kode Negara
38	Canada	CA
39	Cape Verde	CV
40	Cayman Islands	KY
41	Central African Republic	CF
42	Chad	TD
43	Chile	CL
44	China	CN
45	Christmas Islands	CX
46	Cocos (Keeling) Island	CC
47	Clombia	CO
48	Comoros	KM
49	Congo	CG
50	Congo, The Democratic Republic of The	CD
51	Cook Island	CK
52	Costa Rica	CR
53	Croatia	HR
54	Cuba	CU
55	Cyprus	CY
56	Czech Republic	CZ
57	Denmark	DK
58	Djibouti	DJ
59	Dominican Republic	DO
60	Dominica	DM
61	Ecuador	EC
62	Egypt	EG
63	El Salvador	SV
64	Equatorial Guinea	GQ
65	Eritrea	ER
66	Estonia	EE
67	Ethiopia	ET
68	European Community	EUR
69	Falkland Islands (Malvinas)	FK
70	Faroe Islands	FO
71	Fiji	FJ
72	Finland	FI
73	France	FR
74	France, Metropolitan	FX
75	French Guiana	GF
76	French Polynesia	PF
77	French Southern Territories	TF

No	Nama Negara	Kode Negara
78	Gabon	GA
79	Gambia	GM
80	Georgia	GE
81	Germany	DE
82	Ghana	GH
83	Gibraltar	GI
84	Greenland	GL
85	Grenada	GD
86	Guadeloupe	GP
87	Guam	GU
88	Guatemala	GT
89	Guinea	GN
90	Guinea Bissau	GW
91	Guyana	GY
92	Haiti	HT
93	Heard and McDonald Island	HM
94	Honduras	HN
95	Hongkong	HK
96	Hungary	HU
97	Iceland	IS
98	India	IN
99	Indonesia	ID
100	Iran	IR
101	Iraq	IQ
102	Ireland	IE
103	Israel	IL
104	Italia	IT
105	Ivory Coast	CI
106	Jamaica	JM
107	Japan	JP
108	Jordan	JO
109	Kazakhstan	KZ
110	Kenya	KE
111	Kiribati	KI
112	Korea Selatan	KR
113	Korea Utara	KP
114	Kuwait	KW
115	Kyrgyzstan	KG
116	Lao People's Democ.Rep.	LA
117	Latvia	LV

No	Nama Negara	Kode Negara
118	Lebanon	LB
119	Lesotho	LS
120	Liberia	LR
121	Libyan Arab Jamahiriya	LY
122	Liechtenstein	LI
123	Lithuania	LT
124	Luxembourg	LU
125	Macau	MO
126	Macedonia	MK
127	Madagascar	MG
128	Malawi	MW
129	Malaysia	MY
130	Maldives	MV
131	Mali	ML
132	Malta	MT
133	Marshall Islands	MH
134	Martinique	MQ
135	Mauritania	MR
136	Mauritius	MU
137	Mayotte	YT
138	Mexico	MX
139	Micronesia, Federated State of	FM
140	Maldova, Republic of	MD
141	Monaco	MC
142	Mongolia	MN
143	Montserrat	MS
144	Morocco	MA
145	Mozambique	MZ
146	Myanmar (Burma)	MM
147	Namibia	NA
148	Nauru	NR
149	Nepal	NP
150	Netherlands	NL
151	Netherlands Antilles	AN
152	New Caledonia	NC
153	New Zealand	NZ
154	Nicaragua	NI
155	Nieue	NU
156	Niger	NE
157	Nigeria	NG

No	Nama Negara	Kode Negara
158	Norfolk Islands	NF
159	Northern Mariana Island	MP
160	Norway	NO
161	Oman	OM
162	Pakistan	PK
163	Palau	PW
164	Panama	PA
165	Papua New Guinea	PG
166	Paraguay	PY
167	Peru	PE
168	Philippines	PH
169	Pitcairn	PN
170	Poland	PL
171	Portugal	PT
172	Puerto Rico	PR
173	Qatar	QA
174	Reunion	RE
175	Romania	RO
176	Russian Federation	RU
177	Rwanda	RW
178	Saint Lucia	LC
179	Samoa	WS
180	San Marino	SM
181	Sao Tome & Principe	ST
182	Saudi Arabia	SA
183	Senegal	SN
184	Seychelles	SC
185	Siera Leone	SL
186	Singapore	SG
187	Slovakia (Slovak Republic)	SK
188	Slovenia	SI
189	Solomon Islands	SB
190	Somalia	SO
191	South Africa	ZA
192	South Georgia and The South	GS
193	Spain	ES
194	Sri Langka / Ceylon	LK
195	St. Helena	SH
196	St. Kittand Nevis/Saint Kitts C.and Nevis	KN
197	St. Pierre & Miquelon	PM

No	Nama Negara	Kode Negara
198	St. Vincent & The Grenades	VC
199	Sudan	SD
200	Suriname	SR
201	Svalbard and Jan Mayen Island	SJ
202	Swaziland	SZ
203	Swedia/Sweden	SE
204	Swiss/Switzerland	CH
205	Syrian Arab Republic	SY
206	Taiwan/Republic of China/Province of China	TW
207	Tajikistan	TJ
208	Tanzania (Taganzica & Zanzibar)	TZ
209	Thailand	TH
210	Timor Leste	TL
211	Tokelau	TK
212	Tonga	TO
213	Trinidad & Tobago	TT
214	Tunisia	TN
215	Turkey	TR
216	Turkmenistan	TM
217	Turks & Caicos Island	TC
218	Tuvalu	TV
219	Uganda	UG
220	Ukraine	UA
221	United Arab Emirat	AE
222	United Kingdom	GB
223	United States of America	US
224	Uruguay	UY
225	US Minor Outlying Islands	UM
226	Uzbekistan	UZ
227	Vanuatu	VU
228	Vatican City State (Holy See)	VA
229	Venezuela	VE
230	Vietnam	VN
231	Virgin Islands (British)	VG
232	Virgin Islands (US)	VI
233	Wallis and Futuna Islands	WF
234	West Africa	XO
235	Western Sahara	EH
236	Yemen	YE
237	Yugoslavia	YU

No	Nama Negara	Kode Negara
238	Yunani	GR
239	Zambia	ZM
240	Zimbabwe	ZW

BAB VII
DAFTAR KODE VALUTA

No	Nama Valuta	Kode
1	Afghanistan Afghani	AFN
2	Albanian Lek	ALL
3	Algerian Dinar	DZD
4	US Dollar	USD
5	Andorran Peseta	ADP
6	French Franc	FRF
7	Spanish Peseta	ESO
8	Angokan Kwanza	AOA
9	East Caribbean Dollar	XCD
10	Norwegian Krone	NOK
11	Argentine Peso	ARS
12	Armenian Dram	AMD
13	Aruban Guider	AWG
14	Australian Dollar	AUD
15	Austrian Schilling	ATS
16	Azerbaijan Mant	AZM
17	Bahamas Dollar	BSD
18	Bahraini Dinar	BHD
19	Bangladesh Taka	BDT
20	Barbados Dollar	BBD
21	Belarus Rouble	BYR
22	Belgian Franc	BEF
23	Belize Dollar	BZD
24	CFA Franc BCEAO	XOF
25	Bermudian Dollar	BMD
26	Indian Rupee	INR
27	Bhutan Ngultrum	BTN
28	Bolivian Boliviano	BOB
29	Bosnia-Herze Conv Marka	BAM
30	Botswana Pula	BWP
31	Brazilian Real	BRL
32	Pound Sterling (United Kingdom Pound)	GBP

No	Nama Valuta	Kode
33	Seychelles Rupee	SCR
34	Brunei Dollar	BND
35	Bulgarian Lev	BEN
36	Burundi Franc	BIF
37	Cambodia Riel	KHR
38	Franc de la Communaute Finaniere Africaine	XAF
39	Chilean Peso	CLP
40	Chilean Fomento	CLF
41	China Renminbi	CNY
42	China Offshore Yuan	CNH
43	Colombian Peso	COP
44	Comoros Franc	KMF
45	Democratic Rep. Congo Franc	CDF
46	New Zealand Dollar	NZD
47	Costa Rican Colon	CRC
48	Croatian Kuna	HRK
49	Cuban Peso	CUP
50	Cypriot Pound	CYP
51	Czech Koruna	CZK
52	Danish Krone	DKK
53	Djibouti Franc	DJF
54	Dominican Republic Peso	DOP
55	Ecuadorian Sucre	ECS
56	Egyptian Pound	EGP
57	El Savador Colon	SVC
58	Eritrean Nakfa	ERN
59	Estonian Kroon	EEK
60	Ethiopian Birr	ETB
61	European Community	EURO
62	Falkland Islands Pound	FKP
63	Fiji Dollar	FJD
64	Finnis Markka	FIM
65	Franc Pacific Is.Fran	XPF
66	Gambian Dalasi	GMD

No	Nama Valuta	Kode
67	Georgian Lari	GEL
68	Geerman Mark	DEM
69	Ghana Cedi	GHC
70	Gibraltar Pound	GIP
71	Guatemala Quetzal	GTQ
72	Guinea Franc	GNF
73	Guyana Dollar	GYD
74	Haiti Gourde	HTG
75	Honduras Lempira	HNL
76	Hong Kong Dollar	HKD
77	Hungarian Forint	HUF
78	Icelandic Krona	ISK
79	Indonesian Rupiah	IDR
80	Iranian Rial	IRR
81	Iraqi Dinar	IQD
82	Irish Punt	IEP
83	Israeli Shekel	ILS
84	Italian Lira	ITL
85	Jamaican Dollar	JMD
86	Japanese Yen	JPY
87	Jordanian Dinar	JOD
88	Kazakhstan Tenge	KZT
89	Kenyan Shilling	KES
90	Korean Won	KRW
91	North Korean Won	KPW
92	Kuwaiti Dinar	KWD
93	Kyrgyzstan Som	KGS
94	Laos New Kip	LAK
95	Latvian Lats	LVL
96	Lebanese Pound	LBP
97	Loti Lesatho	LSL
98	Liberian Dollar	LRD
99	Libyan Dinar	LYD
100	Liechtenstein Franc	CHF

No	Nama Valuta	Kode
101	Lithuanian Litas	LTL
102	Luxembourg Franc	LUF
103	Macau Pataca	MOP
104	Macedonian Denar	MKD
105	Madagascar Franc	MGF
106	Malawi Kwacha	MWK
107	Malaysian Ringgit	MYR
108	Maldives Rufiyaa	MVR
109	Malian Franc	MLF
110	Maltese Lira	MTL
111	Mauritania Ouguiya	MRO
112	Mauritius Rupee	MUR
113	Mexican Peso	MXN
114	Moldova Lei	MDL
115	Mongolia Tugrik	MNT
116	Moroccan Dirham	MAD
117	Mozambique Metical	MZM
118	Myanmar Kyat	MMK
119	Namibia Dollar	NAD
120	Rand (South African Rand)	ZAR
121	Nepalese Rupee	NPR
122	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	ANG
123	Nigeria Naira	NGN
124	Omani Rial	OMR
125	Pakistan Rupee	PKR
126	Panamanian Balboa	PAB
127	Papua New Guinea Kina	PGK
128	Paraguayan Guarani	PYG
129	Peruvian Nuevo	PEN
130	Philippines Peso	PHP
131	Polis Zloty/New Zloty	PLN
132	Portuguese Escudo	PTE
133	Qatari Rial	QAR
134	Romanian Leu	ROL

No	Nama Valuta	Kode
135	Russian Rouble	RUB
136	Rwanda Franc	RWF
137	Samoan (West) Tala	WST
138	Sao Tome Dobra	STD
139	Saudi Riyal	SAR
140	Sierra Leone Leone	SLL
141	Singapore Dollar	SGD
142	Slovakian Koruna	SKK
143	Slovenia Tolar	SIT
144	Solomon Islands Dollar	SBD
145	Somali Schilling	SOS
146	Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc)	ESP
147	Spanish Peseta	ESB
148	Sri Langka Rupee	LKR
149	St. Helena Pound	SHP
150	Sudanese Pound	SDP
151	Sudanese Dinar	SDD
152	Surinam Guilder	SRG
153	Surinam Dollar	SRD
154	Swaziland Lilangeni	SZL
155	Swedish Krone	SEK
156	Syrian Pound	SYP
157	Taiwan Dollar	TWD
158	Tajikistan Somoni	TJS
159	Tanzanian Shilling	TZS
160	Thai Bath	THB
161	Tonga Pa'anga	TOP
162	Trinidad & Tobago Dollar	TTD
163	Tunisian Dinar	TND
164	Turkish Lira	TRL
165	Turkmenistan Manat	TMM
166	Ugandan Shilling	UGX
167	Ukrainian Hryvna	UAH
168	UAE Dirham	AED

No	Nama Valuta	Kode
169	Uruguay Peso	UYU
170	Uzbekistan Sum	UZS
171	Vanuatu Vatu	VUV
172	Venezuelan Bolivar	VEB
173	Vietnam Dong	VND
174	Yemeni Rial	YER
175	Yugoslav Dinar	YUM
176	Greek Drachma	GRD
177	Zambian Kwacha	ZMK
178	Zimbabwe Dollar	ZWD
179	Special Drawing Right	XDR
180	Silver	XAG
181	Gold	XAU
182	Canadian Dollar	CAD
183	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
184	Cape Verde Escudo	CVE

BAB VIII
DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
1	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)	0010
2	Kementerian Keuangan	0020
3	Kementerian Pertahanan	0030
4	Kementerian Kehutanan	0040
5	Kementerian Pertanian	0050
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	0060
7	Kementerian Agama	0070
8	Kementerian BUMN	0080
9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0090
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0100
11	Kementerian Kesehatan	0110
12	Kementerian Perhubungan	0120
13	Kementerian Lainnya	0999
14	Badan Layanan Umum Kesehatan	0131
15	Badan Layanan Umum Pendidikan	0132
16	Badan Layanan Umum Lainnya	0199
17	Pemerintah Daerah (Provinsi)	1010
18	Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota)	1020
19	Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten)	1030
20	Badan Layanan Umum Daerah (Propinsi)	1041
21	Badan Layanan Umum Daerah (Kota atau Kabupaten)	1042
22	Badan dan Lembaga Pemerintah	2090
23	Lembaga Penjamin Simpanan	2020
24	Otoritas Jasa Keuangan	2030
25	Bank Indonesia	0001
26	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4111
27	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	4117
28	Taspen	4112
29	Jiwasraya	4113
30	Jasa Raharja	4114
31	Jasindo	4115
32	ASABRI	4116
33	Perusahaan Asuransi Lainnya	4119
34	Dana Pensiun	4120
35	Modal Ventura	4130
36	Perusahaan Pembiayaan	4140

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
37	Perusahaan Sekuritas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	4151
38	Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	4152
39	Perusahaan Reksadana	4153
40	Manajer Investasi	4154
41	PT Danareksa	4155
42	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Lainnya	4159
43	PT Pegadaian	4171
44	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	4173
45	Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya	4179
46	PT Kereta Api Indonesia	4501
47	PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	4502
48	PT Pelabuhan Laut Indonesia (Pelindo)	4503
49	PT Dirgantara Indonesia	4517
50	PT Industri Kapal Indonesia	4518
51	PT PAL Indonesia	4519
52	PT Sucofindo	4520
53	PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)	4504
54	PT Angkasa Pura	4505
55	PT Perkebunan Nusantara	4506
56	PT Rajawali Nusantara Indonesia	4521
57	PT Pertamina	4507
58	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	4508
59	PT Perusahaan Gas Negara (PGN)	4522
60	PT Krakatau Steel	4509
61	PT Garuda Indonesia	4510
62	PT Telkom	4511
63	PT Jasa Marga	4513
64	PT Timah	4514
65	PT Aneka Tambang	4515
66	PT Bukit Asam Tbk	4523
67	Perusahaan Jasa Konstruksi	4516
68	PT Pos Indonesia	4172
69	PT Pupuk Sriwijaya	4524
70	Badan Urusan Logistik	2010
71	Bukan Lembaga Keuangan Lainnya	4599
72	Badan Usaha Milik Daerah-Perusahaan Asuransi	5110
73	Badan Usaha Milik Daerah-Dana Pensiun	5120
74	Badan Usaha Milik Daerah-Modal Ventura	5130

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
75	Badan Usaha Milik Daerah-Perusahaan Pembiayaan	5140
76	Badan Usaha Milik Daerah- Perusahaan Sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana	5151
77	Badan Usaha Milik Daerah-Perusahaan Sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana	5152
78	Badan Usaha Milik Daerah-Perusahaan Reksadana	5153
79	Badan Usaha Milik Daerah-Manajer Investasi	5154
80	Badan Usaha Milik Daerah-Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya	5159
81	Badan Usaha Milik Daerah Lainnya	5199
82	Badan Usaha Milik Daerah Bukan Lembaga Keuangan-PDAM	5501
83	Badan Usaha Milik Daerah Bukan Lembaga Keuangan-PD PASAR	5502
84	Badan Usaha Milik Daerah-Bukan Lembaga Keuangan Lainnya	5599
85	Sektor Swasta-Lembaga Keuangan Non Bank Nasional-Perusahaan Asuransi	7110
86	Sektor Swasta-Lembaga Keuangan Non Bank Nasional-Dana Pensiun	7120
87	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non-Bank-Modal Ventura	7130
88	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non-Bank-Perusahaan Pembiayaan	7140
89	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non-Bank-Perusahaan Sekuritas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7151
90	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non-Bank-Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7152
91	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non-Bank -Perusahaan Reksadana	7153
92	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non Bank-Manajer Investasi	7154
93	Sektor Swasta Nasional-Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	7159
94	Sektor Swasta Nasional- <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	7172
95	Sektor Swasta Nasional-Koperasi Simpan Pinjam Primer	7173
96	Sektor Swasta Nasional-Koperasi Simpan Pinjam Lainnya	7174
97	Sektor Swasta Nasional-Lainnya	7190

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
98	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Asuransi	7210
99	Sektor Swasta Campuran Dana Pensiun	7220
100	Sektor Swasta Campuran Modal Ventura	7230
101	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Pembiayaan	7240
102	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Sekuritas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7251
103	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7252
104	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Reksadana	7253
105	Sektor Swasta Campuran Manajer Investasi	7254
106	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Lainnya	7259
107	Sektor Swasta Campuran <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	7272
108	Sektor Swasta Campuran Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya	7273
109	Sektor Swasta Campuran Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya	7290
110	Sektor Swasta Asing Perusahaan Asuransi	7310
111	Sektor Swasta Asing Dana Pensiun	7320
112	Sektor Swasta Asing Modal Ventura	7330
113	Sektor Swasta Asing Perusahaan Pembiayaan	7340
114	Sektor Swasta Asing Perusahaan Sekuritas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7351
115	Sektor Swasta Asing Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Kegiatan Usaha Reksadana	7352
116	Sektor Swasta Asing Perusahaan Reksadana	7353
117	Sektor Swasta Asing Manajer Investasi	7354
118	Sektor Swasta Asing Perusahaan Sekuritas dan Reksadana Lainnya	7359
119	Sektor Swasta Asing Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	7372
120	Sektor Swasta Asing Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya	7379
121	Sektor Swasta Asing Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya	7390
122	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Otomotif	8111
123	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Perminyakan	8112
124	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Tekstil	8113
125	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Perkayuan (HPH)	8114
126	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i>	8120
127	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya	8121

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
128	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Industri Rokok	8116
129	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Industri Makanan	8117
130	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Agrobisnis	8118
131	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Telekomunikasi	8119
132	Sektor Swasta Nasional Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya	8139
133	Sektor Swasta Nasional Koperasi Primer	8141
134	Sektor Swasta Nasional Koperasi Lainnya	8149
135	Sektor Swasta Nasional Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah	8151
136	Sektor Swasta Nasional Lembaga Pendidikan	8152
137	Sektor Swasta Nasional Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	8159
138	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Otomotif	8411
139	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Perminyakan	8412
140	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Tekstil	8413
141	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Perkayuan	8414
142	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Properti dan Real Estate	8420
143	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya	8421
144	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Industri Rokok	8416
145	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Industri Makanan	8417
146	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Agrobisnis	8418
147	Sektor Swasta Campuran Perusahaan Telekomunikasi	8419
148	Sektor Swasta Campuran Perusahaan-Perusahaan Lainnya	8449
149	Sektor Swasta Campuran Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah	8451
150	Sektor Swasta Campuran Lembaga Pendidikan	8452
151	Sektor Swasta Campuran Yayasan, Badan Sosial, dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	8469
152	Sektor Swasta Campuran Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya	8480
153	Sektor Swasta Asing Perusahaan Otomotif	8611
154	Sektor Swasta Asing Perusahaan Perminyakan	8612
155	Sektor Swasta Asing Perusahaan Tekstil	8613
156	Sektor Swasta Asing Perusahaan Perkayuan	8614
157	Sektor Swasta Asing Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i>	8620
158	Sektor Swasta Asing Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya	8621
159	Sektor Swasta Asing Perusahaan Industri Rokok	8616

No	Jenis Pihak Ketiga	Kode
160	Sektor Swasta Asing Perusahaan Industri Makanan	8617
161	Sektor Swasta Asing Perusahaan Agrobisnis	8618
162	Sektor Swasta Asing Perusahaan-Perusahaan Lainnya	8619
163	Sektor Swasta Asing Badan Amil Zakat, Infak, dan <i>Shadaqah</i>	8651
164	Sektor Swasta Asing Lembaga Pendidikan	8652
165	Sektor Swasta Asing Yayasan, Badan Sosial, dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	8659
166	Sektor Swasta Asing Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya	8670
167	Sektor Swasta Lainnya (Perusahaan atau Bank Dilikuidasi)	8900
168	Perseorangan	9000
169	Pemerintah Pusat	9100
170	Pemerintah Daerah	9110
171	Perwakilan Negara-negara Asing dan Stafnya	9200
172	BUMN Milik Negara Asing	9300
173	Lembaga-lembaga Keuangan Bukan Bank yang Beroperasi di Luar Indonesia	9400
174	Lembaga-lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Negara Asing	9410
175	Swasta Lainnya-Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing	9501
176	Swasta Lainnya-Swasta Milik Indonesia	9502
177	Swasta Lainnya-Lainnya	9519
178	Islamic Development Bank (IDB)	9611
179	Asian Development Bank (ADB)	9612
180	World Bank Group	9613
181	African Development Bank Group	9614
182	European Bank for Reconstruction and Development	9615
183	Inter-American Development Bank Group	9616
184	European Investment Bank	9617
185	European Investment Fund	9618
186	Nordic Investment Bank	9619
187	Caribbean Development Bank	9620
188	Council of Europe Development Bank	9621
189	Bank Pembangunan Multiteral Lainnya	9629
190	Lembaga Internasional Lainnya	9690
191	Bukan Penduduk-Perseorangan	9700
192	Perbankan	0002

BAB IX
DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
1	01	0100	Provinsi Jawa Barat
2	01	0102	Kab. Bekasi
3	01	0103	Kab. Purwakarta
4	01	0106	Kab. Karawang
5	01	0108	Kab. Bogor
6	01	0109	Kab. Sukabumi
7	01	0110	Kab. Cianjur
8	01	0111	Kab. Bandung
9	01	0112	Kab. Sumedang
10	01	0113	Kab. Tasikmalaya
11	01	0114	Kab. Garut
12	01	0115	Kab. Ciamis
13	01	0116	Kab. Cirebon
14	01	0117	Kab. Kuningan
15	01	0118	Kab. Indramayu
16	01	0119	Kab. Majalengka
17	01	0121	Kab. Subang
18	01	0122	Kab. Bandung Barat
19	01	0123	Kab. Pangandaran
20	01	0180	Kota Banjar
21	01	0191	Kota Bandung
22	01	0192	Kota Bogor
23	01	0193	Kota Sukabumi
24	01	0194	Kota Cirebon
25	01	0195	Kota Tasikmalaya
26	01	0196	Kota Cimahi
27	01	0197	Kota Depok
28	01	0198	Kota Bekasi
29	02	0200	Provinsi Banten
30	02	0201	Kab. Lebak
31	02	0202	Kab. Pandeglang
32	02	0203	Kab. Serang
33	02	0204	Kab. Tangerang
34	02	0291	Kota Cilegon
35	02	0292	Kota Tangerang
36	02	0293	Kota Serang
37	02	0294	Kota Tangerang Selatan
38	03	0300	Provinsi DKI Jakarta Raya
39	03	0391	Wil. Kota Jakarta Pusat
40	03	0392	Wil. Kota Jakarta Utara
41	03	0393	Wil. Kota Jakarta Barat
42	03	0394	Wil. Kota Jakarta Selatan
43	03	0395	Wil. Kota Jakarta Timur
44	03	0396	Wil. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
45	05	0500	Daerah Istimewa Yogyakarta
46	05	0501	Kab. Bantul
47	05	0502	Kab. Sleman
48	05	0503	Kab. Gunung Kidul
49	05	0504	Kab. Kulon Progo
50	05	0591	Kota Yogyakarta
51	09	0900	Provinsi Jawa Tengah
52	09	0901	Kab. Semarang
53	09	0902	Kab. Kendal
54	09	0903	Kab. Demak
55	09	0904	Kab. Grobogan
56	09	0905	Kab. Pekalongan
57	09	0906	Kab. Tegal
58	09	0907	Kab. Brebes
59	09	0908	Kab. Pati
60	09	0909	Kab. Kudus
61	09	0910	Kab. Pemalang
62	09	0911	Kab. Jepara
63	09	0912	Kab. Rembang
64	09	0913	Kab. Blora
65	09	0914	Kab. Banyumas
66	09	0915	Kab. Cilacap
67	09	0916	Kab. Purbalingga
68	09	0917	Kab. Banjarnegara
69	09	0918	Kab. Magelang
70	09	0919	Kab. Temanggung
71	09	0920	Kab. Wonosobo
72	09	0921	Kab. Purworejo
73	09	0922	Kab. Kebumen
74	09	0923	Kab. Klaten
75	09	0924	Kab. Boyolali
76	09	0925	Kab. Sragen
77	09	0926	Kab. Sukoharjo
78	09	0927	Kab. Karanganyar
79	09	0928	Kab. Wonogiri
80	09	0929	Kab. Batang
81	09	0991	Kota Semarang
82	09	0992	Kota Salatiga
83	09	0993	Kota Pekalongan
84	09	0994	Kota Tegal
85	09	0995	Kota Magelang
86	09	0996	Kota Surakarta/Solo
87	12	1200	Provinsi Jawa Timur
88	12	1201	Kab. Gresik
89	12	1202	Kab. Sidoarjo
90	12	1203	Kab. Mojokerto
91	12	1204	Kab. Jombang

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
92	12	1205	Kab. Sampang
93	12	1206	Kab. Pamekasan
94	12	1207	Kab. Sumenep
95	12	1208	Kab. Bangkalan
96	12	1209	Kab. Bondowoso
97	12	1211	Kab. Banyuwangi
98	12	1212	Kab. Jember
99	12	1213	Kab. Malang
100	12	1214	Kab. Pasuruan
101	12	1215	Kab. Probolinggo
102	12	1216	Kab. Lumajang
103	12	1217	Kab. Kediri
104	12	1218	Kab. Nganjuk
105	12	1219	Kab. Tulungagung
106	12	1220	Kab. Trenggalek
107	12	1221	Kab. Blitar
108	12	1222	Kab. Madiun
109	12	1223	Kab. Ngawi
110	12	1224	Kab. Magetan
111	12	1225	Kab. Ponorogo
112	12	1226	Kab. Pacitan
113	12	1227	Kab. Bojonegoro
114	12	1228	Kab. Tuban
115	12	1229	Kab. Lamongan
116	12	1230	Kab. Situbondo
117	12	1271	Kota Batu
118	12	1291	Kota Surabaya
119	12	1292	Kota Mojokerto
120	12	1293	Kota Malang
121	12	1294	Kota Pasuruan
122	12	1295	Kota Probolinggo
123	12	1296	Kota Blitar
124	12	1297	Kota Kediri
125	12	1298	Kota Madiun
126	23	2300	Provinsi Bengkulu
127	23	2301	Kab. Bengkulu Selatan
128	23	2302	Kab. Bengkulu Utara
129	23	2303	Kab. Rejang Lebong
130	23	2304	Kab. Lebong
131	23	2305	Kab. Kepahiang
132	23	2306	Kab. Mukomuko
133	23	2307	Kab. Seluma
134	23	2308	Kab. Kaur
135	23	2309	Kab. Bengkulu Tengah
136	23	2391	Kota Bengkulu
137	31	3100	Provinsi Jambi
138	31	3101	Kab. Batanghari

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
139	31	3104	Kab. Sarolangun
140	31	3105	Kab. Kerinci
141	31	3106	Kab. Muaro Jambi
142	31	3107	Kab. Tanjung Jabung Barat
143	31	3108	Kab. Tanjung Jabung Timur
144	31	3109	Kab. Tebo
145	31	3111	Kab. Merangin
146	31	3112	Kab. Bungo
147	31	3191	Kota Jambi
148	31	3192	Kota Sungai Penuh
149	32	3200	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
150	32	3201	Kab. Aceh Besar
151	32	3202	Kab. Pidie
152	32	3203	Kab. Aceh Utara
153	32	3204	Kab. Aceh Timur
154	32	3205	Kab. Aceh Selatan
155	32	3206	Kab. Aceh Barat
156	32	3207	Kab. Aceh Tengah
157	32	3208	Kab. Aceh Tenggara
158	32	3209	Kab. Aceh Singkil
159	32	3210	Kab. Aceh Jeumpa / Bireuen
160	32	3211	Kab. Aceh Tamiang
161	32	3212	Kab. Gayo Luwes
162	32	3213	Kab. Aceh Barat Daya
163	32	3214	Kab. Aceh Jaya
164	32	3215	Kab. Nagan Raya
165	32	3216	Kab. Simeuleu
166	32	3217	Kab. Bener Meriah
167	32	3218	Kab. Pidie Jaya
168	32	3219	Kab. Subulussalam
169	32	3291	Kota Banda Aceh
170	32	3292	Kota Sabang
171	32	3293	Kota Lhokseumawe
172	32	3294	Kota Langsa
173	33	3300	Provinsi Sumatera Utara
174	33	3301	Kab. Deli Serdang
175	33	3302	Kab. Langkat
176	33	3303	Kab. Karo
177	33	3304	Kab. Simalungun
178	33	3305	Kab. Labuhan Batu
179	33	3306	Kab. Asahan
180	33	3307	Kab. Dairi
181	33	3308	Kab. Tapanuli Utara
182	33	3309	Kab. Tapanuli Tengah
183	33	3310	Kab. Tapanuli Selatan
184	33	3311	Kab. Nias
185	33	3313	Kab. Toba Samosir

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
186	33	3314	Kab. Mandailing Natal
187	33	3315	Kab. Nias Selatan
188	33	3316	Kab. Humbang Hasundutan
189	33	3317	Kab. Pakpak Bharat
190	33	3318	Kab. Samosir
191	33	3319	Kab. Serdang Bedagai
192	33	3321	Kab. Batu Bara
193	33	3322	Kab. Padang Lawas
194	33	3323	Kab. Padang Lawas Utara
195	33	3324	Kab. Labuanbatu Selatan
196	33	3325	Kab. Labuanbatu Utara
197	33	3326	Kab. Nias Barat
198	33	3327	Kab. Nias Utara
199	33	3391	Kota Tebing Tinggi
200	33	3392	Kota Binjai
201	33	3393	Kota Pematang Siantar
202	33	3394	Kota Tanjung Balai
203	33	3395	Kota Sibolga
204	33	3396	Kota Medan
205	33	3397	Kota Gunung Sitoli
206	33	3399	Kota Padang Sidempuan
207	34	3400	Provinsi Sumatera Barat
208	34	3401	Kab. Agam
209	34	3402	Kab. Pasaman
210	34	3403	Kab. Limapuluh Kota
211	34	3404	Kab. Solok Selatan
212	34	3405	Kab. Padang Pariaman
213	34	3406	Kab. Pesisir Selatan
214	34	3407	Kab. Tanah Datar
215	34	3408	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
216	34	3409	Kab. Kepulauan Mentawai
217	34	3410	Kab. Pasaman Barat
218	34	3411	Kab. Dharmasraya
219	34	3412	Kab. Solok
220	34	3491	Kota Bukittinggi
221	34	3492	Kota Padang
222	34	3493	Kota Sawahlunto
223	34	3494	Kota Padang Panjang
224	34	3495	Kota Solok
225	34	3496	Kota Payakumbuh
226	34	3497	Kota Pariaman
227	35	3500	Provinsi Riau
228	35	3501	Kab. Kampar
229	35	3502	Kab. Bengkalis
230	35	3504	Kab. Indragiri Hulu
231	35	3505	Kab. Indragiri Hilir
232	35	3508	Kab. Rokan Hulu

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
233	35	3509	Kab. Rokan Hilir
234	35	3510	Kab. Pelalawan
235	35	3511	Kab. Siak
236	35	3512	Kab. Kuantan Singingi
237	35	3513	Kab. Kepulauan Meranti
238	35	3591	Kota Pekanbaru
239	35	3592	Kota Dumai
240	36	3600	Provinsi Sumatera Selatan
241	36	3606	Kab. Musi Banyuasin
242	36	3607	Kab. Ogan Komering Ulu
243	36	3608	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)
244	36	3609	Kab. Lahat
245	36	3610	Kab. Musi Rawas
246	36	3611	Kab. Ogan Komering Ilir
247	36	3613	Kab. Banyuasin
248	36	3614	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
249	36	3615	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
250	36	3616	Kab. Ogan Ilir
251	36	3619	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
252	36	3691	Kota Palembang
253	36	3693	Kota Lubuklinggau
254	36	3694	Kota Prabumulih
255	36	3697	Kota Pagar Alam
256	36	3618	Kab. Musi Rawas Utara
257	36	3617	Kab. Empat Lawang
258	37	3700	Provinsi Kep. Bangka Belitung
259	37	3701	Kab. Bangka
260	37	3702	Kab. Belitung
261	37	3703	Kab. Bangka Barat
262	37	3704	Kab. Bangka Selatan
263	37	3705	Kab. Bangka Tengah
264	37	3706	Kab. Belitung Timur
265	37	3707	Kota Pangkal Pinang
266	38	3800	Provinsi Kep. Riau
267	38	3801	Kab. Karimun
268	38	3802	Kab. Lingga
269	38	3803	Kab. Natuna
270	38	3804	Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)
271	38	3805	Kab. Kepulauan Anambas
272	38	3891	Kota Tanjung Pinang
273	38	3892	Kota Batam
274	39	3900	Provinsi Lampung
275	39	3901	Kab. Lampung Selatan
276	39	3902	Kab. Lampung Tengah
277	39	3903	Kab. Lampung Utara
278	39	3904	Kab. Lampung Barat
279	39	3905	Kab. Tulang Bawang

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
280	39	3906	Kab. Tanggamus
281	39	3907	Kab. Lampung Timur
282	39	3908	Kab. Way Kanan
283	39	3909	Kab. Pesawaran
284	39	3910	Kab. Pringsewu
285	39	3911	Kab. Tulang Bawang Barat
286	39	3913	Kab. Pesisir Barat
287	39	3991	Kota Bandar Lampung
288	39	3992	Kota Metro
289	39	3912	Kab. Mesuji
290	51	5100	Provinsi Kalimantan Selatan
291	51	5101	Kab. Banjar
292	51	5102	Kab. Tanah Laut
293	51	5103	Kab. Tapin
294	51	5104	Kab. Hulu Sungai Selatan
295	51	5105	Kab. Hulu Sungai Tengah
296	51	5106	Kab. Hulu Sungai Utara
297	51	5107	Kab. Barito Kuala
298	51	5108	Kab. Kota Baru
299	51	5109	Kab. Tabalong
300	51	5110	Kab. Tanah Bumbu
301	51	5111	Kab. Balangan
302	51	5191	Kota Banjarmasin
303	51	5192	Kota Banjarbaru
304	53	5300	Provinsi Kalimantan Barat
305	53	5301	Kab. Pontianak
306	53	5302	Kab. Sambas
307	53	5303	Kab. Ketapang
308	53	5304	Kab. Sanggau
309	53	5305	Kab. Sintang
310	53	5306	Kab. Kapuas Hulu
311	53	5307	Kab. Bengkayang
312	53	5308	Kab. Landak
313	53	5309	Kab. Sekadau
314	53	5310	Kab. Melawi
315	53	5311	Kab. Kayong Utara
316	53	5312	Kab. Kubu Raya
317	53	5391	Kota Pontianak
318	53	5392	Kota Singkawang
319	54	5400	Provinsi Kalimantan Timur
320	54	5401	Kab. Kutai Kartanegara
321	54	5402	Kab. Berau
322	54	5403	Kab. Paser
323	54	5405	Kab. Kutai Barat
324	54	5406	Kab. Kutai Timur
325	54	5411	Kab. Penajam Paser Utara
326	54	5413	kab. Mahakam Ulu

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
327	54	5491	Kota Samarinda
328	54	5492	Kota Balikpapan
329	54	5494	Kota Bontang
330	55	5500	Provinsi Kalimantan Utara
331	55	5404	Kab. Bulungan
332	55	5409	Kab. Nunukan
333	55	5410	Kab. Malinau
334	55	5412	Kab. Tana Tidung
335	55	5493	Kota Tarakan
336	58	5800	Provinsi Kalimantan Tengah
337	58	5801	Kab. Kapuas
338	58	5802	Kab. Kotawaringin Barat
339	58	5803	Kab. Kotawaringin Timur
340	58	5804	Kab. Murung Raya
341	58	5805	Kab. Barito Timur
342	58	5806	Kab. Barito Selatan
343	58	5807	Kab. Gunung Mas
344	58	5808	Kab. Barito Utara
345	58	5809	Kab. Pulang Pisau
346	58	5810	Kab. Seruyan
347	58	5811	Kab. Katingan
348	58	5812	Kab. Sukamara
349	58	5813	Kab. Lamandau
350	58	5892	Kota Palangkaraya
351	60	6000	Provinsi Sulawesi Tengah
352	60	6001	Kab. Donggala
353	60	6002	Kab. Poso
354	60	6003	Kab. Banggai
355	60	6004	Kab. Toli-Toli
356	60	6005	Kab. Banggai Kepulauan
357	60	6006	Kab. Morowali
358	60	6007	Kab. Buol
359	60	6008	Kab. Tojo Una-Una
360	60	6009	Kab. Parigi Moutong
361	60	6010	Kab. Sigi
362	60	6091	Kota Palu
363	60	6012	Kab. Morowali Utara
364	60	6011	Kab. Banggai Laut
365	61	6100	Provinsi Sulawesi Selatan
366	61	6101	Kab. Pinrang
367	61	6102	Kab. Gowa
368	61	6103	Kab. Wajo
369	61	6105	Kab. Bone
370	61	6106	Kab. Tana Toraja
371	61	6107	Kab. Maros
372	61	6109	Kab. Luwu
373	61	6110	Kab. Sinjai

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
374	61	6111	Kab. Bulukumba
375	61	6112	Kab. Bantaeng
376	61	6113	Kab. Jeneponto
377	61	6114	Kab. Kepulauan Selayar
378	61	6115	Kab. Takalar
379	61	6116	Kab. Barru
380	61	6117	Kab. Sidenreng Rappang
381	61	6118	Kab. Pangkajene Kepulauan
382	61	6119	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
383	61	6121	Kab. Enrekang
384	61	6122	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
385	61	6124	Kab. Luwu Utara
386	61	6125	Kab. Toraja Utara
387	61	6191	Kota Makassar
388	61	6192	Kota Pare-Pare
389	61	6193	Kota Palopo
390	62	6200	Provinsi Sulawesi Utara
391	62	6202	Kab. Minahasa
392	62	6203	Kab. Bolaang Mongondow
393	62	6204	Kab. Kepulauan Sangihe
394	62	6205	Kab. Kepulauan Talaud
395	62	6206	Kab. Minahasa Selatan
396	62	6207	Kab. Minahasa Utara
397	62	6209	Kab. Minahasa Tenggara
398	62	6210	Kab. Bolaang Mongondow Utara
399	62	6211	Kab. Kepulauan Sitaro
400	62	6212	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
401	62	6213	Kab. Bolaang Mongondow Timur
402	62	6291	Kota Manado
403	62	6292	Kota Kotamobagu
404	62	6293	Kota Bitung
405	62	6294	Kota Tomohon
406	63	6300	Provinsi Gorontalo
407	63	6301	Kab. Gorontalo
408	63	6302	Kab. Bualemo
409	63	6303	Kab. Bonebolango
410	63	6304	Kab. Pohuwato
411	63	6305	Kab. Gorontalo Utara
412	63	6391	Kota Gorontalo
413	64	6400	Provinsi Sulawesi Barat
414	64	6401	Kab. Polewali Mandar
415	64	6402	Kab. Majene
416	64	6403	Kab. Mamasa
417	64	6405	Kab. Mamuju Tengah
418	64	6404	Kab. Mamuju Utara
419	64	6406	Kab. Mamuju
420	69	6900	Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
421	69	6901	Kab. Buton
422	69	6903	Kab. Muna
423	69	6904	Kab. Kolaka
424	69	6905	Kab. Wakatobi
425	69	6906	Kab. Konawe
426	69	6907	Kab. Konawe Selatan
427	69	6908	Kab. Bombana
428	69	6909	Kab. Kolaka Utara
429	69	6910	Kab. Buton Utara
430	69	6916	Kab. Muna Barat
431	69	6990	Kota Bau-Bau
432	69	6991	Kota Kendari
433	69	6912	Kab. Kaloka Timur
434	69	6915	Kab. Buton Tengah
435	69	6914	Kab. Buton Selatan
436	69	6911	Kab. Konawe Utara
437	69	6913	Kab. Konawe Kepulauan
438	71	7100	Provinsi Nusa Tenggara Barat
439	71	7101	Kab. Lombok Barat
440	71	7102	Kab. Lombok Tengah
441	71	7103	Kab. Lombok Timur
442	71	7104	Kab. Sumbawa
443	71	7105	Kab. Bima
444	71	7106	Kab. Dompu
445	71	7107	Kab. Sumbawa Barat
446	71	7108	Kab. Lombok Utara
447	71	7191	Kota Mataram
448	71	7192	Kota Bima
449	72	7200	Provinsi Bali
450	72	7201	Kab. Buleleng
451	72	7202	Kab. Jembrana
452	72	7203	Kab. Tabanan
453	72	7204	Kab. Badung
454	72	7205	Kab. Gianyar
455	72	7206	Kab. Klungkung
456	72	7207	Kab. Bangli
457	72	7208	Kab. Karangasem
458	72	7291	Kota Denpasar
459	74	7400	Provinsi Nusa Tenggara Timur
460	74	7401	Kab. Kupang
461	74	7402	Kab. Timor-Tengah Selatan
462	74	7403	Kab. Timor-Tengah Utara
463	74	7404	Kab. Belu
464	74	7405	Kab. Alor
465	74	7406	Kab. Flores Timur
466	74	7407	Kab. Sikka
467	74	7408	Kab. Ende

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
468	74	7409	Kab. Ngada
469	74	7410	Kab. Manggarai
470	74	7411	Kab. Sumba Timur
471	74	7412	Kab. Sumba Barat
472	74	7413	Kab. Lembata
473	74	7414	Kab. Rote Ndao
474	74	7415	Kab. Manggarai Barat
475	74	7416	Kab. Sumba Tengah
476	74	7417	Kab. Sumba Barat Daya
477	74	7418	Kab. Manggarai Timur
478	74	7419	Kab. Nagekeo
479	74	7421	Kab. Malaka
480	74	7491	Kota Kupang
481	74	7420	Kab. Sabu Raijua
482	81	8100	Provinsi Maluku
483	81	8101	Kab. Maluku Tengah
484	81	8102	Kab. Maluku Tenggara
485	81	8103	Kab. Maluku Tenggara Barat
486	81	8104	Kab. Buru
487	81	8105	Kab. Seram Bagian Barat
488	81	8106	Kab. Seram Bagian Timur
489	81	8107	Kab. Kepulauan Aru
490	81	8108	Kab. Maluku Barat Daya
491	81	8109	Kab. Buru Selatan
492	81	8191	Kota Ambon
493	81	8192	Kota Tual
494	82	8200	Provinsi Papua
495	82	8201	Kab. Jayapura
496	82	8202	Kab. Biak Numfor
497	82	8210	Kab. Kepulauan Yapen-Waropen
498	82	8211	Kab. Merauke
499	82	8212	Kab. Paniai
500	82	8213	Kab. Jayawijaya
501	82	8214	Kab. Nabire
502	82	8215	Kab. Mimika
503	82	8216	Kab. Puncak Jaya
504	82	8217	Kab. Sarmi
505	82	8218	Kab. Keerom
506	82	8221	Kab. Pegunungan Bintang
507	82	8222	Kab. Yahukimo
508	82	8223	Kab. Tolikara
509	82	8224	Kab. Waropen
510	82	8226	Kab. Boven Digoel
511	82	8227	Kab. Mappi
512	82	8228	Kab. Asmat
513	82	8231	Kab. Supiori
514	82	8232	Kab. Mamberamo Raya

No	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Nama
515	82	8233	Kab. Dogiyai
516	82	8234	Kab. Lanny Jaya
517	82	8235	Kab. Mamberamo Tengah
518	82	8236	Kab. Nduga
519	82	8237	Kab. Yalimo
520	82	8238	Kab. Puncak
521	82	8240	Kab. Deiya
522	82	8291	Kota Jayapura
523	82	8239	Kab. Intan Jaya
524	83	8300	Provinsi Maluku Utara
525	83	8302	Kab. Halmahera Tengah
526	83	8303	Kab. Halmahera Utara
527	83	8304	Kab. Halmahera Timur
528	83	8305	Kab. Halmahera Barat
529	83	8306	Kab. Halmahera Selatan
530	83	8307	Kab. Kepulauan Sula
531	83	8308	Kab. Pulau Morotai
532	83	8390	Kota Ternate
533	83	8391	Kota Tidore Kepulauan
534	83	8309	Kab. Pulau Taliabu
535	84	8400	Provinsi Papua Barat
536	84	8401	Kab. Sorong
537	84	8402	Kab. Fak-Fak
538	84	8403	Kab. Manokwari
539	84	8404	Kab. Sorong Selatan
540	84	8405	Kab. Raja Ampat
541	84	8406	Kab. Kaimana
542	84	8407	Kab. Teluk Bintuni
543	84	8408	Kab. Teluk Wondama
544	84	8409	Kab. Tembrauw
545	84	8410	Kab. Maybrat
546	84	8491	Kota Sorong
547	84	8411	Kab. Pegunungan Arfak
548	84	8412	Kab. Manokwari Selatan
549	99	9999	Di Luar Indonesia
550	00	0000	Lainnya Tidak Terdefinisi

BAB X
STRUKTUR DATA

- A. Pelaporan Rutin
1. *Header* Laporan

Format *header* laporan sama untuk semua segmen. *Header* laporan ditulis pada baris pertama untuk setiap segmen.

No	Data	Tipe Data	Panjang karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1	<i>Flag Header</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "H"
2	Kode Jenis Pelapor	char	4	M	√	angka	
3	Kode Pelapor	varchar	6	M	√	angka	
4	Tahun	num	4	M		angka	Tahun data. Contoh: "2020" (tanpa tanda petik)
5	Bulan	num	2	M		angka	Bulan data. Contoh untuk bulan Januari ditulis "01" (tanpa tanda petik)
6	Kode Jenis atau Segmen Data	char	3	M	√	huruf angka	
7	Jumlah Data <i>File</i>	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam <i>file</i> tersebut
8	Jumlah Data Segmen	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam segmen tersebut

Dalam hal terdapat segmen yang tidak memiliki data maka Pelapor tetap melaporkan segmen tersebut yang hanya berisi informasi *header* dengan jumlah data *file* dan jumlah data segmen diisi angka “0” (nol).

2. Debitur Perseorangan

Nama Segmen : Debitur Perseorangan

Kode Segmen : D01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Primary key. CIF harus unik dan konsisten
3		Jenis Identitas	char	1	M	√	angka	
4		Nomor Identitas	varchar	25	M		huruf angka	
5		Nama Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
6		Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
7		Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur	char	2	M	√	angka	
8		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
9		Tempat Lahir	varchar	50	M		spasi huruf angka	
10		Tanggal Lahir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Nomor Pokok Wajib Pajak	varchar	25	O		angka	
12		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' /.	
13		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
14		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
15		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
16		Kode Pos	char	5	M		angka	
17		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
18		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
19		Alamat <i>E-mail</i>	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . _ -	
20		Kode Negara Domisili	char	3	M	√	huruf angka	
21		Kode Pekerjaan	char	3	M	√	angka	
22		Tempat Bekerja	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
23		Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja	char	6	M	√	angka	
24		Alamat Tempat Bekerja	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
25		Penghasilan Kotor Per-Tahun	num	12	O		angka	
26		Kode Sumber Penghasilan	char	1	O	√	angka	
27		Jumlah Tanggungan	num	2	O		angka	
28		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	4	M	√	angka	
29		Kode Golongan Debitur	char	4	M	√	angka	
30		Status Perkawinan Debitur	char	1	O		angka	
31		Nomor Identitas Pasangan	varchar	25	O		huruf angka	
32		Nama Pasangan	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ' ,	
33		Tanggal Lahir Pasangan	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
34		Perjanjian Pisah Harta	char	1	O		huruf	
35		Melanggar BMPK/BMP D/BMPP	char	1	M		huruf	
36		Melampaui BMPK/BMP D/BMPP	char	1	M		huruf	
37		Nama Gadis Ibu Kandung	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
38		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
39		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i>)

3. Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Debitur Badan Usaha

Kode Segmen : D02

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key</i> . CIF harus unik dan konsisten
3		Nomor Identitas Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	
4		Nama Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: () - ' . , & @ . _ ‘ ”	
5		Kode Bentuk Badan Usaha	char	2	M	√	angka	
6		Tempat Pendirian	varchar	50	M		spasi huruf tanda baca: - ' . ,	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
7		Nomor Akta Pendirian	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ' , - _ () . ,	
8		Tanggal Akta Pendirian	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
9		Nomor Akta Perubahan Terakhir	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ' , - _ () . ,	
10		Tanggal Akta Perubahan Terakhir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
12		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
13		Alamat <i>E-mail</i>	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . _	
14		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
15		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
16		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
17		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
18		Kode Pos	char	5	M		angka	
19		Kode Negara Domisili	char	3	M	√	huruf angka	
20		Kode Bidang Usaha	char	6	M	√	angka	
21		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	4	M	√	angka	
22		Melanggar BMPK/BMP D/ BMPP	char	1	M		huruf	
23		Melampaui BMPK/BMP D/ BMPP	char	1	M		huruf	
24		<i>Go Public</i>	char	1	M		huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
25		Kode Golongan Debitur	char	4	M	√	angka	
26		Peringkat atau <i>Rating</i> Debitur	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () _ - / +	
27		Lembaga Pemeringkat atau <i>Rating</i>	char	2	C	√	angka	
28		Tanggal Pemeringkatan	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
29		Nama Grup Usaha Debitur	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . () /	
30		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
31		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i>)

4. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Kode Segmen : F01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
4		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
5		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	char	2	M	√	angka	
6		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	char	2	M	√	angka	
7		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
8		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
9		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
10		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
11		Frekuensi Perpanjanga n Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
12		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
13		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
14		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
15		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	angka	
16		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
17		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
19		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
20		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
21		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
22		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
23		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
24		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	3	M	√	angka	
25		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	C	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
26		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank.
27		Plafon Awal	num	15	M		angka	
28		Plafon	num	15	M		angka	
29		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
30		Denda	num	15	M		angka	
31		Baki Debet	num	15	M		angka	
32		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
33		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
34		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
35		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
36		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
37		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
38		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
39		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
40		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
41		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
42		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
43		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	
44		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
45		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
46		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - ` ' " . , : ; / ? !	
47		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
48		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C=Create, U=Update)

5. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Kode Segmen : F02

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3	Ya	Nomor Debitur CIF	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
4		Sequence Debitur Anggota Joint Account	Num	2	M		angka	Diisi sequence Debitur yang memiliki fasilitas joint account
5		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	Char	1	M	√	angka	
6		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	Char	2	M	√	angka	
7		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Char	2	M	√	angka	
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
12		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
13		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
14		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
15		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
16		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	angka	
17		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
19		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
20		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
21		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
22		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
23		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
24		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
25		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	3	M	√	angka	
26		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	O	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
27		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
28		Plafon Awal	num	15	M		angka	
29		Plafon	num	15	M		angka	
30		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
31		Denda	num	15	M		angka	
32		Baki Debet	num	15	M		angka	
33		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
34		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
35		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
36		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
37		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
38		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
39		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
40		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
41		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
42		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
43		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
44		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	
45		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
46		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
47		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ` ' " . , : ; / ? !	
48		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
49		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C=Create, U=Update)

6. Fasilitas Surat Berharga

Nama Segmen : Fasilitas Surat Berharga

Kode Segmen : F03

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga	varchar	25	M		huruf angka	Primary key, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Surat Berharga	char	3	M	√	angka	
5		Sovereign Rate	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () - +	
6		Listing	char	1	M		huruf	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
7		Peringkat Surat Berharga	varchar	20	O		huruf angka tanda baca: () - + & @ . _ ' " /	
8		Kode Tujuan Kepemilikan	char	1	M	√	angka	
9		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
10		Tanggal Pembelian	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
11		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
12		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
13		Nominal	num	15	M		angka	
14		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
15		Nilai Pasar	num	15	M		angka	
16		Nilai Perolehan	num	15	M		angka	
17		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
18		Tunggakan	num	15	M		angka	
19		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
20		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
21		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
22		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
23		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
24		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
25		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ' , " . , : ; / ? !	
26		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
27		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

7. Fasilitas *Irrevocable* L/C
- Nama Segmen : Fasilitas *Irrevocable* L/C
- Kode Segmen : F04

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening atau Nomor L/C	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis L/C	char	1	M	√	angka	
5		Kode Tujuan L/C	char	1	M	√	angka	
6		Tanggal Keluar	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	
12		Bank <i>Beneficiary</i>	varchar	50	O		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
13		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
14		Plafon	num	15	M		angka	
15		Nominal	num	15	M		angka	
16		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18		Tanggal Wanprestasi	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD
19		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
21		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ' . " . , : ; / ? !	
22		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

8. Fasilitas Garansi yang Diberikan

Nama Segmen : Fasilitas Garansi yang Diberikan
Kode Segmen : F05

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Garansi	char	2	M	√	angka	
5		Kode Tujuan Garansi	char	1	M	√	angka	
6		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
9		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
10		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
11		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
12		Nama yang Dijamin	varchar	150	M		huruf angka spasi tanda baca: () _ - ' . /	
13		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
14		Plafon	num	15	M		angka	
15		Nominal	num	15	M		angka	
16		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18		Tanggal WanPrestasi	date	8	O		angka	Format YYYYMMDD
19		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
21		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ' ' " . , : ; / ? !	
22		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

9. Fasilitas Lain

Nama Segmen : Fasilitas Lain

Kode Segmen : F06

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Fasilitas Lain	char	3	M	√	angka	
5		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
6		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
7		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format YYYYMMDD
8		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
9		Kode Valuta	char	4	M	√	huruf	
10		Nominal	num	15	M		angka	
11		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
12		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
13		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
14		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
15		Tunggakan	num	15	M		angka	
16		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
17		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
18		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
19		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ` ' " . , : ; / ? !	
20		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
21		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

10. Agunan

Nama Segmen : Agunan
Kode Segmen : A01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Kode Register atau Nomor Agunan	varchar	30	M		huruf angka	Kombinasi Kode Register Agunan dan Nomor Fasilitas harus unik dan konsisten
3	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	Primary key, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
5		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6		Kode Status Agunan	char	1	M	√	angka	
7		Kode Jenis Agunan	char	3	M	√	angka	
8		Peringkat Agunan	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () _ - + /	
9		Kode Lembaga Pemeringkat	char	2	C	√	spasi huruf angka tanda baca: - +	Harus diisi jika peringkat agunan diisi
10		Kode Jenis Pengikatan	char	2	C	√	angka	Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
11		Tanggal Pengikatan	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
12		Nama Pemilik Agunan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
13		Bukti Kepemilikan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: / - . ,	
14		Alamat Agunan	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' /.	
15		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	char	4	M	√	angka	
16		Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar	num	15	C		angka	
17		Nilai Agunan Menurut Pelapor	num	15	C		angka	
18		Tanggal Penilaian Agunan menurut Pelapor	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
19		Nilai Agunan menurut Penilai Independen	num	15	O		angka	
20		Nama Penilai Independen	varchar	150	C		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
21		Tanggal Penilaian Agunan menurut Penilai Independen	date	8	C		angka	Format YYYYMMDD
22		Status Paripasu	char	1	M		huruf	
23		Persentase Paripasu	num	6	C		Angka tanda baca: ,	Harus diisi apabila status paripasu Y (ya) Dikosongkan apabila status paripasu T (tidak)
24		Status Agunan Kredit <i>Joint Account</i>	char	1	M		huruf	
25		Diasuransikan	char	1	M		huruf	
26		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							# \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ' ' " . , : ; / ? !	
27		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
28		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i>)

11. Penjamin

Nama Segmen : Penjamin

Kode Segmen : P01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Identitas Penjamin	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
5		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6		Kode Jenis Identitas Penjamin	char	1	M	√	angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
7		Nama Penjamin Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
8		Nama Lengkap Penjamin	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
9		Kode Golongan Penjamin	char	4	M	√	angka	
10		Alamat Penjamin	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' /.	
11		Persentase Fasilitas yang Dijamin	num	6	O		angka tanda baca: ,	
12		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ - - ` ' " . , : ; / ? !	
13		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
14		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i>)

12. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha

Kode Segmen : M01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		Flag Detail	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M	√	angka	
5		Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & () - ' . ,	
6		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
7		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
8		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
9		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
10		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
11		Kode Jabatan	char	2	M	√	angka	
12		Pangsa Kepemilikan	num	5	M		angka tanda baca: ,	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
13		Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M		angka	
14		Kode Kantor Cabang	Char	3	M	√	angka	
15		Operasi Data	Char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

13. Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Laporan keuangan Debitur badan usaha

Kode Segmen : K01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key</i> . Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF
3		Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	date	6	M		angka	YYYYMM
4		Aset	num	20	M		angka	
5		Aset Lancar	num	20	M		angka	
6		Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
7		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
8		Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
9		Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
10		Aset Tidak Lancar	num	20	M		angka	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
11		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
12		Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
13		Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
14		Liabilitas	num	20	M		angka	
15		Liabilitas Jangka Pendek	num	20	M		angka	
16		Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
17		Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
18		Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
19		Liabilitas Jangka Panjang	num	20	M		angka	
20		Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
21		Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
22		Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
23		Ekuitas	num	20	M		angka tanda baca: -	

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
24		Pendapatan Usaha atau Operasional	num	20	M		angka	
25		Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	num	20	M		angka	
26		Laba atau Rugi Bruto	num	20	M		angka tanda baca: -	
27		Pendapatan lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
28		Beban Lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
29		Laba atau Rugi Sebelum Pajak	num	20	M		angka tanda baca: -	
30		Laba atau Rugi Tahun Berjalan	num	20	M		angka tanda baca: -	
31		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
32		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

B. Pelaporan *Summary* Fasilitas

Nama Segmen : Data *Summary* Fasilitas

Kode Segmen : S01

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening fasilitas pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06

No	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
3	Ya	Nomor CIF Debitur	char	20	M		huruf angka	<i>Primary key.</i> Harus terdaftar pada segmen D01 atau D02 kolom Nomor CIF Debitur
4		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
5		Kode Kualitas 1	char	1	C	√	angka	Bulan April 2016
6		Jumlah Hari Tunggakan 1	num	5	C		angka	Bulan April 2016
7		Kode Kualitas 2	char	1	C	√	angka	Bulan Mei 2016
8		Jumlah Hari Tunggakan 2	num	5	C		angka	Bulan Mei 2016
9		Kode Kualitas 3	char	1	C	√	angka	Bulan Juni 2016
10		Jumlah Hari Tunggakan 3	num	5	C		angka	Bulan Juni 2016
11		Kode Kualitas 4	char	1	C	√	angka	Bulan Juli 2016
12		Jumlah Hari Tunggakan 4	num	5	C		angka	Bulan Juli 2016
13		Kode Kualitas 5	char	1	C	√	angka	Bulan Agustus 2016
14		Jumlah Hari Tunggakan 5	num	5	C		angka	Bulan Agustus 2016
15		Kode Kualitas 6	char	1	C	√	angka	Bulan September 2016
16		Jumlah Hari Tunggakan 6	num	5	C		angka	Bulan September 2016
17		Kode Kualitas 7	char	1	C	√	angka	Bulan Oktober 2016
18		Jumlah Hari Tunggakan 7	num	5	C		angka	Bulan Oktober 2016
19		Kode Kualitas 8	char	1	C	√	angka	Bulan November 2016
20		Jumlah Hari Tunggakan 8	num	5	C		angka	Bulan November 2016
21		Kode Kualitas 9	char	1	C	√	angka	Bulan Desember 2016
22		Jumlah Hari Tunggakan 9	num	5	C		angka	Bulan Desember 2016
23		Kode Kualitas 10	char	1	C	√	angka	Bulan Januari 2017
24		Jumlah Hari Tunggakan 10	num	5	C		angka	Bulan Januari 2017
25		Kode Kualitas 11	char	1	C	√	angka	Bulan Februari 2017
26		Jumlah Hari Tunggakan 11	num	5	C		angka	Bulan Februari 2017
27		Kode Kualitas 12	char	1	C	√	angka	Bulan Maret 2017
28		Jumlah Hari Tunggakan 12	num	5	C		angka	Bulan Maret 2017

Keterangan:
* *Primary Key*
** *Mandatory/ Conditional/ Optional*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari